



# LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* PER 31 DESEMBER 2023

TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON 1  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Kata Pengantar



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 08 Mei 2024  
Kepala BPPSDM,

I Nyoman Radiarta

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iv
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	5
II. Neraca .....	6
III. Laporan Operasional .....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	10
A. Penjelasan Umum .....	10
A.1. Profil Kebijakan Teknis .....	10
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	31
A.3. Basis Akuntansi .....	34
A.4. Dasar Pengukuran .....	34
A.5. Kebijakan Akuntansi .....	35
B. Penjelasan atas Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	42
B.1. Pendapatan Negara .....	46
B.2. Belanja Negara .....	55
B.3. Belanja Pegawai .....	57
B.4. Belanja Barang .....	58
B.5. Belanja Bantuan Sosial .....	60
B.6. Belanja Modal .....	61
B.7. Belanja Modal Tanah .....	61
B.8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	62
B.9. Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	63
B.10. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	65
B.11. Belanja Modal Lainnya .....	66
B.12. Belanja Modal BLU .....	66
C. Penjelasan Atas Pos - Pos Neraca .....	69
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran .....	69
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan .....	71
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas .....	71
C.4. Kas Pada BLU .....	79
C.5. Investasi Jangka Pendek – BLU .....	82
C.6. Belanja Dibayar di Muka ( <i>Prepaid</i> ) .....	83
C.7. Uang Muka Belanja ( <i>prepayment</i> ) .....	84
C.8. Pendapatan yang Masih Harus Diterima .....	84
C.9. Piutang Bukan Pajak .....	86

**Hal**

C.10.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	92
C.11.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	92
C.12.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar .....	93
C.13.	Persediaan.....	96
C.14.	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .....	101
C.15.	Tagihan Penjualan Angsuran.....	103
C.16.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang .....	104
C.17.	Tanah.....	104
C.18.	Peralatan dan Mesin .....	109
C.19.	Gedung dan Bangunan .....	130
C.20.	Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	134
C.21.	Aset Tetap Lainnya.....	141
C.22.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	144
C.23.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	155
C.24.	Aset Tak Berwujud.....	155
C.25.	Aset Lain-Lain .....	159
C.26.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya .....	159
C.27.	Utang kepada Pihak Ketiga .....	160
C.28.	Utang Yang Belum Ditagihkan .....	163
C.29.	Hibah yang Belum Disahkan .....	163
C.30.	Uang Muka dari KPPN .....	165
C.31.	Pendapatan Diterima di Muka .....	166
C.32.	Utang Jangka Pendek Lainnya .....	168
C.33.	Ekuitas .....	169
D.	Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Operasional .....	170
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	170
D.2.	Beban Pegawai .....	178
D.3.	Beban Persediaan .....	179
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	180
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	183
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	184
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat .....	185
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	187
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	187
D.10.	Beban Penyisihan Piutang .....	189
D.11.	Beban Lain - Lain .....	189
D.12.	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional .....	190
D.13.	Pos Luar Biasa .....	191
D.14.	Surplus/Defisit - LO .....	191
E.	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	192

E.1.	Ekuitas Awal .....	192
E.2.	Defisit LO .....	192
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar .....	192
	E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset .....	192
	E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan .....	192
	E.3.3. Selisih Atas Reklasifikasi .....	192
	E.3.4. Koreksi Revaluasi Aset Tetap .....	193
	E.3.5. Koreksi Nilai Aset Tetap .....	193
	E.3.6. Koreksi Lain – Lain .....	194
E.4.	Transaksi Antar Entitas .....	194
	E.4.1. Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain .....	195
	E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar .....	195
	E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung .....	196
E.5.	Ekuitas Akhir .....	197
F.	Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya .....	198
	F.1. Kejadian – Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca .....	198
	F.2. Pengungkapan Lain - Lain .....	198
	F.3. Pengungkapan BMN .....	203
	F.4. Permasalahan BMN .....	208
	F.5. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK .....	209
	F.6. Rekapitulasi Permasalahan Hukum .....	216
	F.7. Informasi Proses Likuidasi Satker Inaktif .....	218
	F.8. Pengungkapan Sisa BBM Kapal.....	218
	F.9. KSO PIAMARI .....	218
	F.10. Progress Transfer BMN ke BRIN .....	221
	F.11. Informasi Pendapatan Dan Belanja Akrual .....	223



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [brsdm@kkp.go.id](mailto:brsdm@kkp.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 *Audited* sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Jakarta, 08 Mei 2024  
Kepala BPPSDM,

I Nyoman Radiarta



Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) periode Tahunan T.A 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Tahunan T.A 2023 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) ini disusun dari Laporan Keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah BPPSDMKP dan disusun secara berjenjang.

## **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran Tahunan T.A 2023 ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp32.051.728.502,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan BLU senilai Rp13.864.946.385,00 dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya senilai Rp18.186.782.117,00 atau mencapai 129,6% (persen) dari estimasi Pendapatan LRA senilai Rp24.731.913.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.342.845.268.762,00 atau mencapai 98,42% (persen) dari alokasi anggaran senilai Rp1.365.279.515.000,00.

## **2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL disajikan atas laporan keuangan BLU pada Politeknik KP Sidoarjo dan BPPP Tegal.

Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal) pada tanggal 1 Januari 2023 adalah senilai Rp1.818.976.773,00 ditambah sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) senilai Rp(113.211.523.595,00) dan ditambah dengan penyesuaian transaksi BLU dengan BUN senilai Rp117.585.719.655,00 sehingga saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp6.193.172.833,00.

## **3. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan senilai Rp7.913.769.147.772,00 yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp16.417.191.777,00; Aset Tetap (netto) senilai Rp7.840.323.998.328,00; Properti Investasi senilai Rp46.906.092.898,00; Piutang Jangka Panjang senilai Rp43.969.049,00; dan Aset Lainnya (netto) senilai Rp10.077.895.720,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp13.972.452.096,00 dan Rp7.899.796.695.676,00 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp7.913.769.147.772,00.

## **4. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp29.923.299.103,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah senilai Rp1.454.257.366.044,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.424.334.066.941,00), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp4.418.671.465,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai (Rp1.419.915.395.476,00).



## **5. LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus masuk kas dari aktivitas operasi senilai Rp132.058.448.082,00 dikurangi arus keluar kas senilai (Rp124.208.938.079,00) sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp7.849.510.003,00.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi senilai Rp200.344.000,00 dikurangi arus kas keluar dari aktivitas investasi senilai (Rp3.675.657.943,00) sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah senilai (Rp3.475.313.943,00). Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan senilai Rp0,00 dikurangi arus kas keluar dari aktivitas pendanaan senilai Rp0,00 sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan senilai Rp0,00.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris senilai Rp11.572.600,00 dikurangi arus kas keluar dari aktivitas transitoris senilai Rp(5.786.300,00) sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah senilai Rp5.786.300,00. Sehingga terdapat kenaikan kas senilai Rp4.379.982.360,00 ditambah saldo awal kas pada BLU senilai Rp1.818.976.773,00 sehingga Saldo Akhir Kas Senilai Rp6.198.959.133,00.

Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca yaitu Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) senilai Rp0,00 dan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0,00.

## **6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 senilai Rp7.964.170.647.372,00, dikurangi Defisit-LO senilai (Rp1.419.915.395.476,00) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp5.561.490.650,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp1.349.979.953.130,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp7.899.796.695.676,00.

## **7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahunan Tahun Anggaran 2023 *Audited* menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Negara.

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23		% thd Angg	31-Des-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan BLU	B.1	11.532.009.000	13.864.946.385	120,23	5.411.749.449
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2	13.199.904.000	18.186.782.117	137,78	12.970.714.957
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>24.731.913.000</b>	<b>32.051.728.502</b>	<b>137,78</b>	<b>18.382.464.406</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3	742.912.977.000	734.036.420.418	98,81	776.961.853.654
Belanja Barang	B.4	583.146.966.000	570.985.639.092	97,91	452.461.437.856
Belanja Modal	B.5	39.219.572.000	37.823.209.252	96,44	22.265.019.193
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.365.279.515.000</b>	<b>1.342.845.268.762</b>	<b>98,36</b>	<b>1.251.688.310.703</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Jakarta, 08 Mei 2024  
Kepala BPPSDM,



I Nyoman Radiarta

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NERACA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat.	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,	176.356.699	(176.356.699)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	30.185.300,	1.055.404.198	(1.055.404.198)
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	2.243.172.833,	1.818.976.773	424.196.060
Investasi Jangka Pendek- Badan	C.4	3.950.000.000,	0	3.950.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.5	616.441.667,	401.037.500	215.404.167
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	2.016.583.960,	1.896.388.893	56.041.530
Piutang Bukan Pajak	C.7	4.667.043.695,	980.541.988	25.793.199
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -	C.8	(1.444.661.163,)	(4.892.571)	(144.629)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.9	3.222.382.532,	975.649.417	25.648.570
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.10	19.017.000,	0	2.250.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional	C.11	(95.085,)	0	(11.250)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	C.12	18.921.915,	0	2.238.750
Persediaan	C.13	4.319.503.570,	5.153.952.632	(831.918.922)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>16.417.191.777,</b>	<b>11.477.766.112</b>	<b>2.609.849.258</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	C.14	6.128.393.182.900,	6.128.307.466.100	85.716.800
Peralatan dan Mesin	C.15	1.455.058.616.217,	1.440.095.303.784	14.963.312.433
Gedung dan Bangunan	C.16	1.684.337.201.059,	1.708.358.631.133	(24.230.704.898)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	349.388.079.750,	347.452.105.770	1.962.465.980
Aset Tetap Lainnya	C.18	28.434.958.070,	30.936.424.721	(2.501.466.651)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	1.248.525.149,	1.657.242.754	(408.717.605)
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.20	(1.806.536.564.817,)	(1.710.765.462.204)	(95.853.591.997)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>7.840.323.998.328,</b>	<b>7.946.041.712.058</b>	<b>(105.982.985.938)</b>
<b>Properti Investasi</b>				
Properti Investasi	C.21	51.545.157.028,	0	51.545.157.028
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	(4.639.064.130,)	0	(4.639.064.130)
<b>JUMLAH Properti Investasi</b>		<b>46.906.092.898,</b>	<b>0</b>	<b>46.906.092.898</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Piutang Tagihan Tuntutan	C.23	201.014.544,	156.824.544	44.190.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.24	(157.045.495,)	(156.824.545)	(220.950)
TAGIHAN TUNTUTAN	C.25	43.969.049,	(1)	43.969.050
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>43.969.049,</b>	<b>(1)</b>	<b>43.969.050</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	C.26	18.384.479.902,	19.332.907.160	(948.427.258)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.27	2.745.000,	0	2.745.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.28	1.138.076.326,	0	1.138.076.326
Aset Lain-lain	C.29	46.646.116.165,	42.259.917.182	4.386.198.983
AKUMULASI	C.30	(56.093.521.673,)	(50.718.430.129)	(5.375.091.544)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>10.077.895.720,</b>	<b>10.874.394.213</b>	<b>(796.498.493)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>7.913.769.147.772,,</b>	<b>7.968.393.872.382</b>	<b>(57.219.573.225)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.31	4.747.010.656,	3.768.842.417	1.404.507.069
Hibah Yang Belum Disahkan	C.32	8.820.342.608,	0	8.820.342.608
Pendapatan Diterima Dimuka	C.33	405.098.832,	277.665.894	127.432.938
Uang Muka dari KPPN	C.34	0,	176.356.699	(176.356.699)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.35	0,	360.000	(360.000)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>13.972.452.096,</b>	<b>4.223.225.010</b>	<b>10.175.565.916</b>

<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>13.972.452.096,</b>	<b>4.223.225.010</b>	<b>10.175.565.916</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	C.36	7.899.796.695.676,	7.964.170.647.372	(67.395.139.141)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>7.899.796.695.676,</b>	<b>7.964.170.647.372</b>	<b>(67.395.139.141)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>7.913.769.147.772</b>	<b>7.968.393.872.382</b>	<b>(57.219.573.225)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Jakarta, 08 Mei 2024  
Kepala BPPSDM,



I Nyoman Radiarta

## II. LAPORAN OPERASIONAL


### BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	29.923.299.103,	16.316.563.834,	13.492.968.257,
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>29.923.299.103,</b>	<b>16.316.563.834,</b>	<b>13.492.968.257,</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai	D.3	733.365.596.878,	777.263.529.211,	(43.296.659.186,)
Beban Persediaan	D.4	18.638.491.150,	16.862.932.687,	1.787.305.580,
Beban Barang dan Jasa	D.5	406.347.291.214,	392.494.323.480,	14.812.648.188,
Beban Pemeliharaan	D.6	98.972.343.624,	49.040.544.584,	50.182.747.947,
Beban Perjalanan Dinas	D.7	79.685.500.339,	46.160.762.851,	33.639.532.543,
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	1.253.883.955,	803.596.570,	450.767.385,
Beban Bantuan Sosial	D.9	0,	0,	0,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	114.556.647.252,	128.319.214.762,	(13.758.707.758,)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	1.439.114.710,	18.735.591,	(18.096.089,)
<b>Jumlah Beban</b>		<b>1.454.257.366.044,</b>	<b>1.410.963.639.736,</b>	<b>43.799.538.610,</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(1.424.334.066.941,)</b>	<b>(1.394.647.075.902,)</b>	<b>(30.306.570.353,)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	(581.817.735,)	(1.017.575.083,)	435.757.348,
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	0,	0,	0,
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	5.000.489.200,	5.231.225.207,	25.168.857.856,
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>4.418.671.465,</b>	<b>4.213.650.124,</b>	<b>25.604.615.204,</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(1.419.915.395.476,)</b>	<b>(1.390.433.425.778,)</b>	<b>(4.701.955.149,)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>				
POS LUAR BIASA	D.15	-	-	-
Beban Luar Biasa	D.16	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(1.419.915.395.476,)</b>	<b>(1.390.433.425.778,)</b>	<b>(4.701.955.149,)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Jakarta, 08 Mei 2024  
Kepala BPPSDM,

  
I Nyoman Radiarta



V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (penurunan)
EKUITAS AWAL	E.1	7.964.170.647.372,	8.065.512.831.205,	(101.342.183.833,)
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(1.419.915.395.476,)	(1.390.433.425.778,)	(4.701.955.149,)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,	0,	0,
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	5.561.490.650,	6.540.601.846,	(28.797.044.440,)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0,	0,	0,
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	133.114.700,	(75.376.722,)	208.491.422,
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	(84.398.430,)	(43.045.796,)	(41.352.634,)
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	0,	0,	0,
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	3.682.230.780,	6.787.930.254,	(29.093.399.391,)
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	1.830.543.600,	(128.905.890,)	129.216.163,
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1.349.979.953.130,	1.282.550.640.099,	67.446.044.281,
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(64.373.951.696,)	(101.342.183.833,)	33.947.044.692,
EKUITAS AKHIR	E.6	7.899.796.695.676,	7.964.170.647.372,	(67.395.139.141,)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 08 Mei 2024  
Kepala BPPSDM,

  
I Nyoman Radiarta

**V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****A. PENJELASAN UMUM****A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

**a. Rencana Strategis**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019-2024 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita melalui kebijakan pokok yang diarahkan:

- 1) Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 16 Juni 2023 BRSDMKP mengganti nama menjadi BPPSDMKP dengan tugas dan fungsi berfokus pada penyuluhan dan pengembangan

SDM dan menghilangkan fungsi riset yang telah dialihkan ke BRIN. Sehingga saat ini pada Tahunan di masa peralihan tusi, rencana strategis dan susunan organisasi masih dalam penyusunan dan masih menggunakan renstra dan susunan yang lama hingga terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur hal tersebut.

Awalnya, pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020. Menindaklanjuti Renstra KKP tersebut, BPPSDMKP telah menetapkan Rencana Strategis BPPSDMKP Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Kepala BPPSDMKP Nomor 180/PER-BPPSDMKP/2021 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024. Kemudian untukantisipasi perubahan kelembagaan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tindak lanjut implementasi amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang memuat peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi riset ke dalam BRIN sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan.

Perubahan kelembagaan ini memerlukan reformulasi arah kebijakan dan sasaran strategis yang berfokus pada memperkuat SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan pada Renstra BPPSDMKP Tahun 2020-2024 perlu disesuaikan dengan adanya perubahan arah kebijakan BPPSDMKP 2023 dalam mendukung kebijakan pembangunan KP dan arah kebijakan KKP melalui penyediaan SDM Kompeten dan mewujudkan pelaku utama mandiri, kompeten, sadar/peduli

terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya KP. Arah kebijakan KKP saat ini yang merupakan penerapan dari konsep *blue economy* yang ditempuh melalui: 1) penambahan luas kawasan konservasi laut; 2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; 3) pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan; 4) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan 5) pengelolaan sampah plastik di laut; akan didukung melalui strategi sinergi kegiatan BPPSDMKP dalam bentuk *Vocational Goes to Actor* (VOGA), pelatihan, dan sertifikasi kelautan dan perikanan.

VOGA sebagai salah satu program prioritas BPPSDMKP yang mengkolaborasikan tiga fungsi BPPSDMKP, yaitu pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk mendukung transformasi pendidikan vokasi KKP yang berbasis kompetensi dengan penerapan kepada masyarakat KP dilakukan langsung di lokasi pengembangan program prioritas KKP. Implementasi VOGA dituangkan dalam kegiatan: 1) *smart fisheries village* (SFV) Desa dan SFV UPT; 2) Program Kelas Lapang pada Satuan Pendidikan BPPSDMKP; 3) pelatihan vokasi dan penyuluhan melalui Balai Pelatihan di Kampung Perikanan Budidaya (KPB) dan Kampung Nelayan Maju (Kalaju); dan 4) pengembangan perluasan kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI).

Selaras dengan kebijakan KKP, BPPSDMKP melakukan transformasi pendidikan kelautan dan perikanan menuju *Ocean Institute of Indonesia* (OII) melalui rencana aksi: 1) Penerimaan peserta didik baru tahun 2023 berasal dari 100% anak pelaku utama; 2) Transformasi Layanan pendidikan vokasi; 3) Program Merdeka belajar Kampus Merdeka; 4) Penguatan kerja sama pendidikan vokasi; 5) Penguatan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; 6) Menyusun standar sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangannya; 7) Menyediakan data lulusan melalui verifikasi dan validasi; 8) Penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan 9) Penguatan SDM Pendidikan Vokasi.

## **b. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPSDM berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

BPPSDM mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dengan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi BPPSDM; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPPSDMKP didukung oleh unit kerja eselon II sebagai berikut:

#### a) Sekretariat Badan

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDM dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan

perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

- 4) Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan. Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **b) Pusat Riset Kelautan**

Pusat Riset Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- 2) Penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Susunan organisasi Pusat Riset Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **c) Pusat Riset Perikanan**

Pusat Riset Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan. Pusat Riset Perikanan menyelenggarakan fungsi:



- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
- 3) Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset perikanan; dan
- 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Pusat Riset Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **d) Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan**

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan kelautan dan perikanan; dan;
- 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

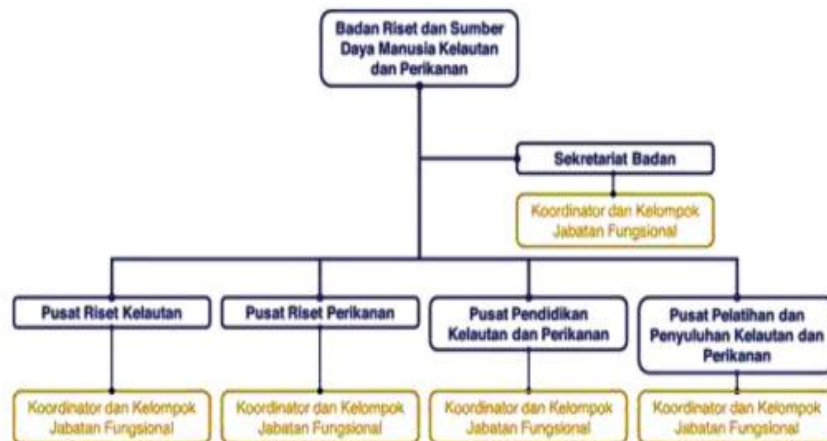
**e) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3) Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

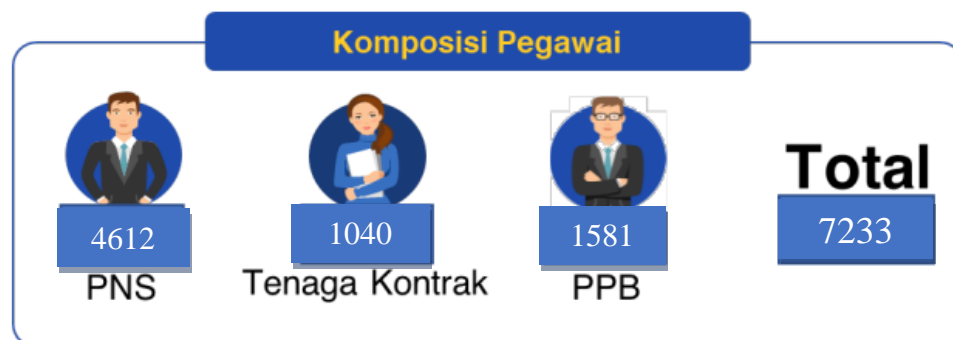
Struktur organisasi BPPSDM sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPSDMKP

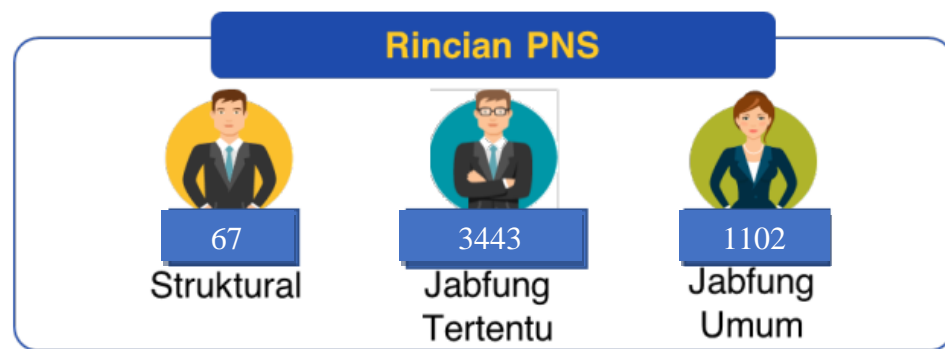
**c. Keragaan SDM BPPSDM**

BPPSDMKP memiliki 41 satuan kerja dengan didukung oleh 7.233 pegawai yang terdiri dari 4.612 PNS, 1.581 Penyuluh Perikanan Bantu/PPB dan 1.040 Tenaga Kontrak. Komposisi dari pegawai PNS yang berada di Pusat dan Daerah, sebagai berikut:



Gambar 2. Komposisi SDM BPPSDM

Dari 4.734 PNS, 67 orang merupakan pejabat struktural, 3.443 merupakan pejabat fungsional tertentu dan 1.102 merupakan pejabat fungsional umum.



Gambar 3. Rincian PNS BPPSDM

Gambar 4. Pegawai Fungsional BPPSDM 2023

No	Jabatan Fungsional	Jumlah orang
1	Pustakawan	24
2	Pranata komputer	16
3	Teknisi litkayasa	38
4	Arsiparis	32
5	Penyuluh perikanan	2325
6	Widyaiswara	34
7	Guru	96
8	Dosen	446
9	Analisis kepegawaian	34
10	Perencana	57
11	Instruktur	135
12	Pranata humas	14
13	Dokter gigi	1
14	Dokter umum	3
15	Penerjemah	1
16	Paranata laboratorium pendidikan	19
17	Pengelola pengadaan barang dan jasa	11
18	Perawat	2
19	Perawat gigi	1
20	Analisis kebijakan	36
21	Statistisi	6
22	Analisis Hukum	3
23	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	58
24	Pranata Keuangan APBN	66
25	Penata Laksana Barang	1
26	Pengembang Teknologi Pembelajaran	11
	<b>Jumlah</b>	<b>3.443</b>

Sementara itu, pegawai BPPSDM yang memasuki usia pensiun Tahun 2023-2025 sebanyak 592 orang (11%). Hal tersebut membutuhkan perhatian dan

pertimbangan dalam merancang pola penerimaan dan pengembangan kompetensi SDM mendukung pelaksanaan Renstra BPPSDM.

Fungsional bidang SDM didukung oleh tenaga dosen, guru, widyaiswara, instruktur serta penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan mencapai 67% dari total fungsional di BPPSDMKP, namun jumlah tersebut belum sebanding dengan luasnya wilayah, jumlah kelompok dan jumlah pelaku utama yang harus didampingi. Ketersediaan tenaga pendidik dan pelatih, juga belum memenuhi kebutuhan pendidik maupun pelatih pada institusi pendidikan perikanan serta pelatihan.

#### **d. VISI BPPSDM**

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Visi BPPSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

#### **e. MISI BPPSDM**

Misi BPPSDM adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

### 3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDMKP KP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
- 4) Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
- 5) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.



#### 4. Sasaran Program

Renstra BPPSDM Tahun 2019-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPSDMKP sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Logical Framework*. Sasaran Strategis yang akan dicapai di level 0 KKP adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja “Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya”, setiap tahun sebanyak 1.800 kelompok selama tahun 2020-2024.

Sasaran strstegis kedua (SS-2) yang akan dicapai dilevel 0 KKP adalah” Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat” dengan Indikator Kinerja:

- 1) Nilai PNBK Sektor KP, dengan target setiap tahun sebanyak 1,87 Triliun selama 2020-2024.
- 2) Tenaga Kerja yang terlibat di sektor KP, dengan target setiap tahun sebanyak 688.422 orang selama 2020-2024.

Sasaran Strategis ke empat (SS-4) yang akan dicapai dilevel 0 KKP adalah ”Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat” dengan Indikator Kinerja Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri ,dengan target setiap tahun 65% selama 2020-2024. Untuk melaksanakan pencapaian SS sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPPSDMKP melalui Sasaran Strategis ke Sembilan (SS-9) “Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas” dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks Profesionalisme ASN BPPSDM dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024.
- 2) Persentase unit kerja BPPSDM yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
- 3) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BPPSDMKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024.
- 4) Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP, dari A pada tahun 2020 menjadi AA

- pada tahun 2024.
- 5) Level Maturitas SPIP BPPSDMKP, 3 pada tahun 2020 sampai 2024.
  - 6) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik (90) pada tahun 2024.
  - 7) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPSDMKP dibandingkan realisasi anggaran sebesar <1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
  - 8) Jumlah unit kerja BPPSDMKP berpredikat menuju WBK (satker, kumulatif) pada tahun 2020 sebanyak 10 satker, sampai dengan 2024 sebanyak 13 satker lingkup BPPSDMKP.
  - 9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDMKP, sebesar 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
  - 10) Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP dengan target sebesar 85 pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024.

## 5. Potensi dan Permasalahan

### Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, riset berperan menjadi pendorong penerapan teknologi, dengan keberadaan 5 unit eselon II yaitu 2 (dua) Pusat Riset (Riset Kelautan dan Riset Perikanan) dan 3 (tiga) Balai Besar, 8 (delapan) Balai dan 5 (lima) Loka, namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN. Peran BPPSDMKP di bidang pendidikan didukung keberadaan 20 satuan pendidikan, yang terdiri atas 1 (satu) Sekolah Tinggi, 9 (sembilan) Politeknik KP, 9 (Sembilan) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan tenaga pendidik berjumlah 502 orang terdiri atas 95 guru dan 433 dosen, dalam

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan teaching factory dengan 70% praktek dan 30% teori.

Satuan pendidikan KP menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 44% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 55% pada tahun 2024. Peran BPPSDMKP di bidang pelatihan didukung dengan keberadaan 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 413 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 63 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia, disamping itu didukung dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 34 widyaiswara dan 122 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan, yang dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan menggunakan standar SKKNI, KKNi dan SKK. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara, meliputi pelatihan struktural (dalam jabatan dan prajabatan), pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparatur daerah dalam rangka mendukung program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2023 terdapat 3.381 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 1.587 orang Penyuluh Perikanan bantu, 2.294 orang penyuluh PNS, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari amanah ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh

Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat.

### Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BPPSDMKP akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi.
- 2) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang riset dan SDM sebagai instrumen penjaminan mutu riset dan pengembangan SDM;
- 3) Kerangka regulasi terkait kerangka kualifikasi nasional Indonesia belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan aparatur di bidang KP;
- 4) Jumlah, sebaran dan kompetensi tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) serta penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang;
- 5) Penyediaan kurikulum/modul pelatihan dan penyuluhan belum sepenuhnya terstandarisasi yang berbasis digital yang mudah diakses baik nasional maupun International;
- 6) Usaha yang dikembangkan skala kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan serta masih menggunakan teknologi terapan konvensional;
- 7) Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- 8) Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif.

## 6. Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Program Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>327.300.950</b>
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	198.834.940
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	128.466.010
2	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	<b>5.373.250</b>
	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	2.800.000
	Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	2.323.250
	Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan	250.000
3	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>1.050.962.966</b>
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMKP	1.039.462.966
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	11.500.000
	<b>Total Anggaran BRSDM Tahun 2023</b>	<b>1.383.637.166</b>

## 7. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDMKP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran program BPPSDMKP.

Pada tahun 2023 Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP, memiliki 7 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama serta 14 Indikator Kinerja Manajerial. Rincian dan target PK pada tahun 2023, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Rincian dan Target Perjanjian Kinerja

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	SDM KP Peserta Diklat yang Tersempai di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Tersempai di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Nilai PNBPR BRSDM (Rupiah Miliar)	24,731
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintis)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk	4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	12.342
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	7
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	14
6	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan	9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	11
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	33,5



SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		11 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	15
		12 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	≤0,5
		13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75
		18 Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)	75
		19 Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89
		20 Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86
		21 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	77,5
		22 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	77,5
		23 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.005

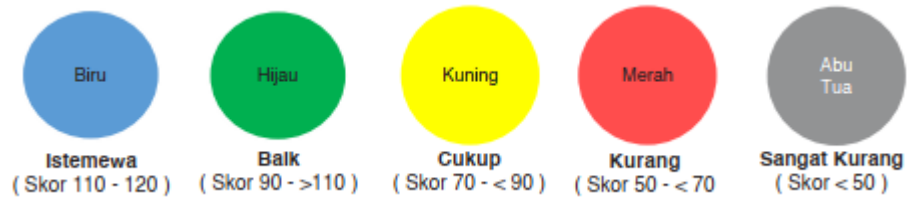
## 8. Pengukuran Kinerja

### 1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

**2. Metode Pengukuran Kinerja**

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPSDMKP dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan triwulanan tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 pusat dan sekretariat.

**f. Sistem Informasi yang dipergunakan**

Sistem Informasi yang dipergunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut



Gambar 2 Sistem Informasi Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Aplikasi RKA-KL, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus

dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah. aplikasi RKAKL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Diharapkan dengan perubahan ini informasi yang melekat pada RKAKL lebih mempunyai bobot dan dari sisi teknis aplikasi memudahkan para operator dalam menuangkan data-data RKAKL ke dalam aplikasi. Aplikasi ini kemudian dikembangkan dengan Pembuatan RKAKL *Online* mulai tahun 2016. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

- 2) Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 3) Aplikasi SPSE, aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;
- 4) Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaa sampai dengan pelaporan;

- 5) SPAN, sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 6) Simponi, aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN dan penerimaan nonanggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBPN dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 7) SIMAN, aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

g. Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh BPPSDMKP

No	Nama Aplikasi	Penjelasan Fungsi/ Manfaat dari Aplikasi	Pemilik Aplikasi
1	Wakatobi AIS	Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis AIS, untuk menunjang keselamatan nelayan kecil dan tradisional.	LPTK Wakatobi
2	Magot Inovation Centre (MIC)	Berisi hasil kajian, inovasi dan edukasi terkait magot secara intensif dan terintegrasi dengan dengan pihak industri, pemda, akademisi dan semua <i>stakeholder</i> terkait.	BRBIH Depok
3	e-Milea	Platform digital pelatihan ASN KKP yang berisi tentang Sistem pembelajaran online Kementerian Kelautan dan Perikanan, wadah pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam ranah kediklatan non klasikal.	BPPA Sukamandi

4	e-Jaring	Pembelajaran Daring Perikanan merupakan media pembelajaran online yang menyediakan berbagai macam diklat bagi pengembangan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan.	BPPA Sukamandi
8	SPECTRA ( <i>Special Area for Conservation and Fish Refugia</i> )	Solusi pemanfaatan lahan rawa untuk Perikanan berbasis Teknologi dan Inovasi	BRPPUPP Palembang
9	Bank Genetik Ikan Indonesia (BGI Indonesia)	Inovasi pengelolaan sumber daya genetik ikan melalui penerapan sistem informasi dan aktifitas riset serta pengembangan untuk optimalisasi pelestarian dan pemanfaatannya.	BRPI Sukamandi
10	e-Penyuluh	Aplikasi Web dan Mobile bagi Penyuluh Perikanan dan Instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan bagi Pelaku Utama KP.	Puslatluh KP
11	<i>Marine and Fisheries Cyber Extension</i>	Sistem Informasi Penyebarluasan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Puslatluh KP

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada Tahun 2023, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP).

Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016. Dengan penerapan SAKTI *full module* maka proses bisnis rekonsiliasi mulai Tahun 2022 perlu disesuaikan, yaitu Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat website <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah 41 entitas, dimana pada Tahun ini terdapat 2 Satuan Kerja Inaktif karena penggabungan Anggaran menjadi 1 DIPA.

Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker BPPSDMKP KP*

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	
			KP	KD
1	403821	PUSAT RISET PERIKANAN	V	
2	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	V	
3	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)		V
4	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN		V
5	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN		V
6	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN		V
7	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON		V
8	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI		V
9	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG		V
10	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN		V
11	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL		V
12	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI		V
13	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS		V
14	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN		V

15	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN		V
16	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN		V
17	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN		V
18	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT		V
19	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN		V
20	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN		V
21	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT		V
22	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		V
23	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA		V
24	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR		V
25	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG		V
26	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE		V
27	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)		V
28	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)		V
29	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG		V
30	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG		V
31	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)		V
32	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO		V
33	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG		V
34	427511	POLITEKNIK AUP JAKARTA		V
35	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG		V
36	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG		V
37	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN		V
38	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK		V
39	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG		V
40	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL		V
41	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU		V

**Daftar Satuan Kerja Inaktif Tahun 2023**

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	
			KP	KD
1	245124	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) NEGERI KUPANG		V
2	427602	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH BONE		V

Satker inaktif diatas dimulai pada periode Laporan Keuangan Tahunan T.A 2023 dimana terdapat penggabungan DIPA dan statusnya berubah menjadi anak Satker. Pada pelaporan Tahunan T.A 2023 ini satker tersebut tetap membuat Laporan Keuangan yang data transaksinya sudah sebagian dipindah ke satker induk.

Berikut rincian penggabungan satkernya:

1. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Kupang bergabung dengan Poltek KP Kupang menjadi satu DIPA;
2. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone bergabung dengan Poltek KP Bone menjadi satu DIPA;

*Basis  
Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan



dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelola keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset Lancar*

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

## a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

- b. Aset Tetap
  - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
  - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
    - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
    - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
    - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### Aset Lainnya

##### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### *Kewajiban*

##### (7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### *Ekuitas*

##### (8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 PENGUNGKAPAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dampak Pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Dampak pandemi terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal, pemerintah pada menerbitkan PP Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk menetapkan berbagai kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Berbagai kebijakan tersebut antara lain peningkatan belanja fasilitas dan pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha. Selanjutnya, berbagai Kementerian Negara/Lembaga menindaklanjutinya dengan memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut tentunya akan berdampak terhadap laporan keuangan pemerintah.

Merespon hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengambil strategi dan kebijakan sebagai langkah antisipasi dan upaya mengurangi dampak pandemi yaitu menginstruksikan kepada semua UPT Lingkup BPPSDMKP untuk melakukan kegiatan sterilisasi secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada berbagai sarana dan prasarana di lingkungan kantor, menghimbau adanya gerakan sadar cuci tangan bagi seluruh pegawai, *physical distancing* dan penggunaan wajib masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan virus pada orang lain. Selain itu, pengalokasian anggaran beberapa kegiatan juga dialihkan untuk keperluan penanganan COVID-19. Hal ini tentu berpengaruh terhadap Kebijakan Akuntansi terkait pengungkapan dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan BPPSDMKP. Pengungkapan terhadap transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan



COVID-19 wajib diungkap dan dijelaskan secara memadai dalam CaLK untuk memberikan informasi yang lebih detail bagi pengguna Laporan Keuangan.

Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestic sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk penyelamatan Kesehatan dan perekonomian nasional dan mitigasi bersama oleh pemerintah untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel B.1**  
**Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 per Akun**

No	Akun	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1	521131	Belanja Barang Operasional - penanganan Pandemi COVID-19	479.898.000,	462.897.896,	96,46
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	228.050.000,	222.608.522,	97,90
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.800.000,	2.800.000,	100
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.455.000,	2.444.003,	99,55
<b>Total</b>			<b>713.203.000,</b>	<b>690.750.421,</b>	<b>96,94</b>

Anggaran Penanganan Covid-19 tidak mengalami koreksi pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 *Audited*, dari anggaran tersebut diketahui terdapat realisasi belanja dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) (s.d 31 Desember 2023) dengan rincian Realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 senilai Rp690.750.421,00 atau 96,94% dari pagu senilai Rp713.203.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (akun 521131) terealisasi senilai Rp462.897.896,00 atau sebesar 96,46% dari pagu senilai Rp479.898.000,00 digunakan untuk biaya komunikasi dalam bentuk pulsa

telepon atau paket data internet, pengadaan masker/*hand sanitizer*, biaya penyemprotan desinfektan di area kantor, pengadaan *Thermogun/ Thermometer Infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, pengadaan lisensi aplikasi *video conference*, pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh;

- b. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi (akun 521241) telah terealisasi senilai Rp222.608.522,00 atau sebesar 97,61% dari pagu senilai Rp228.050.000,00 untuk Biaya Paket Data Proses Pembelajaran Online Peserta Didik, Biaya Konsumsi ASN *Work From Office*, Biaya Konsumsi Rapat/uang saku rapat, pengadaan APD/Alat uji medis, Biaya Banner dan spanduk dalam rangka penanganan Covid-19;
- c. Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (akun 521841) telah terealisasi senilai Rp2.800.000,00 atau sebesar 100% dari pagu senilai Rp2.800.000,00 untuk belanja masker, sarung tangan, hand sanitizer, APD, penambah daya tahan tubuh, penyemprot disinfektan, *Thermogun/ Thermometer Infrared* dan Alat Semprot; dan
- d. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (akun 522192) telah terealisasi senilai Rp2.444.003,00 atau sebesar 99,55% dari pagu senilai Rp2.455.000,00 untuk Pembiayaan *Rapid Test, Swab Test* pegawai dan pembayaran biaya penyemprotan desinfektan di area kantor.

## B.2. REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PC-PEN

Pelaksanaan PC-PEN sub cluster Ketahanan Pangan menggunakan akun regular (bukan akun khusus Covid-19) dengan Rincian Output (RO) tagging PEN senilai Rp0,00 atau 0,00% dari pagu pasca *recofussing* senilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel B.2**  
**Realisasi Belanja PC-PEN lingkup BPPSDMKP per 31 Desember 2023**

No	RO	ALOKASI ANGGARAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)			REALISASI	
		KETAHANAN PANGAN			ANGGARAN	%
		TARGET	SATUAN	ANGGARAN		
1	QDD 001 Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP (PEN)	0	Klp Masy	0	0	0,0 0
2	SCC 001 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (PEN)	0	orang	0	0	0,0 0
				0	0	0, 00

Sumber data: Data Monev Kinerja BPPSDMKPKP, 31 Desember 2023

Penjelasan tabel:

- 1) Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP (PEN) yang akan di alokasikan pada Tahunan T.A 2023; dan
- 2) Kegiatan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (PEN) yang akan di alokasikan pada Tahun Anggaran 2023.

### B.3 POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (tanggal 30 November 2022) pasal 4 ayat (2) dan Lampiran III Bagian Anggaran 032 halaman 157-163, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP KP) mendapatkan alokasi Pagu APBN sebesar Rp1.383.637.166.000 untuk membiayai program dan kegiatan pada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja Eselon I lingkup BPPSDMKP dengan sumber dana anggaran sebagai berikut:

**Tabel B.3**  
**Rincian Pagu Anggaran Menurut Program**  
**Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31-Dec-23			REALISASI
	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
	AWAL	REVISI DIPA I	REVISI DIPA II	
<b>Pendapatan</b>				
BLU	11.532.009.000	11.532.009.000	-	13.864.946.385
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	13.199.904.000	13.199.904.000	-	18.186.782.117
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>24.731.913.000</b>	<b>24.731.913.000</b>	<b>-</b>	<b>32.051.728.502</b>
<b>Belanja</b>				
Belanja Pegawai	770.600.000.000	770.600.000.000	742.912.977.000	734.036.420.418
Belanja Barang	553.844.975.000	555.690.043.000	583.146.966.000	570.985.639.092
Belanja Modal	59.192.191.000	63.989.472.000	39.219.572.000	37.823.209.252
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.383.637.166.000</b>	<b>1.390.279.515.000</b>	<b>1.365.279.515.000</b>	<b>1.342.845.268.762</b>

Terdapat Revisi DIPA II mengubah pagu anggaran Belanja senilai Rp1.365.279.515.000,00. Adapun realisasi anggaran lingkup BPPSDMKP per 31 Desember 2023 senilai Rp1.342.845.268.762,00 atau 98,42% dari pagu revisi, dengan realisasi belanja, yaitu:

- a. Belanja Pegawai (51) senilai Rp734.036.420.418,00 atau 99,00% dari pagu senilai Rp742.912.977.000,00;
- b. Belanja Barang (52) senilai Rp570.985.639.092,00 atau 97,99% dari pagu anggaran senilai Rp583.146.966.000,00;

- c. Belanja modal (53) senilai Rp37.823.209.252,00 atau 96,44% dari pagu anggaran senilai Rp39.219.572.000,00.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Realisasi  
Pendapatan  
Rp32.051.728.502,

## B.1 PENDAPATAN

Kebijakan Pendapatan Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan kepada pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Adapun upaya optimalisasi yang dilakukan oleh BPPSDMKP adalah:

1. Peningkatan kegiatan penjualan hasil perikanan terutama benih unggul hasil litbang KP yang telah dirilis, penjualan perbanyak vaksin/*test kit* yang sudah mendapatkan paten, jasa analisis laboratorium, pelayanan jasa riset dengan memanfaatkan SDM dan sarpras litbang yang tersedia;
2. Peningkatan pemanfaatan lahan/tambak/kolam ikan melalui kerjasama dengan petani/pihak ketiga serta peningkatan sarana alih teknologi dari peneliti kepada *stakeholder*;
3. Membuka peluang pendidikan kelautan dan perikanan secara luas bagi keluarga para nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan serta aparatur kelautan dan perikanan;
4. Melaksanakan pelatihan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri dan tuntutan profesionalisme; dan
5. Penyesuaian tarif melalui revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan penghasil PNBPN baik pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan antara lain:

1. Pendapatan Layanan Pendidikan berupa uang/seleksi masuk pendaftaran pendidikan, biaya pendidikan dan biaya ujian akhir dari peserta didik/siswa/mahasiswa di Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Politeknik, Akademi dan Sekolah Tinggi Perikanan;
2. Pendapatan Layanan Pelatihan berasal dari kegiatan pendidikan bidang kelautan dan perikanan antara lain penangkapan ikan, budidaya, pengolahan hasil perikanan, pengawas perikanan, pengendalian hama penyakit ikan, kelautan dan lingkungan perairan, dan pelaksanaan ujian profesi bidang kelautan dan perikanan;
3. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
4. Pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya berupa hasil samping penjualan hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kelautan dan perikanan.

**Tabel B.4**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Akun	Uraian	31 Desember 2023		
			Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.691.435.000	6.654.216.664	99,44
2	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga,	12.000.000	142.074.007	1.183,95
3	424118	Pendapatan Penyediaan Barang	2.835.680.000	3.772.235.400	133,03
4	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	512.400.000	593.929.009	115,91
5	424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	38.310.000	100,00
6	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	1.512.940.434	100,00
7	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	28.541.000	97.932.021	343,13
8	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	564.108.000	84.126.998	14,91
9	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	28.000.000	36.178.750	129,21
10	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	790.096.000	762.800.548	96,55
11	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	61.749.000	102.892.554	166,63
12	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	8.000.000	34.310.000	428,88
13	424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	-	33.000.000	100,00
14	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	5.760.612.000	5.642.151.987	97,94
15	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	309.425.000	629.181.210	203,34
16	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	859.534.706	100,00
17	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	255.017.654	100,00
18	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	448.314.000	1.381.709.730	308,20
19	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.337.119.000	2.658.701.466	198,84
20	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	720.834.000	138.964.000	19,28
21	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	415.580.000	314.705.000	75,73
22	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	1.175.600.000	1.434.202.500	122,00
23	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.002.370.000	3.423.215.000	114,02
24	425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	50.000	-	-
25	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	-	275.625	100,00
26	425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan	-	7.645.775	100,00
27	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	30.000.000	-	-
28	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	56.500.000	100,00
29	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	77.523.292	100,00
30	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	260.956.523	100,00
31	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	761.154.904	100,00
32	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	122.728.662	100,00
33	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	162.614.083	100,00
		<b>Jumlah</b>	<b>24.731.913.000</b>	<b>32.051.728.502</b>	<b>129,60</b>

Realisasi Pendapatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan senilai Rp6.654.216.664,00 merupakan Pendapatan dari Diklat BST, BST KLM, BSTF, Rating, Peningkatan ke AT/ANKAPIN

- I, Upgrading SKK ke AN/ATKAPIN III, Ujian Upgrading SKK AN/ATKAPIN III, Revalidasi BST, Revalidasi BST KLM, Uji Kompetensi, Pelatihan Las Listrik, Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan. Terjadi peningkatan karena adanya pembukaan kelas pelatihan baru seperti Rating dan peningkatan AN/ATKAPIN I pada BPPP Tegal senilai Rp5.551.118.923,00 dan Politeknik KP Sidoarjo merupakan pendapatan pendaftaran taruna baru, seleksi penerimaan taruna baru (seleksi kesehatan, psikotes, dan wawancara) senilai Rp1.103.097.741,00. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan PMK 198/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Estimasi pendapatan senilai Rp6.691.435.000,00;
2. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan senilai Rp142.074.007,00 merupakan pendapatan Jasa Pelatih di Luar Unit Penyelenggara pada BPPP Tegal senilai Rp124.519.507,00 dan pada Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp17.554.500,00 merupakan pendapatan Imbal jasa atas jasa SDM Politeknik KP Sidoarjo, seperti jasa Narasumber. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo dari estimasi pendapatan senilai Rp12.000.000,00;
  3. Pendapatan Penyediaan Barang senilai Rp3.772.235.400,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp2.835.680.000,00, berasal dari:
    - a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp2.831.424.900,00 merupakan pendapatan permakanan yang dibayar oleh taruna jalur umum dan pendapatan dari penjualan hasil produk TEFA Pengolahan (Batari, otak-otak, siomay, nugget, dll), TEFA Budidaya Air Payau (Udang vannamei, bandeng), TEFA Budidaya Air Tawar (Ikan Nila), TEFA Budidaya Air Laut (Udang vannamei), TEFA Wirausaha (Ikan Gurame, patin, bawal). Dasar pemungutan pendapatan Permakanan taruna berdasarkan PMK 198/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Sedangkan dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo. Pendapatan akun ini pada TA 2023 meningkat karena pada TA 2023 terdapat peningkatan jumlah taruna jalur mandiri, pada TA 2022 hanya 12 taruna sedangkan pada TA 2023 sebanyak 144 taruna; dan
    - b. BPPP Tegal senilai Rp942.710.500,00 merupakan Pendapatan Jasa Catering, Penjualan Produk Pengolahan dan Budidaya.

6. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya senilai Rp593.929.009,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp512.400.000,00, yang berasal dari:
  - a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp590.829.009,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari TEFA Mekanisasi (Perbengkelan mobil, sepeda motor, cuci AC dan digital printing) dan TEFA Wirausaha berasal dari Kunjungan edukatif. Sedangkan dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan
  - b. BPPP Tegal senilai Rp3.100.000,00 merupakan Pendapatan dari perbaikan dan Cetak Ulang Sertifikat Pelatihan.
7. Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah senilai Rp38.310.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan Pendapatan yang berasal dari Karcis Masuk Pulau Cemara pada satker BLU BPPP Tegal;
8. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha senilai Rp1.512.940.434,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan dengan DJPT dan PSDKP, IFISH, Kompensasi Tetap Aquarium Indonesia Pangandaran pada satker BLU BPPP Tegal;
9. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU senilai Rp97.932.021,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp28.541.000,00 yang berasal dari:
  - a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp40.144.312,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari bunga bank atas rekening operasional penerimaan, operasional pengeluaran, dan deposito. Pada tahun ini terdapat peningkatan pendapatan karena mulai tahun ini ada rekening deposito, dan peningkatan saldo di rekening operasional penerimaan, sehingga bunga yang didapatkan juga meningkat. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan
  - b. BPPP Tegal senilai Rp57.787.709,00 merupakan Pendapatan Bunga rekening dan Deposito.
10. Pendapatan Lain-lain BLU senilai Rp84.126.998,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp564.108.000,00, yang berasal dari:
  - a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp5.186.998,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari TEFA Wirausaha yang berupa kegiatan wisata edukatif seperti penyewaan stand, penyewaan pancing, tikar, dan biaya parkir



- kendaraan roda 2 dan roda 4. Pendapatan tersebut mengalami peningkatan di tahun ini karena pada tahun sebelumnya tidak ada pendapatan tersebut. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan
- b. BPPP Tegal senilai Rp78.940.000,00 merupakan Pendapatan dari pembuatan surat keterangan sehat peserta pelatihan.
11. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari sewa dapur, sewa laboratorium dan sewa ruang pertemuan. Sewa dapur ini merupakan penyedia bahan makan taruna yang menyewa dapur untuk memasak makanan untuk taruna. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp36.178.750,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp28.000.000,00;
12. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan senilai Rp762.800.548,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp Rp790.096.000,00, yang berasal dari:
- a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp151.718.000,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari sewa asrama taruna jalur umum. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan PMK 198/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Pendapatan akun ini pada TA 2023 meningkat karena pada TA 2023 terdapat peningkatan jumlah taruna jalur mandiri, pada TA 2022 hanya 12 taruna sedangkan pada TA 2023 sebanyak 144 taruna; dan
  - b. BPPP Tegal senilai Rp611.082.548,00 merupakan Pendapatan dari sewa Auditorium, sewa ruang kelas dan Workshop, Sewa Kamar Asrama/Bahari Residence, Sewa kamar *dormitory*/Hotel Aquarium Indonesia di Pangandaran. Terjadi Peningkatan Pendapatan dikarenakan pada tahun 2023 BPPP Tegal mulai mengelola secara komersil sewa kamar Bahari *Residence* dan Hotel Aquarium Indonesia, dan beberapa sewa lainnya seperti Sewa Aula, sewa kelas pada tahun sebelumnya (2022) menggunakan akun Sewa Gedung (424922).
13. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin senilai Rp102.892.554,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp61.749.000,00, yang berasal dari:
- a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp15.177.100,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari pendapatan sewa coldstorage. Pendapatan ini meningkat

- karena adanya peningkatan tonase yang menggunakan mesin coldstorage. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan
- b. BPPP Tegal senilai Rp87.715.454,00 merupakan Pendapatan dari Sewa *Cold Storage*, Sewa Kursi untuk Aula dan sewa *extra bed*.
14. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya senilai Rp34.310.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan perjalanan dalam rangka pengurusan sertifikat, perjalanan dalam rangka menjadi narasumber, perjalanan penyelenggaraan pelatihan pada BPPP Tegal;
15. Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU senilai Rp33.000.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan Pendapatan dari Penjualan Mesin Alat Pakan Ikan pada BPPP Tegal;
16. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp5.642.151.987,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan hasil samping Budidaya Udang, Kegiatan Pelatihan dan penjualan dari hasil samping praktek TEFA yang terdapat pada 26 Satker dari estimasi pendapatan senilai Rp5.760.612.000,00;
17. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya senilai Rp629.181.210,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan hasil samping praktek TEFA yang terdapat pada 24 Satker dari estimasi pendapatan senilai Rp309.425.000,00;
18. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp859.534.706,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00, merupakan Hasil bersih lelang atau penghapusan BMN pada 27 Satker;
19. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp255.017.654,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00, yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari 8 Satker berupa hasil lelang peralatan dan mesin;
20. Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp1.381.709.730,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp448.314.000,00 yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari Sewa Rumah dinas yang dipotong langsung dari SPM gaji Induk Januari s/d Desember 2023, sewa pemanfaatan tanah peruntukan bangunan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan sewa lahan dari 33 Satker lingkup BPPSDMKP;
21. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi senilai

- Rp2.658.701.466,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp1.337.119.000,00, yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Sewa Alat Selam, Sewa tambak Busmetik, Sewa Asrama, Sewa Ruang Rapat dan Kelas di 23 Satker lingkup BPPSDMKP;
22. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya senilai Rp138.964.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp720.834.000,00 yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari Hasil Laboratorium Pelayanan Pemeriksaan Hama/Kesehatan/Penyakit Ikan/Analisis/Identifikasi/Pemeriksaan Parasit Bakteri Jamur Virus Enzim Hormon dan Protein dengan Metode Biologi (Pengkayaan) serta *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Konvensional *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dengan *Single Step* pada 7 Satker lingkup BPPSDMKP;
  23. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan senilai Rp314.705.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp415.580.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pendaftaran/seleksi masuk pendidikan sekolah dan politeknik di 11 Satker lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
  24. Pendapatan Biaya Pendidikan senilai Rp1.434.202.500,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp1.175.600.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Biaya SPP Politeknik di 11 Satker lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
  25. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan senilai Rp3.423.215.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp3.002.370.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pelatihan BST, BST-F, Revalidasi BST dan Upgrading SKK 60 Mil ke Ankapin/Atkapin III, di 9 Satker lingkup BPPSDMKPKP
  26. Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek senilai Rp0,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp50.000,00;
  27. Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual senilai Rp275.625,00 merupakan pendapatan dari Royalti Vaksin Ikan Satker BRPBATPP Sempur dengan estimasi pendapatan senilai Rp0,00;
  28. Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan senilai Rp7.645.775,00 merupakan pendapatan dari Royalti atas Penjualan Wakatobi AIS dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00;
  29. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi senilai Rp0,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp30.000.000,00;
  30. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai senilai Rp56.500.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 yang merupakan

pendapatan yang berasal dari Setoran atas Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jendral Bidang V KKP (Kementerian Kelautan Dan Perikanan) Pada tanggal 10 Maret 2023 Nomor R.112/ITJ.5/HP.230/III/2023 terdapat TGR (Tuntutan Ganti Rugi) terhadap Pegawai SUPM Pontianak atas nama Bapak FF, S.Pi sebesar Rp66.240.000,00 (Enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atas pemanfaatan BMN (barang milik negara) yang baru disetor ke Kas Negara senilai Rp56.500.000,00;

31. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp77.523.292,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari Politeknik AUP Jakarta berupa pengembalian pekerjaan renovasi gedung;
32. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp260.956.523,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari Pengembalian uang makan, tunjangan kinerja PNS, tunjangan fungsional TA 2022 dari 41 Satker lingkup BPPSDMKP;
33. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL senilai Rp761.154.904,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 yang diantaranya:
  - a. Pengembalian belanja perjalanan dinas pada Sekretariat BPPSDMKPKP;
  - b. Pengembalian kelebihan pembayaran BBM KM. Padaido oleh PT. Sehati Mandiri Abadi pada Poltek KP Bitung;
  - c. Pengembalian kelebihan pembayaran pemeliharaan drainase oleh CV. Cahaya Nusantara pada Poltek KP Bitung, pengembalian kelebihan pembayaran BBM KM. Coelacanth sesuai SPK tanggal 15 Desember 2022 oleh PT. Sehati Mandiri Abad pada Poltek KP Bitung;
  - d. Pengembalian belanja honor dosen pasca sarjana dan pelatih tahun 2022 Poltek AUP;
  - e. Pengembalian belanja barang tahun 2022 (TGR SUPM Bone) pada Poltek KP Bone;
  - f. Pengembalian perjadi TAYL BPPP Bitung;
  - g. dan pengembalian atas kelebihan belanja barang pada 16 satker lainnya tahun 2022;
34. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL senilai Rp122.728.662,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 yang terjadi pada Pusat Riset Perikanan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gedung kelembagaan riset kelautan di Kabupaten Pulau Morotai dari PT Tata Guna Pratama hasil pemeriksaan Tim Kejati Maluku Utara; dan

35. Pendapatan Anggaran Lain-lain senilai Rp162.614.083,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 dari 4 satker Lingkup BPPSDMKP yaitu:
- Pada Poltek KP Sidoarjo yaitu senilai Rp147.653.680,00 berupa Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan atas Paket Pekerjaan pengadaan Makan Taruna Tahun 2023 oleh CV. Reneo Maju Bersama;
  - Pada BPPP Medan yaitu senilai Rp155,00 yang merupakan setoran sisa TUP September 2023 pada Balai Diklat Perikanan Medan Tahun Anggaran 2023 dan sudah dilakukan tindak lanjut perbaikan;
  - Pada BPPP Banyuwangi yaitu senilai Rp82.748,00 yang merupakan karena kelebihan setor sisa TUP di bulan November 2023 sebesar Rp82.748,00.; dan
  - Pada Politeknik KP Bone yaitu senilai Rp14.877.500,00.

Realisasi Belanja  
Rp1.342.845.268.7  
62

## B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.342.845.268.762,00 atau 98,42% dari anggaran belanja senilai Rp1.365.279.515.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel B.5**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023**

URAIAN	31-Des-23			%
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	770.600.000.000	742.912.977.000	734.495.482.496	98,87
Belanja Barang	553.844.975.000	583.146.966.000	571.410.382.410	97,99
Belanja Modal	59.192.191.000	39.219.572.000	37.823.209.252	96,44
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>1.383.637.166.000</b>	<b>1.365.279.515.000</b>	<b>1.343.729.074.158</b>	<b>98,42</b>
Pengembalian	0	0	883.805.396	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>1.383.637.166.000</b>	<b>1.365.279.515.000</b>	<b>1.342.845.268.762</b>	<b>98,36</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahunan Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar 98,42% persen disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan bagian Tata Usaha meliputi operasional perkantoran sampai dengan bulan September 2023; yaitu pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan dan Honorarium pengelola keuangan dan pejabat barang dan jasa;
2. Kegiatan operasional pendidikan, VOGA (*Vocation Goes to Actors*) Mendukung dan turun ke lokasi-lokasi prioritas pengembangan program KKP seperti Kampung Perikanan Budidaya, Kampung Nelayan Maju, serta pelabuhan-pelabuhan yang menjadi concern dalam penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Implementasi dari **Voga**: menggambarkan *blended* antara **pendidikan**, **pelatihan**, dan **inkubasi bisnis** sebagai percontohan serta dari sisi pemanfaatan dan optimalisasi aset;
3. Kegiatan operasional pelatihan dan penyuluhan, program Desa Perikanan Cerdas atau *SMART Fisheries Village* merupakan konsep pengembangan desa perikanan berbasis penerapan teknologi informasi, komunikasi dan pengelolaan yang efektif, berkelanjutan serta peningkatan ekonomi;
4. Pengadaan bahan makan taruna dan jasa katering pada SUPM dan Politeknik; dan
5. Pengadaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Adapun anggaran yang belum terserap sesuai dengan target yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 disebabkan antara lain

**Tabel B.6**  
**Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	734.036.420.418	776.961.853.654	(5,52)
Belanja Barang	570.985.639.092	452.461.437.856	26,20
Belanja Modal	37.823.209.252	22.265.019.193	69,88
<b>Jumlah</b>	<b>1.342.845.268.762</b>	<b>1.251.688.310.703</b>	<b>7,28</b>

Kenaikan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pada Belanja Pegawai terjadi penurunan disebabkan oleh adanya penurunan jumlah ASN BPPSDMKP 2023;
2. Pada Belanja Barang terdapat kenaikan pada Belanja Barang BLU Poltek KP Sidoarjo dan BPPP Tegal;
3. Pada Belanja Modal mengalami kenaikan karena sebagian besar Belanja Modal, baik Peralatan dan Mesin maupun Pembangunan Gedung dan Bangunan sedang berjalan dilaksanakan diantaranya pembangunan infrastruktur pada Politeknik AUP.

*Belanja Pegawai*  
*Rp734.036.420.418*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp734.036.420.418,00 dan Rp776.961.853.654,00. Belanja pegawai meliputi Gaji Pokok, Tunjangan PNS, Uang Makan PNS, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Dosen dan Uang Lembur Pegawai dengan jumlah pengembalian Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 senilai Rp459.062.078,00.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 5,52 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan karena pensiunnya pegawai pimpinan pada tahun 2023, berkurangnya tenaga profesi guru karena peleburan SUPM ke politeknik, dan berkurangnya realisasi lembur pegawai.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja pegawai pada 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel B.7**  
**Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 230.293.281.260	Rp 199.999.694.621	15,15
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 3.405.611	Rp 2.950.884	15,41
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 17.295.984.136	Rp 15.008.036.360	15,24
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 5.293.507.265	Rp 4.558.975.878	16,11
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 772.295.000	Rp 1.155.980.000	(33,19)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 39.008.328.000	Rp 37.934.709.000	2,83
Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 1.169.187.590	Rp 1.432.600.159	(18,39)
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 13.513.861.680	Rp 11.740.223.460	15,11
Belanja Uang Makan PNS	Rp 36.859.454.250	Rp 27.884.779.000	32,18
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp 70.350.000	Rp 53.950.000	30,40
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 1.221.800.000	Rp 935.390.000	30,62
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 2.706.355.000	Rp 2.271.300.000	19,15
Belanja Tunjangan Profesi Guru	Rp 3.185.831.700	Rp 4.218.962.260	(24,49)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	Rp 9.994.067.450	Rp 6.784.352.410	47,31
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 15.866.610.100	Rp 10.296.721.500	54,09
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 382.129	Rp 215.918	76,98
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp 1.041.302.700	Rp 657.969.700	58,26
Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp 272.226.974	Rp 177.530.400	53,34
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 2.848.185.000	Rp 1.873.273.000	52,04
Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 977.887.260	Rp 612.455.940	59,67
Belanja Uang Makan PPPK	Rp 3.357.110.550	Rp 1.692.565.000	98,34
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	Rp 1.275.000		
Beban Tunjangan Umum PPPK	Rp 1.620.000		
Belanja Uang Lembur	Rp 1.771.813.550	Rp 812.737.500	118,01
Belanja Uang Lembur PPPK	Rp 4.786.000	Rp -	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	Rp 324.381.323.243	Rp 233.638.177.659	38,84
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	Rp 22.583.251.048	Rp 12.490.103.258	80,81
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 734.495.482.496</b>	<b>Rp 576.233.653.907</b>	<b>27,46</b>

*Belanja Barang*  
*Rp570.985.639.092*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp570.985.639.092,00 dan Rp452.461.437.856,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis



pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Jika dibandingkan realisasi belanja barang pada 31 Desember 2023 dan 2022, maka pada Tahunan T.A 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 26,20 persen. Kenaikan sebesar 26,20 persen disebabkan karena meningkatnya belanja barang operasional dan non operasional khususnya pada program prioritas nasional seperti belanja barang kegiatan SFV UPT.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja barang pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel B.8**  
**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	Rp 126.843.336.777	Rp 85.741.377.324	47,94
Belanja Barang Non Operasional	Rp 166.216.361.513	Rp 101.093.857.774	64,42
Belanja Barang Persediaan	Rp 17.309.574.354	Rp 12.422.387.393	39,34
Belanja Jasa	Rp 75.801.045.085	Rp 32.970.482.151	129,91
Belanja Pemeliharaan	Rp 98.889.838.622	Rp 30.758.180.405	221,51
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 77.862.670.861	Rp 26.659.780.877	192,06
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 1.494.745.496	Rp 155.535.524	-
Belanja Barang BLU	Rp 6.992.809.702	Rp 1.181.594.446	491,81
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 571.410.382.410</b>	<b>Rp 290.983.195.894</b>	<b>96,37</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>Rp 424.743.318</b>	<b>Rp 37.659.047</b>	<b>1.027,87</b>
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>Rp 570.985.639.092</b>	<b>Rp 290.945.536.847</b>	<b>96,25</b>

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 26,20 persen dari 31 Desember 2022. Terdapat kenaikan realisasi pada belanja sebagai berikut:

- a. Belanja barang operasional mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen karena belanja keperluan perkantoran, pengadaan bahan makan taruna dan pengeluaran

kebutuhan dasar lainnya bertambah;

- b. Belanja barang non operasional mengalami kenaikan sebesar 2,70 persen digunakan diantaranya untuk honor yang terkait dengan output kegiatan dan Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
- c. Belanja Persediaan Barang Konsumsi mengalami penurunan sebesar 12,41 persen digunakan untuk belanja ATK untuk keperluan operasional perkantoran;
- d. Belanja Jasa mengalami kenaikan sebesar 42,68 persen digunakan untuk belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
- e. Belanja Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 50,62 persen digunakan untuk biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
- f. Belanja perjalanan dinas dalam negeri mengalami kenaikan sebesar 66,07 persen digunakan untuk perjalanan dinas kegiatan dan perjalanan dinas pimpinan;
- g. Belanja perjalanan dinas luar negeri mengalami kenaikan sebesar Rp400.351.513 karena sudah diberlakukan kembali kunjungan kedinasan ke Luar Negeri; dan
- h. Belanja Barang BLU mengalami kenaikan sebesar 486,22 persen karena pada Tahun 2023, 2 Satker BLU yaitu BPPP Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo mulai beroperasi sesuai tusi.

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0*

## **B.5 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tidak mempunyai Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Belanja Modal  
Rp37.823.209.252

## B.6 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp37.823.209.252,00 dan Rp22.265.019.193,00. Realisasi Belanja Modal pada Tahunan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 69,88% dibandingkan Tahunan TA 2022 disebabkan antara lain karena adanya pembangunan infrastruktur pada Poltek AUP berupa renovasi asrama, pengadaan peralatan *drumband*, dan renovasi gedung direktorat.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel B.9**  
**Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.085.081.995	10.976.419.078	46,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.419.388.755	10.702.653.945	53,41
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	995.747.797	-	
Belanja Modal Lainnya	1.825.050.082	134.363.660	1258,29
Belanja Modal BLU	2.497.940.623	505.637.500	394,02
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>37.823.209.252</b>	<b>22.319.074.183</b>	<b>69,47</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	54.054.990	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>37.823.209.252</b>	<b>22.265.019.193</b>	<b>69,88</b>

Belanja Modal  
Tanah Rp0

## B.7 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**Tabel B.10**  
**Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp16.085.081.995

## B.8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp16.085.081.995,00 dan Rp3.933.124.000,00. Realisasi Tahunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 60,28% bila dibandingkan dengan realisasi Tahunan TA 2022.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel B.11**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	15.588.389.995	10.976.419.078	42,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	496.692.000	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.085.081.995</b>	<b>10.976.419.078</b>	<b>46,54</b>
Pengembalian	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.085.081.995</b>	<b>10.976.419.078</b>	<b>46,54</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	208.323.200,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	288.100.000,
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	137.751.000,
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	1.448.613.670,
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	826.800.000,
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	877.717.320,
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	511.425.983,
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	11.600.000,
PUSAT RISET PERIKANAN	428.486.900,
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	11.100.000,
LOKA RISET PERIKANAN TUNA	334.265.000,
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	168.214.460,

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	301.285.850,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	107.700.000,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	51.435.000,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	182.399.700,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	48.385.150,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP	182.713.770,
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	4.321.267.415,
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	15.000.000,
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	257.763.090,
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	123.400.920,
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	123.576.300,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	149.599.600,
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN	3.338.965.767,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	96.580.000,
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1.035.919.900,
<b>Total</b>	<b>15.588.389.995,</b>

- b. Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp496.692.000,00 yaitu dari BPPP Medan dan BPPP Tegal, dengan rincian sebagai berikut:

NAMA SATKER	NILAI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	196.692.000,
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	300.000.000,
<b>Total</b>	<b>496.692.000,</b>

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp10.109.143.031*

### B.9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp10.109.143.031,00 dan Rp7.665.338.552,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,88% dibandingkan Realisasi per 31 Desember 2022.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel B.12**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 DESEMBER 2023	REALISASI 30 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	1.134.084.141	6.436.188.477	-82,38
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	30.000.000	0,00
Perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan	234.366.880	319.810.400	-26,72
Penambahan nilai gedung dan bangunan	15.050.937.734	3.862.600.078	289,66
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.419.388.755</b>	<b>10.618.598.955</b>	<b>54,63</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.419.388.755</b>	<b>10.618.598.955</b>	<b>54,63</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	149.578.000,
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	769.337.812
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	49.833.450,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	165.334.879,
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.084.141</b>

- b. Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	24.872.880,
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	209.494.000
<b>TOTAL</b>	<b>234.336.880</b>

- c. Realisasi Belanja Penambahan nilai gedung dan bangunan terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	199.743.140
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	174.885.000,
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	13.139.515.314,
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	507.201.162
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	208.711.678
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	98.806.428
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN	388.865.012
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	333.210.000
<b>TOTAL</b>	<b>15.050.937.734</b>

Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan  
Rp983.478.497

## B.10 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp983.478.497,00 dan Rp0,00.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel B.13**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 DESEMBER 2023	REALISASI 30 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Jalan dan Jembatan	0	0	0,00
Irigasi	20.091.000	0	100,00
Jaringan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	580.472.600	0	100,00
Penambahan Nilai Irigasi	382.914.897	0	100,00
Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>983.478.497</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>983.478.497</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan periode 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Irigasi terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	20.091.000,
<b>TOTAL</b>	<b>20.091.000,</b>

- b. Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
POLITEKNIK AUP JAKARTA	592.741.900,
<b>TOTAL</b>	<b>580.472.600,</b>

- c. Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Irigasi terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
POLITEKNIK AUP JAKARTA	382.914.897,
<b>TOTAL</b>	<b>382.914.897,</b>

Belanja Modal  
Lainnya  
Rp1.825.050.082

### B.11 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp965.826.456,00 dan Rp134.363.660,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 618,82%.

Nilai perbandingan antara realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel B.14**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 DESEMBER 2023	REALISASI 30 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Modal Lainnya	1.825.050.082	134.363.660	1258,29
Penambahan nilai aset tetap/aset lainnya	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.825.050.082</b>	<b>134.363.660</b>	<b>1258,29</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.825.050.082</b>	<b>134.363.660</b>	<b>1258,29</b>

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA SATKER	NILAI
BALAI RISET PERIKANAN LAUT	194.500.000
POLITEKNIK AUP JAKARTA	1.600.379.082
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	30.171.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.825.050.082</b>

Belanja Modal BLU  
Rp2.497.940.623,00

### B.12 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp2.497.940.623,00 dan Rp505.637.500,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 108,34%.

Nilai perbandingan antara realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



**Tabel B.14**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 DESEMBER 2023	REALISASI 30 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	1.133.654.423	319.989.400	254,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	837.906.200	66.178.200	1166,14
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	457.180.000		0,00
Belanja Modal Lainnya BLU	69.200.000	119.469.900	-42,08
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.497.940.623</b>	<b>505.637.500</b>	<b>394,02</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.497.940.623</b>	<b>505.637.500</b>	<b>394,02</b>

Realisasi Belanja Modal BLU periode 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	511.779.423
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	621.875.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.133.654.423</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU BPPP Tegal pada periode pelaporan berupa pembelian :

- Sarana untuk layanan kegiatan pelatihan senilai Rp148.760.900,-
- Sarana Peralatan PTSP senilai Rp76.741.223,00;
- Sarana Bidang Permesinan senilai Rp7.100.000,00;
- Sarana Kelengkapan Asrama Senilai Rp139.431.190,00;
- Sarana Kelengkapan Hotel Akuarium Indonesia senilai Rp89.766.810,00;
- Sarana bidang kepelautan senilai Rp49.979.300,00.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin-BLU Poltek KP Sidoarjo pada periode pelaporan berupa pembelian :

- Sarana Band 1 Paket Rp69.200.000,00;
- Peralatan Pendukung Tefa Budidaya Air Payau 1 Paket Rp160.820.000,00;
- Meubelair Asrama 100 Unit 3.000.000, Rp300.000.000,00;
- Kincir Air 1 Unit 6.980.000, Rp6.980.000,00
- Pendingin Ruangan (AC) 5 Unit 10.000.000, Rp50.000.000,00

- f. Kursi Kelas 60 Unit 1.500.000, Rp90.000.000,00
- g. Peralatan Perawatan Mesin Refrigerasi 1 Paket 15.000.000,00, Rp15.000.000,00.9

b. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	315.258.900
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	522.647.300
<b>TOTAL</b>	<b>837.906.200</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU BPPP Tegal pada periode pelaporan berupa pemasangan granit gedung fishinggear senilai Rp116.064.400,00 dan rehab bangunan wisma jaladri senilai Rp199.194.500,00. Serta belanja modal gedung dan bangunan-BLU Rp522.647.300,00 pada Poltek KP Sidoarjo.

c. Realisasi Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan BLU terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	457.180.000
<b>TOTAL</b>	<b>457.180.000</b>

Merupakan Pembayaran Pekerjaan Tambah Daya dan Instalasi Elektrikal di TEFA BAP Pulokerto sebesar Rp349.000.000,00 dan Pembangunan Jalan Paving Rp108.180.000,00 pada Poltek KP Sidoarjo.

d. Realisasi Belanja Modal Lainnya BLU terdiri dari:

NAMA SATKER	NILAI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	0
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	69.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>69.200.000</b>

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2023 per 31 Desember 2023 pada Poltek KP Sidoarjo dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp69.200.000,00 dan Rp0,00. Realisasi anggaran tersebut merupakan realisasi untuk pembelian 1 paket sarana band (SPM Pengesahan Belanja No.00235A tanggal 13 September 2023).

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *Audited* adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp176.356.699,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel C.1**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
**31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *Audited***

No	Nama Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	0,	0,
2	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	0,	0,
3	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	0,	0,
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	0,	0,
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	0,	0,
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	0,	0,
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	0,	0,
8	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	0,	0,
9	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	0,	0,
10	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	0,	0,
11	PUSAT RISET PERIKANAN	0,	0,
12	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	0,	0,
13	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,	0,
14	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	0,	0,
15	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	0,	0,
16	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,	0,
17	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,	0,
18	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,	0,
19	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	0,	0,
20	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	0,	0,
21	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	0,	0,
22	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	0,	0,
23	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN	0,	0,
24	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,	0,

25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	0,	0,
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	0,	0,
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	0,	0,
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	0,	0,
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP)	0,	0,
30	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	0,	0,
31	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	0,	0,
32	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	0,	0,
33	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	0,	0,
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	0,	0,
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	0,	0,
36	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	0,	0,
37	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	0,	0,
38	SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN	0,	0,
39	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	0,	0,
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	0,	0,
41	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	0,	0,
<b>TOTAL</b>		<b>0,</b>	<b>0,</b>

**Tabel C.2**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TUP**

No	Nama Satker	31 Desember 2023	31 Des 2022
1	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	0,	176.356.699,
2	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	0,	0,
3	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	0,	0,
4	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,	0,
5	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,	0,
6	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,	0,
7	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	0,	0,
8	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	0,	0,
9	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	0,	0,
10	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	0,	0,
11	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	0,	0,
<b>TOTAL</b>		<b>0,</b>	<b>176.356.699,</b>

*(Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Rekening Koran dan Penutupan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 terlampir)*

Tidak terdapat Kas di Bendahara pengeluaran TUP Per tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari TUP yang belum selesai dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Sedangkan, penyebab masih adanya saldo pada Kas di Bendahara Pengeluaran TUP per 31 Desember 2022 *Audited* berasal dari Satker BPPP Ambon yang merupakan saldo TUP yang seharusnya merupakan anggaran kegiatan dengan sumber dana PNBPN, namun terjadi kesalahan pembebanan (dibebankan ke sumber dana RM) pada saat mengajukan permohonan TUP Desember 2022 pada SAKTI. Sesuai hasil konsultasi dengan KPPN Ambon, anggaran tersebut telah disetor ke Kas Negara menggunakan akun 815514 dengan NTPN 8C50B395ARQFJ6DB Tanggal 5 Januari 2023.

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0,00*

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Setelah tanggal Neraca 31 Desember 2023 tidak terdapat satker yang memiliki Saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana berikut:

**Tabel C.3**  
**Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022**

No	Nama Satker	31 Desember 2023	31 Des 2022
1		0,	0,
2		0,	0,
3		0,	0,
4		0,	0,
5		0,	0,
<b>TOTAL</b>		<b>0,</b>	<b>0,</b>

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp30.185.300,00*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp30.185.300,00 dan Rp1.055.404.198,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel C.4**  
**Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas**  
**31 Desember 2023 dan 30 Desember TA 2022 Audited**

Keterangan	31-Dec-23	31 Desember TA 2022 (Audited)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	360.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	-	1.054.044.198
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Kas Lainnya di BLU	30.185.300	
<b>Jumlah</b>	<b>30.185.300</b>	<b>1.054.404.198</b>

Kas Lainnya dan Setara Kas terbagi menjadi 6 yaitu:

- a. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0,00 terdapat pada Satker:

No	Nama Satker	31 Desember 2023	Keterangan
1		0,	
2		0,	
<b>TOTAL</b>		<b>0,</b>	

- b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00 yang terdiri dari:

No	Nama Satker	31 Desember 2023	Keterangan
1			
2			
<b>TOTAL</b>		<b>0,</b>	

- c. Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp30.185.300,00 yang terdiri dari:

No	Nama Satker	31 Desember 2023	Keterangan
1	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	30.185.300,	Uang muka pelatihan BST ANKAPIN yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024 untuk 35 orang
<b>TOTAL</b>		<b>24.399.000,</b>	

- d. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah senilai Rp0,00 yang merupakan Saldo awal dari hibah yang dikelola oleh Pusat Riset Perikanan, terdiri dari:

No	Nama Satker	31 Desember 2023	Keterangan
1		0,	
2		0,	
<b>TOTAL</b>		<b>0,</b>	

Pusat Riset Kelautan telah mengirimkan Memorandum ke Sekretaris BRSDMKP 322/BRSDM.2/KS.110/IX/2023 pada tanggal 27 September 2023 untuk Pengajuan Pemutakhiran Register Hibah Korea dari Satker Lama (Pusriskan) ke Satker Baru (Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut) (terlampir).

Perkembangan Triwulan IV:

1. Tanggal 22 November 2023, Pemindahan dan Penutupan Rekening dengan nomor surat: B.1360/BPPSDM.2/KU.430/XI/2023 Meminta untuk pemindahan dana pada hibah *Korea Maritime and Ocean University* (KMOUC);
2. Tanggal 5 Desember 2023, Pengajuan BAST Pemindahbukuan Saldo Kas Hibah KMOUC dengan nomor memorandum: 410/BPPSDM.2/KU.530/XII/2023; dan
3. Tanggal 19 Desember 2023, Pemberitahuan Pemindahan Saldo Kas Hibah 403816, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah telah melakukan penyesuaian pemindahan saldo kas hibah satker Pusat Riset Perikanan (403821) ke Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (622145).

Progres Penutupan Rekening Hibah Korea oleh Bendahara Pengeluaran Satker Pusriskan, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan surat nomor S-838/KPN.1208/2023 Tanggal 19 Desember 2023 hal pemberitahuan pemindahan saldo kas hibah 403816 terkait pemindahan saldo kas hibah KMOUC dari Pusat Riset Perikanan, kode satker 403821, ke Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, kode satker 622145 (terlampir);

2. Sesuai dengan surat nomor B.3177/BRSDM/KU.440/VII/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal surat permohonan penutupan rekening telah dilakukan penutupan rekening pada Bank BNI (terlampir);
3. Tanggal 29 Desember 2023 sudah dilakukan penutupan rekening hibah KMOUC RPL 140 PDHL PURISKAN untuk 2PG6AJQA pada aplikasi SPRINT (terlampir); dan
4. Pada tgl 12 Januari 2023 sudah dilakukan penyelesain LPJ Bendahara terkait penyelesaian hibah KMOUC (bukti terlampir).

Penjelasan Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah senilai Rp1.054.044.198,00 merupakan Setara kas pada Tahun Anggaran 2022 pada Satker Pusriskan yang diperoleh dari penerimaan dan sisa dana Hibah Langsung Luar Negeri (TAYL) program kerjasama Indonesia ACIAR, CSIRO, Tahun Anggaran 2016, WPEA-ITM Tahun 2022 pada satker Pusat Riset Perikanan, serta kegiatan KMOUC Kerjasama Indonesia Korea Pada Pusat Riset Kelautan yang berasal bukan dari UP/TUP. Pada Kas lainnya dan Setara kas Tahun 2022 terdapat saldo Awal sebesar Rp. 2.131.234.352,00 yang dana tersebut berasal dari sisa dana hibah tahun anggaran 2022 pada tahun 2022 terdapat Penambahan Dana hibah pada kegiatan KMOUC sebesar Rp. 596.658.698,00. Pada Tahun 2022 kegiatan Hibah ACIAR dan CSIRO sudah di SP4HL kan dan kegiatan WPEA-ITM dan KMOUC sudah diproses SP2HL pada bulan Desember 2022 dengan Rincian masing-masing kegiatan adalah:

**Rincian Dana Hibah Luar Negeri Pada Tahun 2023**

Uraian	Saldo Hibah Awal Dana Hibah	Penambahan Saldo Hibah 2022	SP4HL	SP2HL	Jumlah Saldo per 31 Desember 2023
Hibah ACIAR	949.918.483		949.918.483		
Hibah CSIRO	538.128.913		538.128.913		
Hibah WPEA-ITM	185.701.456			185.701.456	
Hibah KMOUC	457.485.500			100.000	457.485.500
Pendapatan Korea Hibah KMOUC Tahun 2022		596.658.698			596.658.698
<b>Jumlah</b>	<b>2.131.234.352</b>	<b>596.658.698</b>	<b>1.488.047.396</b>	<b>185.801.456</b>	<b>1.054.144.198</b>

- a. Saldo hibah dari kerjasama dengan CSIRO Australia senilai Rp0,00 dengan judul "Enabling Enforcement Through Use of Monitoring Information to



- Support Surveillanve Activities*” nomor register 28WNJQ8A yang berlaku mulai 14 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2022;
- b. Saldo hibah dari kerjasama dengan ACIAR-CSIRO senilai Rp0,00 dengan judul *“Harvest Strategies for Indonesian Tropical Tuna Fisheries to Increase Sustainable Benefits”* nomor registrasi 2EU1XEUA yang berlaku mulai 15 Mei 2018 sampai dengan 30 Januari 2022;
- c. Saldo hibah dari kerjasama dengan WPEA (2PXFA8WA) senilai Rp0,00 dengan judul *“Western Pacific East 'Asia Improved Tuna Monitoring Activity (WPEA ITM)”* nomor register 2PXFA8WA yang berlaku mulai 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- d. Saldo Hibah dari Korea Marine and Ocean Univesity Consortium (KMOUC) senilai Rp1.054.144.198,00 dan telah dilakukan kegiatan *“The Establishment of Marine and Fisheries Scientif and Technical Cooperation on Abandoned Oil and Gas Plarform”* dana tersebut sudah di Belanjakan senilai Rp1.196.368.417,00 dan dapat pengesahan sedangkan saldo akhir senilai Rp1.042.651,00 masih berada di Kas Rekening Hibah satker Pusat Riset Perikanan.

Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada Laporan Keuangan Tahun 2022 senilai Rp1.054.044.198,00 merupakan Saldo awal dari pendapatan hibah yang diterima BPPSDM KP pada Tahun Anggaran 2022.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah  
Tahun 2022**

Nama Satker	Saldo Awal/ 31 Des 2022	Mutasi Tambah Pencairan Hibah	Mutasi Kurang		Saldo Akhir 31 Des 2022
			Realisasi Belanja	Setoran/Pen gembalian	
a	b	c	d	e	f = b + c - d - e
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	118.815	301.772.154	85.583.532	216.307.437	-
PUSAT RISET PERIKANAN - WPEA-ITM	185.701.456	-	185.701.456	-	-
PUSAT RISET PERIKANAN - KMOUC	457.485.500	96.658.698	100.000	-	1.054.044.198
PUSAT RISET PERIKANAN - ACIAR	949.918.483	-	-	949.918.483	-

PUSAT RISET PERIKANAN - CSIRO	538.128.913	-	-	538.128.913	-
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	265.354.285	-	-	265.354.285	-
<b>JUMLAH</b>	<b>2.396.707.452</b>	<b>898.430.852</b>	<b>271.384.988</b>	<b>1.969.709.118</b>	<b>1.054.044.198</b>

Penjelasan Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada Saldo Awal per 31 Desember 2022 masing-masing satker senilai Rp2.396.707.452,00 antara lain:

1. Satker Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang, yaitu: Saldo hibah dari kerjasama dengan ACIAR Australia senilai Rp118.815,00. Hibah Langsung dengan judul "*Acceleration the Development of Finfish Mariculture in Cambodia through South-South Research cooperation with Indonesia*". Nomor register 2W5PCGDA yang berlaku mulai 11 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada Tahun 2022 terdapat pengesahan pertama realisasi Hibah Langsung untuk pembayaran belanja barang dan jasa, register nomor 2W5PCGDA berjudul "*Translating Fish Passage Resea*" senilai Rp301.772.154,00 pada tanggal 1 Desember 2022 nomor 00576T/403823/2022, kemudian dibelanjakan senilai Rp85.583.532,00 untuk kegiatan "*Translating Fish Passage Research Outcomes In to Policy and Legislation Across South East Asia*" sesuai perjanjian Hibah Nomor FIS/2018.153 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Honor Suporting	49.016.000,00
2	Honor Tim Kegiatan	30.300.000,00
3	Biaya BPJS	3.133.476,00
4	Jasa Pengurusan Visa	3.134.056,00
	Total	<b>85.583.532,00</b>

Sisa saldo senilai Rp216.307.437,00 kemudian terdapat pengesahan realisasi Hibah Langsung untuk pembayaran pendapatan hibah dengan register 2W5PCGDA *Translating Fish Passage Resea* dengan SPM Nomor 00601T/403823/2022 tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp215.057.427,00. Sisa saldo senilai Rp1.250.000,00 kemudian disetor ke kas Negara melalui 2 billing masing-masing senilai Rp1.200.000 dengan NTPN 875F36QR9C4J45AF yang disetor tanggal 13 September 2022 dan Rp50.000,00 dengan NTPN AF6BB0JSQI41U5FB yang disetor tanggal 7 Desember 2022, sehingga pada tanggal 31 Desember 2023 nilai saldo menjadi Rp0,00;

2. Satker Pusat Riset Perikanan, yaitu:

- a. Saldo hibah dari kerjasama dengan WPEA (2PXFA8WA) senilai Rp185.701.456,00 dengan judul “Western Pacific East 'Asia Improved Tuna Monitoring Activity (WPEA ITM)” nomor register 2PXFA8WA Norek BNI 0906986221 nama rekening RPL 140 PDHL Pusrisikan yang berlaku mulai 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2023 telah dilakukan pengesahan hibah senilai Rp185.701.456,00 sehingga saldo akhir menjadi Rp0,00 dengan SPM Nomor 00661T/403821/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- b. Sisa Anggaran Hibah dari *Korea Marine and Ocean Univesity Consortium* (KMOUC) senilai Rp1.054.144.198,00 dengan nomor register 2PG6AJQA, nomor rekening 0609195443 dan nama rekening "RPL 140 BPPSDM KP - PG6AJQA dengan kegiatan “*The Establishment of Marine and Fisheries Scientif and Technical Cooperation on Abandoned Oil and Gas Plarform*”. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 104/DJPRL.1/TU.210/I/2023 tanggal 13 januari 2023 Penyampaian dan Permohonan Finalisasi Draft Implementing Arrangement (IA) for the Establishment of A Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center diperoleh hal-hal sebagai berikut:
  - Ditjen PRL telah melakukan pembahasan satu dari tiga dokumen kerja sama hibah Korea Selatan yang akan dilakukan perubahannya yaitu *Implementing Arrangement (IA) for the Establishment of A Korea-Indonesia offshore Research Cooperation Center (KIORCC)* antara Indonesia dan Korea Selatan bersama mitra KIORCC;
  - Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PRL, salah satu perubahan yang diusulkan adalah:
    - Pasal Tujuan/*Objective* diubah menjadi “*to establish and operate the Korea-Indonesia off shore Research Cooperation Center (hereinafter referred to as "KIORCC") with the purpose of promoting and strengthening cooperation in formulating asesment-based policy and implementing joint programs in offshore service industry on the basis of the principles of equality, reciprocity, and mutual benefits*”;
    - Tanggungjawab KIORCC yang semula berbasis riset diubah menjadi kajian (*assesment*);

- Penambahan Paragraph 9 tentang *Data, Information Sharing, Publication and Confidentiality*;
  - Paragraph 10 tentang *Contact Point* dalam draft IA;
  - Masa berlaku IA yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun dengan perpanjangan otomatis selama 5 tahun.
  - Hibah tersebut direncanakan akan ditandatangani Para Pihak pada pertemuan Joint Technical Meeting antara RI-Korea Selatan pada 13 Februari 2023;
  - Langkah langkah yang akan oleh satker Pusat riset Perikanan setelah dilakukan Kerjasama antara Dijen PRL dengan pihak KIORCC adalah pemindahan saldo rekening hibah yang telah di buka satker di Dirjen PRL dan menutup rekening Hibah KIORCC.
- c. Saldo hibah dari kerjasama dengan ACIAR-CSIRO senilai Rp949.918.483,00 dengan judul "*Harvest Strategies for Indonesian Tropical Tuna Fisheries to Increase Sustainable Benefits*" nomor registrasi 2EU1XEUA Norek BNI 0906986221 nama rekening RPL 140 PDHL Pusrisikan yang berlaku mulai 15 Mei 2018 sampai dengan 30 Januari 2022 dan telah dilakukan pengesahan pengembalian hibah langsung dengan register 2EU1XEUA sesuai SPM Nomor 00700/403821/2022 tanggal 26 Desember 2022 sehingga saldo kas hibah per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00; dan
- d. Saldo hibah dari kerjasama dengan CSIRO Australia senilai Rp538.128.913,00 dengan judul "*Improving Efforts to Reduce Illegal, Unreported and Unregulated Fishing through Expanding Human Capacity and implementing Applied Research Tools to Address Maritime Issues*" (CSIRO) nomor register 2LGLQQ1A Nomor rekening BNI 0906986221 nama rekening RPL 140 PDHL Pusrisikan dan telah dilakukan pengesahan pengembalian hibah langsung dengan register 2LGLQQ1A sesuai SPM Nomor 00699T/403821/2022 tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp538.128.913,00 sehingga saldo kas hibah per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.
3. Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, yaitu: Saldo hibah dari kerjasama dengan ACIAR Australia senilai Rp265.354.285,00. Hibah Langsung dengan judul "*Acceleration the Development of Finfish Mariculture in Cambodia through South-South Research cooperation with*

"Indonesia" merupakan Kerjasama Triangular BPPSDM KP-ACIAR-MARDeC di Provinsi Sihanoukville Kamboja dalam rangka Dukungan KSST RI terhadap Kamboja dengan Nomor register 21PHN4JA yang berlaku mulai 11 September 2017 sampai dengan September 2022.

Telah dilakukan pengesahan pengembalian hibah langsung dengan register 21PHN4JA sesuai SPM Nomor 00185T/403836/2022 tanggal 29 November 2022 senilai Rp265.354.285,00 sehingga saldo kas hibah per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

*Kas pada BLU*  
*Rp2.243.172.833*

#### **C.4 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)**

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp2.243.172.833,00 dan Rp1.818.976.773,00. Saldo kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo pendapatan yang masih dalam proses pengesahan.

Jika dibandingkan belanja dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 2022 *Audited*, maka pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan nilai sebesar 23,32 persen.

Kenaikan nilai untuk Kas pada Badan Layanan Umum pada Tahun 2022 dikarenakan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 2 satker lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berubah statusnya menjadi Satker BLU yaitu BPPP Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo.

Rincian Kas pada Badan Layanan Umum pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel C.5**  
**Rincian Kas pada Badan Layanan Umum**  
**31 Desember 2023 dan 2022**

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Kas dan Bank - BLU	2.243.172.833	1.818.976.773	23,32
Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.243.172.833</b>	<b>1.818.976.773</b>	<b>23,32</b>

Kas pada Badan Layanan Umum diakui secara akrual senilai Rp2.243.172.833,00 pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian:

- a. Kas dan Bank-BLU merupakan Kas pada Satker BPPP Tegal senilai Rp963.979.677,00 dan Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp1.279.193.156,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas Pada BLU BPPP Tegal

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	Rp 1.128.192.027
Pendapatan yang sudah disahkan	Rp 9.075.535.075
<b>Jumlah pendapatan yang sudah disahkan</b>	<b>Rp 10.203.727.102</b>
Belanja barang yang sudah disahkan	Rp 5.062.709.102
Belanja modal yang sudah disahkan	Rp 827.038.323
<b>Jumlah Belanja yang sudah disahkan</b>	<b>Rp 5.889.747.425</b>
Deposito	Rp 3.350.000.000
<b>Jumlah Deposito</b>	<b>Rp 3.350.000.000</b>
<b>Jumlah Kas BLU</b>	<b>Rp 963.979.677</b>

Pada Satker BPPP Tegal Terdapat perbedaan antara saldo kas dan bank BLU dengan saldo rekening bank BLU per 31 Desember 2023. Rincian saldo akhir rekening bank BLU sebagai berikut:

Rincian saldo akhir rekening BLU per 31 Desember 2023

Nama Rekening	Saldo Rekening
Rekening Operasional Penerimaan BLU	963.969.297
Rekening Operasional Pengeluaran BLU	6.684
Rekening Dana Kelola BLU	24.400.403
Rekening Pengelolaan Kas BLU	984
Rekening Bahari Residence BLU	1.309
<b>Jumlah Kas BLU</b>	<b>988.378.677</b>

Terdapat perbedaan antara saldo kas dan bank BLU neraca dengan saldo rekening bank BLU per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Rincian Selisih Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Saldo Rekening Koran BLU	988.378.677
Kas dan Bank BLU Neraca	963.979.677
<b>Jumlah Kas BLU</b>	<b>24.399.000</b>

Selisih antara saldo kas dan bank BLU pada neraca dengan saldo rekening koran BLU per 31 Desember 2023 senilai Rp24.399.000,00 adalah penerimaan pembayaran dari peserta pelatihan untuk pelatihan yang akan diselenggarakan

di tahun 2024 senilai Rp24.399.000,00. Rincian selisih saldo kas dan bank BLU sebagai berikut:

*Rincian Selisih Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2023*

Uraian	Jumlah
Saldo Rekening Koran BLU	988.378.677
Pendapatan diterima dimuka (penerimaan uang muka dari peserta untuk pelatihan yang akan diselenggarakan Tahun 2024	(24.399.000)
<b>Jumlah Kas BLU</b>	<b>963.979.677</b>

Kas pada Badan Layanan Umum pada Politeknik KP Sidoarjo merupakan saldo kas dan Bank BLU hasil pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Adapun rincian saldo Kas pada Badan Layanan Umum dijelaskan pada tabel berikut :

*Rincian Kas Pada BLU pada Politeknik KP Sidoarjo*

No.	Akun	Uraian	Jumlah
1		Saldo Awal Kas BLU	Rp 690.784.746
2	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	Rp 1.103.097.741
3	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	Rp 17.554.500
4	424118	Pendapatan Penyediaan Barang	Rp 2.829.524.900
5	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	Rp 590.829.009
6	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Rp 40.144.312
7	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	Rp 5.186.998
8	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	Rp 36.178.750
9	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	Rp 151.718.000
10	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	Rp 15.177.100
<b>Total Pendapatan BLU</b>			<b>Rp 5.480.196.056</b>
12	525112	Belanja Barang BLU	Rp 965.821.700
13	525113	Belanja Jasa BLU	Rp 745.605.900
14	525126	Belanja B.Persediaan B.Baku u/ Proses Produksi BLU	Rp 218.673.000
15	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 621.875.000
16	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	Rp 522.647.300
17	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	Rp 457.180.000
18	537115	Belanja Modal Lainnya BLU	Rp 69.200.000
19	113311	Investasi Jangka Pendek (Deposito)	Rp 600.000.000
<b>Total Belanja BLU</b>			<b>Rp 4.201.002.900</b>
<b>Kas Pada BLU</b>			<b>Rp 1.279.193.156</b>

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara penanggungjawab UAKPA dengan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak terdapat selisih antara saldo kas dan bank BLU dengan rekening koran bendahara. Rincian saldo Kas dan Bank BLU adalah sebagai berikut:

*Rincian saldo akhir rekening BLU Politeknik KP Sidoarjo per 31 Desember 2023*

Nama Rekening	Saldo Rekening
Rekening Operasional Penerimaan BLU	1.279.149.701
Rekening Operasional Pengeluaran BLU	43.455
Rekening Dana Kelola BLU	-
<b>Jumlah Kas BLU</b>	<b>1.279.193.156</b>

- b. Tidak terdapat Kas dan Bank BLU belum disahkan pada tanggal 31 Desember 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	

### C. 5 Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum

*Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum Rp3.950.000.000*

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp3.950.000.000,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Jika dibandingkan belanja dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 2022 *Audited* maka pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 100 persen. Kenaikan nilai untuk belanja dibayar dimuka pada Tahun 2023 merupakan transaksi yang berasal dari Kerjasama yang dilakukan oleh Satker BLU BPPP Tegal senilai Rp3.350.000.000,00 dan pada Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp600.000.000,00 merupakan Saldo Deposito BLU pada Bank Mandiri yang jangka waktunya 3 bulan rate bunga sebesar 2,25% per tahun.

Rincian Belanja Dibayar di Muka pada Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel C.6**  
**Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Satker	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
BPPP Tegal	3.350.000.000	-	100,00
Politeknik KP Sidoarjo	600.000.000	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.950.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>



Perbandingan Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2022 *Audited* masing-masing senilai Rp3.950.000.000,00 dan Rp0,00 atau naik sebesar 100% dari tahun 2022.

*Belanja Dibayar  
di Muka  
Rp616.441.667*

### C.6 Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp616.441.667,00 dan Rp401.037.500,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Jika dibandingkan belanja dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 2022 *Audited* maka pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 53,71 persen.

Rincian Belanja Dibayar di Muka pada Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel C.7**  
**Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Biaya hidup peserta tugas belajar sebanyak 30 orang yang dibayar dimuka tahun 2023 untuk biaya tahun 2024 (kontraktual)	616.441.667	0
Biaya hidup peserta tugas belajar sebanyak 39 orang yang dibayar dimuka tahun 2022 (kontraktual)	0	401.037.500
<b>Jumlah</b>	<b>616.441.667</b>	<b>401.037.500</b>

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2022 *Audited* masing-masing senilai Rp616.441.667,00 dan Rp401.037.500,00. Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2023 merupakan Pembayaran biaya pendidikan Gelar Tugas Belajar Bagi PNS KKP sebanyak 30 orang pada anak Satker Pusat Pendidikan (rincian terlampir), sedangkan tahun 2022 sebanyak 39 orang.

*Uang Muka  
Belanja Rp0,00*

### C.7 Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Uang Muka Belanja (*prepayment*) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Jika dibandingkan Uang Muka Belanja (*prepayment*) pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 2022 *Audited* maka pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan.

Rincian Belanja Dibayar di Muka pada Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel C.8**  
**Uang Muka Belanja (*prepayment*)**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Satker	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	-	-	100,00
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	-	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Perbandingan Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2022 *Audited* masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima*  
*Rp2.016.583.960*

### **C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp2.016.583.960,00 dan Rp1.896.388.893,00 yang merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Jika dibandingkan nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 2022 *Audited* maka pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 6,33% dari tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

**Tabel C.9**  
**Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima**  
**31 Desember 2023 dan 2022 *Audited***

No.	NAMA SATKER	NILAI
1	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	20.950.000
2	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	74.175.454
3	PUSAT PENYULUHAN KP	1.896.388.393
4	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	23.439.712
5	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1.630.401
	<b>Jumlah</b>	<b>2.016.583.960</b>

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Tahun 2023 di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. BPPP Medan senilai Rp20.950.000,00 merupakan Pendapatan yang diperoleh dari Pelatihan BST bulan November Tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp20.950.000,00 berupa Pendapatan Layanan pendidikan Rp14.400.000,00 dan Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi sebesar Rp6.550.000,00. Pada 31 Desember 2023 dilakukan jurnal atas transaksi tersebut ke akun PYMHD;
2. BPPP Tegal senilai Rp74.175.454,00 merupakan Jurnal atas Pendapatan yang berasal dari Belanja Jasa Layanan Perbankan Bunga Deposito Bulan Desember 2023 Satker BLU Tegal;
3. Pusat Riset Perikanan/Pusat Penyuluhan senilai Rp1.896.388.393,00 merupakan Pengakuan akrual atas pekerjaan pembangunan Akuarium PIAMARI Pangandaran yang dilaksanakan oleh KSO PT Pangkho Megah-PT Daya Cipta Dianrancana sesuai Kontrak No.172/PPK/BPPSDM KP.2/PL.420/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, terdapat temuan BPK RI berupa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.896.388.892,86, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 13c/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Terhadap temuan tersebut, penyedia menolak temuan BPK RI dan belum melakukan penyetoran sama sekali. Setelah dilakukan 4 kali teguran kepada pihak Penyedia agar melakukan penyetoran, akan tetapi pihak Penyedia tetap menolak untuk menyetor. Sehingga urusan penagihannya dilimpahkan ke pihak KPKNL Jakarta II dalam hal ini ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta (Surat Persetujuan terlampir). Status akhir terhadap temuan tersebut adalah bahwa pihak KPKNL akan menerbitkan Surat Paksa ke pihak penyedia, pada saat dilakukan mediasi pihak Penyedia tetap menolak Temuan BPK RI.

4. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp23.439.712,00 merupakan Jurnal atas Pendapatan Sewa Coldstorage bulan Desember 2023 senilai Rp16.587.187,00; Jurnal atas Pendapatan Bunga Deposito bulan Desember 2023 senilai Rp1.146.575,00; dan Jurnal atas Pendapatan Denda Keterlambatan pembayaran sewa dapur Tahun Anggaran 2023 senilai

Rp5.705.950,00;

5. SUPM Kotaagung senilai Rp1.630.401,00 merupakan Pendapatan atas Jurnal Pengembalian Belanja Yang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember 2023.

*Piutang Bukan Pajak*  
Rp4.667.043.695

### C.9 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp4.667.043.695,00 dan Rp980.541.988,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

**Tabel C.10**  
**Rincian Piutang PNBP**  
**31 Desember 2023 dan 2022 Audited**

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
Piutang PNBP	179.457.500	34.590.153
Piutang Lainnya	4.487.586.195	945.951.835
<b>Jumlah</b>	<b>4.667.043.695</b>	<b>980.541.988</b>

Transaksi tersebut merupakan Piutang Negara Bukan Pajak yang terjadi di Tahun 2023 yang belum diselesaikan pembayarannya pada tanggal 31 Desember 2023. Rincian Piutang PNBP dan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel C.11**  
**Rincian Nilai Piutang PNBP Satker**  
**31 Desember 2023 dan 2022 Audited**

No	Nama Satker	31-Dec-23	31-Dec-22
1	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN		33.700.000
2	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	-	890.153
3	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	179.457.500	-
	<b>Jumlah</b>	<b>179.457.500</b>	<b>34.590.153</b>

Rincian Piutang PNBP Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a) Pada Satker Balai Riset Pemuliaan Ikan senilai Rp179.457.500,00 merupakan Piutang atas Pemanfaatan Lahan dengan cara sewa selama 2

tahun (2024-2025) oleh Koperasi Produsen Loka Mekar Sejahtera dan Sala senilai Rp179.457.500,00 dengan penyisihan piutang tak tertagih (lancar) senilai Rp897.288,00.

Rincian Piutang PNBP Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a) Merupakan Jurnal akrual pendapatan sewa sarana dan prasarana atas pelatihan permesinan tanggal 21 Desember 2022 senilai Rp700.000,00 dan Jurnal akrual pendapatan kegiatan pelatihan permesinan tanggal 21 Desember senilai Rp33.000.000,00 pada Satker BPPP Medan; dan
- b) Kekurangan pendapatan jasa layanan perbankan BLU senilai Rp890.153,00 yang merupakan tindak lanjut dari LHP BPK atas Laporan Keuangan Politeknik KP Sidoarjo T.A 2022. Temuan tersebut merupakan pajak atas bunga Bank T.A 2022 pada rekening BLU yang seharusnya tidak dilakukan pemungutan oleh Bank Mandiri (sesuai PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan BLU menyatakan bahwa bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU tidak dikenakan pajak). Saat ini Bendahara Penerimaan Politkenik KP Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Bank Mandiri dan KPP Pratama Sidoarjo.

Rincian Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp826.877.687,00, yaitu:

**Tabel C.12**  
**Rincian Nilai Piutang Lainnya Satker**  
**31 Desember 2023 dan 2022 Audited**

No	Nama	31-Dec-23	31-Dec-22
1	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	30.100.200,	2.454.550
2	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	1.428.485.977,	3.271.052
3	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	12.613.250,	17.625.200
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	7.339.676,	11.994.437
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	16.492.810,	800.000.000
6	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	760.000,	69.039.279
7	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1.095.000,	1.438.450
8	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	897.471.950,	2.049.635
9	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	0,	74.511
10	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	189.281.184,	1.589.896
11	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	0,	658.725
12	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	0,	35.756.100
13	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,	-
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	10.965.416,	-
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6.643.400,	-
16	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	4.663.250,	
17	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	0,	
18	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1.440.000,	
19	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.480.000,	
20	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	39.911.080,	
21	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	4.625.000,	
22	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	47.675.060,	
23	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	2.100.000,	
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP	16.500.000,	
25	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	857.133.051,	
26	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	11.053.740,	
27	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	60.287.859,	
28	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	2.035.000,	
29	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	12.600.100,	
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	303.791.827,	
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	7.722.000,	
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	60.642.126,	
34	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	420.040.989,	
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	22.573.000,	
36	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	2.063.250,	
<b>TOTAL</b>		<b>4.487.586.195</b>	<b>945.951.835</b>

Berikut adalah rincian piutang lainnya TA 2023 Audited:

1. Poltek KP Bitung  
Merupakan Kelebihan pembayaran Tunjangan Umum 2023 sebanyak 3 orang serta sebelum 2023 3 pegawai.
2. BPPP Ambon  
Merupakan piutang yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan atas PT. Carita Boat Indonesia;
3. BPPP Banyuwangi  
Merupakan Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS 1 orang, Tunjangan Umum 1 orang, Tunjangan Kinerja 1 orang, dan sebelum 2023;
4. BPPP Tegal  
Merupakan Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang;
5. BPPP Bitung  
Merupakan Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Bulan April s.d Desember 2023 sebanyak 1 orang;
6. LRSDKP  
Merupakan Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Bulan Agustus s.d November 2023 sebanyak 1 orang;
7. LPTK  
Merupakan Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Bulan September s.d Desember 2023 sebanyak 1 orang;
8. Pusat Penyuluhan KP/Pusat Riset Perikanan
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Bulan Juli-Agustus 2021 sebanyak 1 orang dan Kelebihan pembayaran Gaji Pokok PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2017-2022 senilai Rp67.125.450,00 dan Tahun 2023 senilai Rp26.968.050,00 sebanyak 1 orang
  - Rp.800.000.000,-. Piutang PNBPN tersebut ialah pekerjaan pembangunan Akuarium PIAMARI Pangandaran pada Pusat Riset Kelautan yang dilaksanakan oleh KSO PT Pangkho Megah-PT Daya Cipta Dianrancana sesuai Kontrak No 172/PPK/BRSDM.2/ PL.420/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, terdapat temuan BPK RI berupa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.896.388.8923, yang tertuang dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 13c/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.

9. BRPL

Saldo Piutang Lainnya BRPL pada TA 2023 senilai Rp0,00;

10. BRPPUPP Palembang

- Piutang atas temuan BPK, Belanja Barang dan Jasa dengan mekanisme UP/ TUP yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp24.123.055,00

- Piutang atas temuan BPK, Belanja Barang kepada Koperasi Penelitian Penyuluh Perikanan (KP3) tidak sesuai kondisi riil senilai Rp165.158.129,00;

11. BRPSDI

Saldo Piutang Lainnya BRPSDI pada TA 2023 senilai Rp0,00;

12. LRPT

Saldo Piutang Lainnya LRPT pada TA 2023 senilai Rp0,00;

13. BBRBLPP

Saldo Piutang Lainnya BBRBLPP pada TA 2023 senilai Rp0,00;

14. BRPBAPPP Maros

Saldo Piutang Lainnya BRPBAPPP Maros atas uang makan dan kelebihan tunjangan kinerja TA 2023;

15. BRPBATPP Bogor

- Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Bulan Maret s.d Mei 2023 sebanyak 1 orang

- Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tugas Belajar Bulan Agustus s.d September 2023 sebanyak 1 orang;

16. BRBIH Depok

Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Bulan Maret s.d September 2021 senilai Rp3.500.000 dan Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tugas Belajar bulan September 2020 senilai Rp1.163.250,00 sebanyak 1 orang;

17. Balai Riset Pemuliaan Ikan

Saldo Piutang Lainnya BBRBLPP pada TA 2023 senilai Rp0,00;

18. LRBRL

Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Bulan Maret s.d Mei 2022 sebanyak 1 orang;



19. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Bulan Maret 2022 sebanyak 1 orang
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Struktural Pegawai Tugas Belajar Bulan September 2022 s.d Desember 2022 senilai Rp2.160.000 dan Bulan Januari s.d Oktober 2023 senilai Rp6.480.000,00 sebanyak 1 orang;
20. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 4 orang
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Pegawai Tugas Belajar Bulan September s.d Desember 2020 sebanyak 3 orang;
21. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Kupang  
Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang;
22. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 5 orang
  - Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum Tahun 2021-2022 (3 orang) dan Tunjangan Kinerja PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2020-2022 sebanyak 4 orang;
23. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai  
Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang dan Tahun 2022 sebanyak 1 orang;
24. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang dan 2021-2022 sebanyak 1 orang
25. Politeknik Ahli Usaha Perikanan
  - a. Piutang atas Temuan BPK yaitu Paket Pekerjaan Belanja Modal Renovasi pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp328.196.676,00 dengan rincian:
    - Renovasi Asrama Aster Baru dan Aster Lama oleh PT. Marvic Rp116.634.150
    - Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan Ruang VIP oleh PT. Nara Rp151.592.870

- Renovasi Asrama Octopus, Thunus dan Ruang Makan Loligo oleh CV. Andi Rp33.477.656
- Pengadaan Jalan Keliling oleh PT. Naga Toba Rp26.492.000
- b. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan senilai Rp8.447.475,00
- c. Kelebihan pembayaran pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp52.157.078,00
- d. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang atas Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Barang Penyelenggaraan Wisuda dan Pelantikan Taruna Baru Nasional Pendidikan Tinggi Vokasi pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp405.964.620,00
- e. Kelebihan Pembayaran Tubel:
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 5 orang
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Umum PNS Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 2 orang
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Struktural Pegawai Tugas Belajar Bulan Oktober 2020 sebanyak 1 orang
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 4 orang;
- 26. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 5 orang;
- 27. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman  
Piutang atas Penatausahaan Belanja Barang Dengan Mekanisme UP/TUP pada SUPM Negeri Pariaman Tidak Tertib dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Senilai Rp60.021.000,00 Dipertanggungjawabkan Menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;
- 28. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak  
Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang;
- 29. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru

- Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang
  - Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2022 sebanyak 1 orang;
30. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong
- Temuan atas Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada SUPM Sorong dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi riil
  - Belanja pemeliharaan Peralatan Mesin pada SUPM Sorong dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi riil
  - Sewa Rumah negara yang dikuasai oleh mantan pegawai pada SUPM Sorong Belum dicatat pada LK dan akan dicatat jurnal penyesuaian pada LK audited Tahun 2023, sesuai dengan Putusan MA;
31. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jembrana
- Kelebihan pembayaran Gaji Pokok PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang;
32. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo
- Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 5 orang dan sebelum 2023;
33. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong
- Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional 2023 sebanyak 3 orang, Tunjangan Umum 2023 sebanyak 2 orang, Tunjangan Kinerja 2023 sebanyak 3 orang, serta sebelum 2023 5 pegawai
  - Temuan BPK atas Biaya perjalanan dinas dalam negeri berupa biaya hotel/penginapan, biaya pendaftaran pelatihan, dan biaya transportasi taksi dipertanggungjawabkan menggunakan Daftar Pengeluaran Rill (DPR) senilai Rp37.370.000,00
  - Proses perencanaan penganggaran dan realisasi belanja bantuan uang makan dan bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama pada Satker Politeknik KP Sorong tidak sesuai ketentuan dan terdapat penggunaan bantuan uang makan yang tidak sesuai kondisi riil senilai Rp91.675.000,00
  - Realisasi Belanja Barang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp147.957.955,00
  - Pertanggungjawaban belanja honorarium jasa profesi tidak sesuai ketentuan/Kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp66.875.000,00

- Pembayaran jasa profesi dosen luar biasa dilakukan tanpa perikatan kerja dan kelebihan pembayaran senilai Rp11.350.000;
- 34. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung  
Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 4 orang;
- 35. Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sukamandi  
Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 sebanyak 1 orang.

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0,00*

### **C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

**Tabel C.13**  
**Rincian Bagian Lancar TP/TGR**  
**31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Audited**

No	Nama	31 Desember TA 2023	31 Desember TA 2022 (Audited)
1	-	-	-
2	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Bagian Lancar  
TPA Rp0,00*

### **C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel C.14**  
**Rincian Bagian Lancar TPA**  
**31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022 Audited**

No	Nama	31-Des-23	31 Desember 2022 (Audited)
1	-	-	-
2	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih-Piutang  
Lancar  
(Rp1.444.661.163)*

### **C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai (Rp1.444.661.163,00) dan (Rp4.892.571,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel C.15**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar**  
**31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022 Audited**

No	Nama	31 Desember TA 2023	31 Desember TA 2022 (Audited)
1	Penyisihan Piutang PNBPN	897.288	(172.951)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	1.443.763.875	(4.719.620)
<b>Jumlah</b>		<b>1.444.661.163</b>	<b>(4.892.571)</b>

Berikut rincian Penyisihan Piutang PNBPN dan Lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih–Piutang PNBPN, terdapat pada 1 satker, yaitu:

Satuan Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan senilai (Rp897.288,00) yang merupakan Jurnal penyisihan atas Pemanfaatan Lahan dalam rangka sewa oleh Koperasi Produsen Loka Mekar Sejahtera dan Sala senilai Rp179.457.500,00 dengan penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp897.288,00.

2. Nilai Penyisihan Piutang Lainnya senilai (Rp4.139.912,00), terdapat pada satker yang memiliki piutang lancar dengan perhitungan  $5/1000$ ;  
Sementara rincian Penyisihan Piutang PNBPN dan Lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 *Audited* dengan rincian sebagaimana berikut:
  1. Nilai Penyisihan Piutang PNBPN, terdapat pada satu satker, yaitu:
    - a. BPPP Medan, merupakan Jurnal akrual atas Pendapatan Yang Masih harus diterima di bulan Desember 2022 yang dimasukkan ke Piutang PNBPN senilai  $Rp33.700.000,00 \times 5/1000 = Rp168.500,00$ .
  2. Nilai Penyisihan Piutang Lainnya, terdapat pada 10 satker, yaitu:
    - a. BPPP Tegal, senilai (Rp12.273,00);  
Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.
    - b. BPPP Bitung, senilai (Rp345.196,00);  
Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.
    - c. Pusat Riset Perikanan senilai (Rp4.000.000,00);  
Merupakan Jurnal atas penginputan piutang lainnya dari PYMHD Temuan BPK RI atas PT. Tata Guna Pratama senilai  $Rp800.000.000,00 \times 5/1000 = Rp4.000.000,00$ .
    - d. BRPL, senilai (Rp7.192,00);  
Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.
    - e. LRPT, senilai (Rp109,00);  
Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.
    - f. BRPBATPP, senilai (Rp16.355,00);  
Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.
    - g. LRBRL, senilai (Rp373,00);  
Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.
    - h. SUPM Pariaman, senilai (Rp7.949,00);  
Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.
    - i. Politeknik KP Sidoarjo, senilai (Rp88.126,00);

Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.

j. Sekretariat BPPSDM KP, senilai (Rp7.772,00);

Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022; dan

k. SUPM Kotaagung, senilai (Rp3.294,00)

Merupakan Pengembalian Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2022.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar senilai (Rp4.657.139,00) terdiri dari penyisihan piutang merupakan pencatatan jurnal akrual atas Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bulan Desember Tahun 2022).

Persediaan  
Rp4.319.503.570

### C.13 Persediaan

Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp4.319.503.570,00 dan Rp5.153.952.632,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jika dibandingkan nilai persediaan pada 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 *Audited* maka nilai persediaan pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 16,19%.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.16**  
**Rincian Persediaan**  
**31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Audited**

Kode	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik/Turun	%
117111	Barang Konsumsi	1.847.175.456	2.125.319.484	(278.144.028)	- 13,09
117113	Barang untuk Pemeliharaan	15.075.779	25.378.953	(10.303.174)	- 40,60
117114	Suku Cadang	14.935.500	263.494.290	(248.558.790)	- 94,33
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	750.000	(750.000)	-100,00
117131	Bahan Baku	385.959.046	13.000.000	372.959.046	2.869
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	21.188.000	757.921.952	(736.733.952)	100
117199	Persediaan Lainnya	2.035.169.789	1.968.087.953	67.081.836	3,41
<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>4.319.503.570</b>	<b>5.153.952.632</b>	<b>(834.449.062)</b>	<b>- 16,19</b>

Barang persediaan pada Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada Laporan Persediaan Tahun Anggaran 2023 berupa barang-barang konsumsi, bahan pemeliharaan dan suku cadang barang kebutuhan perkantoran, bahan baku, Persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga, Persediaan Lainnya, Rincian Barang Persediaan sebagai berikut:

- a. Barang konsumsi merupakan alat-alat tulis kantor bahan komputer alat/atau bahan kebutuhan kantor lainnya, Sembako, minuman serta bahan pakan ikan senilai Rp1.847.175.456,00;
- b. Bahan pemeliharaan merupakan bahan-bahan pemeliharaan perkantoran dan perabot kantor lainnya senilai Rp15.075.779,00;
- c. Suku cadang merupakan suku cadang peralatan laboratorium, peralatan bengkel, suku cadang alat pemeliharaan sebesar Rp14.935.500,00;
- d. Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat senilai Rp21.188.000,00;

Untuk persediaan yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada satker SUPM Bone merupakan kegiatan praktek Siswa yang membentuk bahan jadi dan akan dijual kepada masyarakat dan menghasilkan PNBPN sehingga harus dilakukan input data di aplikasi persediaan karena secara substansi berupa barang persediaan;

- e. Bahan baku berupa tersedia stok bahan kimia, bahan pakan, Bahan Bangunan dan bahan bakar Minyak senilai Rp385.959.046,00; dan
- f. Persediaan lainnya berupa obat-obatan, Persediaan Penelitian (Biota Laut/Ikan, Tanaman, Persediaan Penelitian Biologi, Perikanan, Persediaan Penelitian lainnya), dan komponen peralatan lainnya senilai Rp2.035.169.789,00.



Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama tahun berjalan, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

**Tabel C.17**  
**Rincian Mutasi Persediaan**  
**Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan**  
**Tahun 2023**

KDTRAN	URAIAN TRANSAKSI	NILAI
<b>MUTASI TAMBAH</b>		
M01	Saldo Awal	72.264.800
M02	Pembelian	20.886.041.171
M03	Transfer Masuk	227.042.328
M06	Perolehan Lainnya	958.628.700
M07	Reklas Masuk	18.159.000
P01	Hasil Opname Fisik Lebih	2.053.333.083
	<b>TOTAL</b>	<b>24.928.736.208</b>
<b>MUTASI KURANG</b>		
K01	Pemakaian	24.485.166.510
K02	Transfer Keluar	234.152.328
K05	Barang Rusak	322.417.650
K06	Penghapusan Lainnya	97.901.000
K09	Penyerahan kepada Masyarakat	847.195.200
P02	Hasil Opname Fisik Kurang	2.053.333.083
	<b>TOTAL</b>	<b>26.008.423.088</b>

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini:

Pada laporan persediaan Per 31 Desember 2023 satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdapat mutasi tambah dan kurang, mutasi tambah pada Tahun 2022 merupakan penambahan Saldo Awal, pengadaan baru tahun 2022, mutasi transfer masuk antar satuan kerja lingkup BPPSDM KP, Reklasifikasi Masuk, perolehan lainnya dan hasil Opname Fisik yang dituangkan di dalam berita acara opname fisik persediaan ditandatangani oleh petugas persediaan dan kepala satker.

Mutasi kurang pada Tahun 2023 merupakan pemakaian persediaan pada tahun berjalan, koreksi kurang persediaan, reklasifikasi keluar persediaan dan adanya koreksi penyesuaian persediaan serta transaksi transfer keluar antar satker lingkup BPPSDM KP.

Penjelasan transaksi antara lain :

#### **Penambahan Saldo Awal**

- Pada satuan kerja SUPM Bone senilai Rp11.198.300,00 Bahan Pakan lainnya (*Shrimp feed*) sebanyak 31 unit merupakan temuan BPK tahun 2020 atas produk TEFA yang belum diinput kedalam aplikasi persediaan
- Poltek KP Dumai sebesar Rp61.066.500,00 merupakan input saldo awal hasil hibah dari Pemda Riau pada tahun sehingga dicatat ditransaksi Saldo Awal.

#### **Transfer Masuk**

- Satker Poltek KP Jakarta Transfer masuk senilai Rp73.889.388,00 barang persediaan karena proses likuidasi satker BAPPL Serang dan STP Jurluhkan;
- Satker Sekretariat BPPSDM KPKPtransfer masuk senilai Rp23.479.540,00 dari Pusdik KP karena kebijakan I DIPA;
- Satker Pusrisikan transfer masuk dari Pusriskel senilai Rp129.673.400,00 karena adanya kebijakan 1 DIPA.

#### **Hibah Masuk**

Satker BRPPPU Palembang terdapat hibah Masuk senilai Rp172.450.000,00 merupakan hibah dari CSR Pertamina sesuai perjanjian Hibah antara PT. Pertamina dengan Balai Riset Perikanan Perairan Umum Nomor:114/PKS/N000E0/2020-S0 dan Nomor:13364/BPPSDM KP-BRPPUPP/KS.300/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020.

#### **Perolehan Lainnya**

- BRPPUPP Palembang terdapat perolehan lainnya senilai Rp341.000,00 merupakan benih ikan hasil penelitian Induk ikannya dari CSR Pertamina;
- Poltek KP Dumai terdapat perolehan lainnya senilai Rp74.807.700,00 merupakan merupakan hasil reklas aset tetap dengan nilai perolehan dibawah 1 juta;
- Poltek KP Sidoarjo terdapat perolehan lainnya senilai Rp83.064.900,00 merupakan barang konsumsi hasil olahan produk TEFA;
- BRPPBAP Maros perolehan lainnya senilai Rp31.700.000,00 input sisa hasil penelitian benih ikan baronang sebanyak 1.500 ekor senilai Rp3.000.000,00; udang windu sebanyak 800.000 ekor senilai Rp18.400.000,00;
- Poltek KP Bone perolehan lainnya senilai Rp128.352.000,00 dari hasil pembesaran ikan produk TEFA yang diinput untuk dilakukan penjualan menjadi PNBP;
- Poltek KP Jembrana perolehan lainnya senilai Rp16.776.000,00;

- Pusat Riset Perikanan perolehan lainnya senilai Rp24.228.900,00;
- STP Jakarta perolehan lainnya senilai Rp594.087.200,00 input hasil produk Tefa; dan
- SUPM Bone perolehan lainnya senilai Rp5.271.000,00 input hasil berupa produk olahan dari bahan baku persediaan yang menghasilkan PNBP seperti Bandeng Tanpa Duri (BATARI) dan Bakso Ikan.

#### **Koreksi Tambah**

- Satker BBRSEKP terdapat koreksi tambah senilai Rp66.000,00 untuk koreksi harga satuan barang semula Rp6.600,00 menjadi Rp66.000,00.

#### **Hasil Opname Fisik lebih**

- BPPP Banyuwangi terdapat *opname* fisik lebih senilai Rp50.102.500,00 barang konsumsi, persediaan lainnya, dan barang persediaan strategis untuk berjaga-jaga;
- LRSDKP terdapat *opname* fisik lebih senilai Rp960.000,00 berupa barang konsumsi;
- BRBIH Depok terdapat *opname* fisik lebih senilai Rp118.503.900,00 bahan baku, barang konsumsi, persediaan lainnya dan bahan untuk pemeliharaan;
- BRPI terdapat *opname* fisik lebih senilai Rp150.237.316,00 berupa Bahan baku dan persediaan lainnya (Ikan, Udang, Plasma Nutfah, Laboratorium, dan Pakan); dan
- Poltek KP Sorong terdapat *opname* fisik lebih senilai Rp330.000,00 berupa bahan baku.

#### **Hasil Opname Fisik Kurang**

- BRPI terdapat *opname* fisik kurang senilai Rp1.419.305.425,00; dan
- BRIH Depok terdapat *opname* fisik kurang senilai Rp456.277.900,00.

#### **Transfer Keluar :**

- Satker Pusdik KP Transfer Keluar senilai Rp23.479.540,00 ke satuan kerja Sekretariat BPPSDM KPKP sesuai Berita Acara Serah Terima nomor 125/BPPSDM KP.4/PL.930/VI/2022 tanggal 02 September 2022;
- STP Jurulukan Bogor transfer keluar senilai Rp73.889.388,00 ke Poltek KP Jakarta;
- BRPI transfer keluar senilai Rp2.160.000,00 ke Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi;
- BRPPBAT Bogor transfer keluar senilai Rp4.950.000,00; dan

- Pusriskel transfer keluar senilai Rp129.673.400,00 ke Pusriskan.

#### **Penyerahan Kepada Masyarakat**

- Satker SUPM BONE senilai Rp13.596.000,00 penjualan produk hasil TEFA berupa bibit ikan;
- Poltek KP Bone senilai Rp128.352.000,00 penjualan hasil pembiakan Ikan;
- STP Jakarta senilai Rp594.087.200,00 penjualan hasil budidaya Ikan;
- SUPM Sorong senilai Rp110.610.000,00 prodak hasil olahan praktek siswa; dan
- BPPP Banyuwangi senilai Rp550.000,00 merupakan belanja meterai yang tercatat di kode persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.

#### **Penghapusan Lainnya**

- Satker BBRBLPP Gondol terdapat persediaan yang dihapuskan karena sudah rusak senilai Rp85.070.000,00 merupakan persediaan lainnya; dan
- Pusat Riset Perikanan terdapat persediaan yang dihapuskan karena sudah rusak senilai Rp12.831.000,00 merupakan persediaan lainnya.

#### **Barang Rusak**

- Satker BBRBLPP Gondol terdapat persediaan barang rusak senilai Rp297.750.000,00 merupakan persediaan lainnya;
  - Satker Poltek KP Dumai terdapat persediaan barang rusak berat senilai Rp7.176.000,00 merupakan persediaan suku cadang;
  - Satker Poltek KP Sidoarjo terdapat persediaan barang rusak berat senilai Rp10.241.650,00 merupakan persediaan barang konsumsi; dan
- Satker SUPM Bone terdapat persediaan barang rusak berat sebesar Rp7.250.000,00 merupakan persediaan lainnya.

*Tagihan TP/TGR  
Rp201.014.544*

#### **C.14 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp201.014.544,00 dan Rp156.824.545,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya

atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 *Audited* adalah sebagai berikut:

**Tabel C.18**  
**Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Tahun 2023 dan 2022 *Audited***

No	Debitur	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Sekretariat Badan	156.824.545	156.824.545
2	SUPM Pontianak	44.190.000	-
3	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>201.014.545</b>	<b>156.824.545</b>

Berikut adalah rincian pembayaran Rincian Tagihan TP/TGR Tahun 2023 dan 2022 *Audited*, antara lain:

1. Pada Tahun 2019 terjadi pelanggaran kontrak tugas belajar atas nama **Sdr. Heri Rusli. SH.** staf pada Ditjen PDSPKP yang beralamat di De Diva Residence Blok B7. Jl. Aselih Ciganjur, Jakarta dengan total senilai Rp161.370,000,00. Kerugian Negara tersebut telah diserahkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor SP3N-309/PUPNc.10.02/2019 tanggal 16 Juli 2019. Kemudian Piutang Negara atas Pelanggaran Kontrak Tugas belajar tersebut agar dapat dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan satker terkait. yaitu Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai akun Piutang dalam Laporan Keuangan BPPSDM KPKP karena terdapat anggaran beasiswa pada Satker tersebut. Informasi terakhir yang kami dapatkan. telah dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. Heri Rusli. SH sebanyak 2 kali oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II yaitu pada tanggal 16 Juli 2019 dengan nomor surat S-1735/WKN.07/ KNL.02/2019 dan tanggal 21 Agustus 2019 dengan nomor surat S-2015/WKN.07/ KNL.02/2019. Apabila Sdr. Heri Rusli. SH tidak datang/berhalangan hadir pada pemanggilan yang kedua. maka akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut oleh KPKNL Jakarta II. Pada tanggal 23 Februari 2022, Sdr. Heri Rusli melakukan pembayaran cicilan melalui mekanisme transfer tunai senilai Rp4.545.455,00 sesuai Nomor : SPB-

005/WKN.07/KNL.02.06/2022 Tanggal 23 Februari 2022 dengan NTPN: B02970N9VHJFLPEA.

## 2. SUPM Pontianak

Merupakan pencatatan atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berasal dari Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jendral Bidang V (lima) KKP (Kementerian Kelautan Dan Perikanan) Pada tanggal 10 Maret 2023 Nomor R.112/ITJ.5/HP.230/III/2023 terdapat TGR (Tuntutan Ganti Rugi) terhadap Pegawai SUPM Pontianak atas nama Bapak FF, S.Pi sebesar Rp44.190.000,00 (Empat puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atas pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara).

Nilai Setoran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No	Transaksi	Nilai Setor		Tanggal Setor	Akun	NTPN
		Debet	Kredit			
1	Piutang Baru - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	66.240.000		-	425791	-
2	Penerimaan atas pemanfaatan BMN		10.000.000	28/04/2023	425139	06E307QLUFM0E0LK
3	Setoran TGR a.n. Fuad Fudoli		2.050.000	20/09/2023	425791	138B93CIFB9FV0P
4	Cicilan TGR a.n. Fuad Fudoli		6.000.000	23/10/2023	425791	15ACC7QLUG8G4UQM
5	Pemanfaatan BMN		4.000.000	23/06/2023	425139	F395255DF05DIKF5
6	Penegmbalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu		30.000.000	27/04/2023	425918	F68A61JNFLM0G9FJ
7	Penerimaan Kembali Belanja Lain -lain		4.450.000	07/07/2023	425918	015358N3EAHER3DJ

Pada tanggal 3 Agustus 2023 kami menerima surat Penyampaian Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dari Pihak KPPN dengan Nomor S1045/KPN.1701/2023, bahwa Akun yang digunakan untuk menyetorkan TGR a.n. Bapak FF, S.Pi menggunakan Akun penerimaan milik BUN sehingga di sarankan untuk mengajukan usulan revisi penggunaan Akun setoran TGR menjadi Akun 425791 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Pada Aplikasi SAKTI muncul Notifikasi *To Do List* pada Modul Piutang.

Pada saat berkoordinasi ke KPPN terkait revisi Akun tersebut diketahui oleh pihak KPPN melalui *Front Office* bahwa TGR tersebut merupakan Piutang, sehingga diharuskan melakukan *Settlement* terkait Notifikasi *To Do List* tersebut.

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0,00

## C.15 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

**Tabel C.19**  
**Rincian Tagihan TPA**  
**31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022 Audited**

No	Debitur	31 Desember TA 2023	31 Desember TA 2022 (Audited)
1		-	-
2		-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang Jangka  
Panjang  
(Rp157.045.495)*

### **C.16 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *Audited* adalah masing-masing senilai (Rp157.045.495,00) dan (Rp156.824.545,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang yang terjadi pada satker Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan atas pelanggaran kontrak tugas belajar atas nama Sdr. Heri Rusli, SH. staf pada Ditjen PDSPKP senilai (Rp156.824.545,00) dengan perhitungan penyisihan sebesar 100%.

Merupakan pencatatan penyisihan atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berasal dari Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jendral Bidang V (lima) KKP (Kementerian Kelautan Dan Perikanan) Pada tanggal 10 Maret 2023 Nomor R.112/ITJ.5/HP.230/III/2023 terdapat TGR (Tuntutan Ganti Rugi) terhadap Pegawai SUPM Pontianak atas nama Bapak FF, S.Pi sebesar Rp44.190.000,00 menjadi Rp220.950,00 atas pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara)

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

**Tabel C.20**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	156.824.545	100,00%	156.824.545
<b>Jumlah</b>	<b>156.824.545</b>		<b>156.824.545</b>
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>156.824.545</b>		<b>156.824.545</b>

Tanah  
Rp6.128.393.182.  
900,00

### C.17 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *Audited* adalah senilai Rp6.128.393.182.900,00 dan Rp6.128.307.466.100,00. (rincian dilaporkan SIMAK BMN Tahun 2022 *Audited*)

Jika dibandingkan pada Tahun Anggaran 2022 dengan 2022 *Audited* untuk aset tetap berupa tanah mengalami kenaikan sebesar 0.01 persen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel C.21**  
**Rincian Tanah**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
1	Tanah	6.128.393.182.900	6.128.307.466.100	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.128.393.182.900</b>	<b>6.128.307.466.100</b>	<b>0,00</b>

Saldo Tanah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.181.312.735.929,00 seluas 7.296.905 m<sup>2</sup>. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah per 31 Desember 2022 *Audited* sebesar Rp6.180.217.355.723,00 seluas 7.133.011 m<sup>2</sup>,- mutasi tambah sebesar Rp541.623.238.496,00 seluas 439.362 m<sup>2</sup> dan mutasi kurang sebesar Rp476.275.089.000,00 seluas 275,468 m<sup>2</sup> jumlah tersebut terdiri atas:

Saldo Per 31 Desember 2023	7,296,905	6.181.312.735.929
Saldo Per 31 Desember 2022	7,133,011	6,180,217,355,723



<b>Penambahan :</b>		
<b>TANAH</b>	<b>7,296,905</b>	<b>6,245,565,505,219</b>
Saldo Awal	7,133,011	6,180,217,355,723
Koreksi Saldo Awal	20,050	508,602,000
Transfer Masuk	419,312	540,527,358,290
Pengembangan Nilai Aset	0	587,278,206
	<b>439,362</b>	<b>541,623,238,496</b>
<b>Pengurangan :</b>		
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	4,056	500,000
Transfer Keluar	271,412	476,274,589,000
	<b>275,468</b>	<b>476,275,089,000</b>

Mutasi Transaksi Tambah dan Kurang antara lain:

#### **Penjelasan Koreksi Tambah :**

##### **Koreksi Saldo Awal**

- Input Saldo Awal di SUPM Waiheru terdapat hibah tanah tambak untuk Pendidikan Kelautan dan Perikanan tahun 2018 merupakan hibah dari masyarakat seluas 20.050 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Leamahu Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat Prov. Maluku sebesar Rp508.602.000 (bukti surat pelepasan hak dari masyarakat), untuk sertifikat sudah diajukan dari tahun 2018 dan pada tahun 2022 telah diterbitkan sertifikat an, Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas dasar sertifikat tersebut maka tanah di catat menjadi BMN di satker SUPM Waiheru.

##### **Transfer Masuk**

- Pada Satker Poltek KP Jakarta terdapat transfer masuk berupa tanah seluas 271.412 m<sup>2</sup> Merupakan transfer masuk dari satker yang terkena likuidasi kebijakan 1 DIPA tahun 2019 yaitu satker Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Serang seluas 208.382 m<sup>2</sup> dan satker Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor seluas 63.030 m<sup>2</sup>

##### **Pengembangan Nilai Aset**

- SUPM Tegal terdapat pengembangan nilai tanah berupa pekerjaan Amdal untuk Pembangunan PoltekKP Tegal dari belanja 53 sebesar sebesar Rp 587.278.206

#### **Penjelasan Koreksi Kurang :**

##### **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas**

- Pada satker BRBIH terdapat koreksi kurang luasan tanah golongan III seluas 4.056 m<sup>2</sup> yang sudah dialihkan kepada pihak ketiga/dibeli sesuai dengan hak beli, proses pemecahan sertifikat sudah diusulkan dan masih dalam proses di BPN.

##### **Transfer Keluar**

- Satker BAPPL Serang transfer Keluar Tanah Pendidikan dan Pelatihan ke Poltek KP Jakarta, karena kebijakan 1 DIPA sehingga satker BAPPL Serang di Likuidasi
- Satker Jurluhkan Bogor transfer Keluar Tanah Pendidikan dan Pelatihan ke Poltek KP Jakarta, karena kebijakan 1 DIPA sehingga satker Jurluhkan Bogor di Likuidasi

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan:

##### **Terdapat Aset Tanah yang belum bersertifikat :**

1. Satker LRBRL Gorontalo terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah hasil hibah BMD dari Pemrov. Gorontalo yang dikuasai/ditatausahakan, yaitu belum adanya bukti kepemilikan tanah pada dua bagian tanah. Total luas tanah yang belum ada bukti kepemilikannya yaitu 125.691 m<sup>2</sup>. Hingga saat ini proses penyelesaian masih tetap dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait seperti Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
  - a. Bidang 1 dengan luas 68.776 M<sup>2</sup>, dimana terdapat tanah yang dibeli/dibebaskan oleh LRBRL tahun 2014 seluas 1.314 M<sup>2</sup> dan tanah yang masih milik pemprov Gorontalo seluas 6.194 M<sup>2</sup>
  - b. Bidang II dengan Luas 115.021, dimana dalam bidang tanah tersebut terdapat tanah seluas 58.106 M<sup>2</sup> masih milik Pemprov. Gorontalo yang belum diserahkan.

2. Tanah SUPM Negeri Ladong dengan luas total 153.053 m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:
  - Luas tanah 51.909 m<sup>2</sup> An. Pemerintah RI Cq. Kementerian KKP Luas tanah 81.635 m<sup>2</sup> An. Pemda Aceh
  - Luas tanah 12.010 m<sup>2</sup> An. Pemda Aceh, Luas tanah 5.500 m<sup>2</sup> An. Pemda Aceh, Luas tanah 1.999 m<sup>2</sup> An. Pemda Aceh (Akta Jual Beli).Tanah yang saat ini masih bersertifikat An. Pemda Aceh dan telah disampaikan permohonan hibah oleh BPPSDM KP-KP dengan nomor surat 27/BPPSDM KP/I/2019 Tanggal 8 Januari 2019.
4. Tanah SUPM Waiheru seluas 3 Ha yang berlokasi di Desa Waiheru, Kec. Baguala Kota Ambon Prov. Maluku, belum bersertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan masih terdapat gugatan dari masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
5. Aset Tanah pada Satker Pusat Riset Kelautan yang berlokasi di Desa Juanga Kec. Morotai Selatan, Kb. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara seluas 60.000 m<sup>2</sup> belum bersertifikat disebabkan belum tersedia naskah hibah.

#### **Terdapat sengketa aset tanah yang belum terselesaikan**

1. Tanah SUPM Waiheru seluas 3 Ha berdasarkan surat Naskah Perjanjian Hibah No.421.3.431 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku pada tanggal 19 Januari 2016 terdapat laporan atas nama kantor Advokat & Konsulting Hukum SMR & Partner yang disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku menyangkut adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku terkait dengan tuntutan ganti rugi ahli waris Syech Saleh Bin Said Atamimi. Saat ini masih dalam proses Persidangan.
2. Tanah BRPPUPP yang berlokasi di Jakabaring seluas 2 Ha, berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 dengan latar belakang atau alasan karena pada saat itu BRPPUPP telah mendapat tugas tambahan sebagai Sentra Penelitian dan Pengembangan Perikanan Perairan Umum Regional maupun Internasional yang terbentuk dalam lembaga *Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC)*, pada tanggal 22 Januari 2013 ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Kelautan

dan Perikanan Nomor 900/00156/BPKAD/2013 dan Nomor 83/SJ/I/2013 seluas 2 Ha; Peta Bidang Tanah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Silaberanti, atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tanggal 12 April 2013, Surat Ukur Nomor 66/Silaberanti/2013, tanggal 8 April 2013, saat ini terdapat gugatan melawan hukum dari ahli waris Alm. MUSTOFA HARIBUN, BA dan Ahli waris Alm.A. KORIE MUID, dan sampai akhir Desember 2018 telah dilakukan sidang yang ke-25 kali.

#### **Terdapat Aset Tanah yang belum terselesaikan prosesnya:**

1. Bangunan Poltek Sidoarjo masih berdiri di atas tanah pinjam pakai berdasarkan Surat Perjanjian nomor 593/3155/404.3.15/2015 tanggal 18 September 2015 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, sudah mengajukan surat ke Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur untuk kemungkinan aset tersebut untuk di dapat dihibahkan, akhir Tahunan 2018 telah dibahas langkah konkrit penyelesaian status tanah Politeknik KP Sidoarjo dengan komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa opsi apakah berupa hibah, tukar guling, pembelian, maupun opsi yang lain.

#### **Terdapat Aset Tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga:**

Aset tanah pada satker SUPM Pariaman seluas 52.425 m<sup>2</sup> senilai Rp157.275.000,00 yang berlokasi di Nagari Campago, Kec. V Koto Kampung dalam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat Lokasi tanah telah dibangun oleh Masyarakat untuk tempat tinggal.

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp1.455.058.616.  
217*

#### **C.18 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.455.058.616.217,00 dan Rp1.440.095.303.784,00.

Nilai Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan senilai Rp14.963.312.433,00 atau 1,04 persen dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
1	Peralatan dan Mesin	1.455.058.616.217	1.440.095.303.784	1,04
<b>Jumlah</b>		<b>1.455.058.616.217</b>	<b>1.440.095.303.784</b>	<b>1,04</b>

Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.455.058.616.217,00 sebanyak 124.637 unit Terdiri dari saldo per 31 Desember 2022 *audited* adalah Rp1.440.095.303.784,00 sebanyak 124.637 unit mutasi tambah sebesar Rp123.645.380.650,00 sebanyak 16.012 unit, mutasi kurang sebesar Rp145.853.378.120,00 sebanyak 33.304 unit

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Mutasi Tambah/Kurang dari Peralatan dan Mesin

<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2023</b>	<b>107.345</b>	<b>1.440.075.430.784</b>
<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2022</b>	<b>124.637</b>	<b>1.446.800.843.908</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
Batal Transfer Keluar	308	7.943.356.023
Hibah Masuk	422	7.980.567.916
Koreksi Saldo Awal	2.463	5.455.217.080
Pembelian	1.184	10.726.828.338
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	346.360.963
Koreksi Perubahan Kondisi	0	0
Koreksi Susulan		15.000.000
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan	3	130.600.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	2.984.500.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	411	4.449.719.691
Perolehan Lainnya	2.483	6.830.837.040
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	2	35.882
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	7.606	23.950.864.353
Reklasifikasi Masuk	18	1.855.342.932
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	16	9.168.300
Transfer Masuk	1.506	55.416.701.823
<b>Total</b>	<b>16.012</b>	<b>123.645.380.650</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Koreksi Pencatatan	2.797	8.489.817.818
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	5.107.690.844
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	12.531	34.211.243.829
Penghapusan	8.632	728.853.533
Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	2	35.882
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	7.606	23.950.864.353
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	3	130.600.000
Reklasifikasi Keluar	14	1.295.794.132
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	113	24.225.300

Transfer Keluar	1.606	71.914.252.429
<b>Total</b>	<b>33.304</b>	<b>145.853.378.120</b>

Sedangkan uraian mutasi Peralatan dan Mesin per kelompok disajikan dibawah ini:

<b>Hibah Masuk</b>		
Pusat Riset Perikanan	7.980.567.916	Hibah berupa peralatan dan mesin sejumlah 422 unit
<b>Koreksi Saldo Awal</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	46.827.000	Penambahan saldo awal berupa rod blower
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	307.748.280	Penambahan saldo awal berupa sarpras penyuluh sejumlah 23 unit sepeda motor dari Kabupaten Barru
Politeknik KP Karawang	5.100.641.800	Penambahan saldo awal berupa mebelair sejumlah 2.439 unit
<b>Pembelian</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	74.910.000	Pembelian 1 unit centrifugal pump dan 2 unit portable water pump
BPPP Ambon	239.455.000	Pembelian alat pemanas prosesing (water heater), submersible pump, komponen/alat pengolah data, dan treng air/tandon air
BPPP Banyuwangi	3.172.916.740	Pembelian alat simulator Pendidikan, genset, laptop, printer, dan water treatment
BPPP Bitung	49.228.500	Pembelian ac split dan mebelair
BPPP Medan	80.364.000	Pembelian alat peraga pelatihan lainnya dan alat produksi perikanan lainnya
BPPP Tegal	724.480.410	Pembelian a.c. split, alat kedokteran poliklinik lainnya, alat Kesehatan umum lainnya, alat pelindung lainnya, alat uji tekan hydrstastic, evaporator, explosive detector, motor penarik/speed boat, p.c unit, sound system, televisi, mebelair lainnya, inflatable life craft, Kasur, lemari es, meja makan kayu, mesin cuci, neon box, dan sterilisator
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	108.539.988	Pembelian air conditioning, Kasur, dan loudspeaker
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	127.202.570	Pembelian ac split, alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya, blower, do meter, drone, genset, pompa air, pompa portable, dan water quality checker
Politeknik KP Bitung	141.500.000	Pembelian kursi besi/metal, tabung pemadam api, dan tempat tidur besi
Politeknik KP Bone	401.399.735	Pembelian alat bantu lainnya, alat pendingin lainnya, aerator, blowe, laptop, lemari besi/metal, submersible pump, televisi, dan portable air conditioner (alat pendingin)
Politeknik KP Jembrana	52.593.840	Pembelian alat bilyard, alat tenis meja, mesin pemotong rumput, raket tenis, sepeda olahraga, sepeda statis, traksi set + gantungan beban, dan treadmill
Politeknik KP Kupang	325.914.000	Pembelian LCD Projector, personal computer lainnya, printer, scanner, dan tempat tidur besi

Politeknik KP Pangandaran	155.961.300	Pembelian meja kerja kayu, mesin cuci, mesin proses lainnya, oven listrik, thermocouple, dan water treatment
Politeknik KP Sidoarjo	1.059.736.632	Pembelian cold storage (alat pendingin), ac split, air curtain, freezer, mesin pemotong rumput, pallet plastic, rak besi, strip macking machine, dan tangga aluminium
Politeknik KP Sorong	398.300.000	Pembelian control panel, kamera, kursi besi/metal, laci box, lemari besi/metal, meja dorong saji/trolley saji, meja kerja kayu, meja rapat, portable air conditioner, rice cooker, telepon satelit, televisi, tempat tidur kayu, dan tv monitor
Pusat Pendidikan KP	654.200.000	Pembelian mini bus, note book, printer, dan scanner
Politeknik AUP	125.258.505	Pembelian computer synergie, laptop case, mini computer, perkakas AC, dan printer
SUPM Kupang	65.080.000	Pembelian Kompas, pompa air, portable air conditioner, rak besi, dan water filter
SUPM Kota Agung	296.191.000	Pembelian kursi besi/metal, meja kerja kayu, meja komputer, dan tempat tidur besi
SUPM Ladong	706.906.000	Pembelian meja rapat, mesin las listrik, mesin potong, rak besi, air conditioning, alat peraga pealtihan lainnya, camera digital, cctv, filling cabinet besi, gordyin/kray, kursi zeis, alptop, lemari besi/metal, meja kerja kayu, microphone, mixer sound system, pc unit, pompa air, sofa, televisi, treng/tandon air, dan water treatment
SUPM Pariaman	50.200.000	Pembelian GPS dan Tabung Pemadam Api
SUPM Pontianak	112.825.950	Pembelian dispenser, emersion suit, filing cabinet besi, full body harness, inflatable life craft, lemari besi/metal, life jacket, masker breathing apparatus, pakaian pelindung, dan sound system
SUPM Tegal	101.499.000	Pembelian audio mixing portable, notebook, personal computer lainnya, scanner, televisi, wireless, camera video, komponen/alat pengolah data, UPS, dan wireless access point
SUPM Waeheru	232.334.100	Pembelian lampu dan tempat tidur besi
Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia	1.269.831.068	Pembelian alat rumah tangga lainnya, coffee maker, handy talku, lemari es, peralatan olahraga lainnya, printer, video conference, CPU, kursi besi metal, notebook, sedan, dan voice recorder
<b>Perolehan Lainnya</b>		
BPPP Medan	90.714.000	Perolehan lainnya alsin yang tidak berasal dari belanja 53
Politeknik KP Bitung	384.000.000	Perolehan lainnya kapal penangkap ikan yang merupakan barang rampasan
Politeknik KP Dumai	5.800.000	Perolehan lainnya berupa rak dapur
Politeknik KP Karawang	5.100.643.800	Perolehan lainnya atas alsin yang salah pencatatan
Politeknik KP Kupang	38.622.200	Perolehan lainnya berupa kunci khusus pembuka mur, mesin bor

		listrik tangan, mesin diesel, mesin gerinda tangan, dan pompa air
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan	114.087.040	Perolehan lainnya berupa Motor sebanyak 8 unit dari Kabupaten Barru pada bulan Agustus 2022 yang merupakan proses peralihan sarpras penyuluhan KP dari Pemerintah Daerah ke KKP sebagai pelaksanaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
SUPM Pariaman	660.472.000	Perolehan lainnya berupa kapal penangkap ikan yang merupakan barang rampasan
SUPM Sorong	28.498.000	Perolehan lainnya berupa kapal penangkap ikan yang merupakan barang rampasan
SUPM Waeheru	408.000.000	Perolehan lainnya berupa kapal pengangkut ikan yang merupakan barang rampasan
<b>Penyelesaian Pembangunan Dengan Kdp</b>		
BPPP Banyuwangi	2.984.500.000	Penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa alat simulator pendidikan
<b>Transfer Masuk</b>		
BPPP Banyuwangi	623.112.000	Transfer masuk berupa laptop, pc unit, printer dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta kapal patroli pantai dari LRSDKP Bungus
BPPP Bitung	825.295.200	Transfer masuk berupa a.c. split, Kasur/spring bed, laptop, lcd projector/infocus, meja kerja kayu, pc unit, portable air conditioner, printer, dan sound system dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
BPPP Tegal	52.202.558.378	Transfer masuk alsin dari Pusat Riset Kelautan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	750.165.700	Transfer Masuk dari Puslatluh berupa peralatan dan mesin (Intrakomptabel : Rp.750.165.700,-) peruntukan di Ruang Rapat dan Ruang Aula dengan Nomor BA: 166/BPPSDM KP.5/PL.720/VI/2022
Balai Riset Budidaya Ikan Hias	19.995.000	Transfer masuk berupa blower dan pompa portable dari BRPBATPP Sempur
Balai Riset Pemuliaan Ikan	87.215.570	Transfer masuk berupa ac split, alat pemeliharaan tanaman/ikan.ternak lainnya, drone, pompa air, dan water wuality checker dari BRPBATPP Sempur
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	36.425.000	Transfer masuk berupa laptop, pc unit, dan printer dari Puslatluh
Politeknik KP Pangandaran	201.887.000	Transfer masuk bak fiberglass, corong, miniature, perahu cano Canadian, mini bus, miniature, peralatan olahraga air lainnya, dan tabung gas dari BDA Sukamandi
Politeknik KP Dumai	110.355.000	Transfer masuk berupa mini bus dari Pusdik
Politeknik KP Karawang	49.720.000	Transfer masuk Kasur/spring beda dan tempat tidur kayu
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	509.972.975	Transfer masuk berupa bangku Panjang besi/metal, kursi besi/metal, kursizeis, dan meja rapat



<b>Reklasifikasi Masuk</b>		
Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi	3.267.000	Reklas masuk dari persediaan berupa peralatan selam lainnya
BPPP Ambon	38.280.000	Reklas masuk berupa pc unit
BPPP Banyuwangi	1.276.500	Reklas masuk timbangan badan dari persediaan
BPPP Bitung	19.513.800	Reklas masuk kipas penggerak angin
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	39.049.995	Reklas masuk ac split dan alat bantu lainnya
Politeknik KP Bone	539.815.000	Reklas masuk alat produksi perikanan lainnya
Politeknik KP Karawang	3.914.137	Reklas masuk meja resepsionis
Politeknik KP Kupang	1.831.500	Reklas masuk pompa air dari persediaan
SUPM Bone	105.050.000	Reklas masuk menjadi alat bantu lainnya dari speed boat/motor tempel
SUPM Pontianak	1.109.500.000	Reklas masuk menjadi alat penolong lainnya dari long boat
Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia	1.090.500	Reklas masuk external/portable hardisk dari persediaan
<b>Koreksi Susulan</b>		
BPPP Tegal	15.000.000	Koreksi susulan atas motor peanrik/speed boat yang salah pencatatan di modul komitmen
<b>Koreksi Pencatatan Nilai</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	112.110.000	Koreksi pencatatan nilai bertambah untuk alat angkutan apung bermotor lainnya dan portable water pump yang akan diserahkan ke BRIN
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	5.400.000	Koreksi pencatatan nilai berkurang pada UPS akibat normalisasi K3
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	226.215.000	Koreksi pencatatan nilai bertambah pada current meter akibat normalisasi K3
Politeknik KP Karawang	5.102.290.745	Koreksi pencatatan nilai berkurang pada alat lab lainnya dan mebelai lainnya
Politeknik KP Karawang	8.035.963	Koreksi pencatatan nilai bertambah pada alat lab lainnya, lemari besi/metal, dan meja resepsionis
Pusat Riset Perikanan	99	Koreksi pencatatan nilai berkurang pada system/power supply lainnya akibat normalisasi K3
<b>Koreksi Pencatatan</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	71.228.000	Koreksi pencatatan nilai/kuantitas rod blower yang akan diserahkan kepada BRIN
BPPP Ambon	186.215.000	Koreksi pencatatan treng/tandon air karena kesalahan pencatatan awal di modul komitmen (awalnya berupa KDP tetapi dicatat bukan dengan kode KDP)
BPPP Medan	80.364.000	Koreksi pencatatan alat peraga pealtihan lainnya dan alat produksi perikanan lainnya akrena kesalahan pencatatan awal di modul komitmen yang mealkukan penginputan secara gelondongan

BPPP Tegal	60.480.000	Koreksi pencatatan berupa motor penarik/speed boat dan televisi
BPPP Banyuwangi	2.984.500.000	Koreksi pencatatan setelah KDP menjadi aset berupa alat simulator Pendidikan dimana pada pencatatan awal di modul komitmen dicatat sebagai pembelian bukan KDP
Politeknik KP Karawang	5.107.030.818	Koreksi pencatatan alat bilyard, kursi besi/metal, alat lab lainnya, lemari besi/metal, lemari kayu, locker, meja kerja besi/metal, meja kerja kayu, meja makan kayu, meja rapat, rak besi, dan sofa karena salah pencatatan jumlah NUP
<b>Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	71.914.252.429	Transfer keluar ke BRIN
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	135.922.000	Transfer Keluar ke Poltek Pangandaran Berupa Peralatan dan Mesin berupa Sarana dan Prasarana dengan Nomor BA: 704 / BPPSDM KP-BDA / PL.912 / V / 2022
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	107.210.570	Transfer keluar ke BRBIH dan BRPI
Balai Riset Perikanan Laut	79.200.000	Transfer keluar partisi ke BRIN
Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	21.686.000	Transfer keluar ke PSDKP berupa 6 unit a.c. split
Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	586.687.000	Transfer keluar berupa kapal patroli pantai ke BPPP Banyuwangi
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	1.923.677.900	Transfer keluar ke BPPP Bitung, BPPP Banyuwangi, BDA Sukamandi, dan BRPBAPP
Pusat Pendidikan KP	226.040.000	Transfer keluar mini bus ke Politeknik KP Dumai dan Politeknik KP Pangandaran
Pusat Riset Perikanan	51.927.191.378	Transfer keluar ke BPPP Tegal dari Pusat Riset Kelautan
<b>Reklasifikasi Keluar</b>		
Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi (Ak Kp Wkaatobi)	24.225.300	Reklasifikasi keluar peralatan senam lainnya ke persediaan
BPPP Ambon	38.280.000	Reklasifikasi keluar komponen/alat pengolah data menjadi pc unit
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	39.049.995	Reklasifikasi keluar air conditioning dan speed boat/motor tempel
Politeknik KP Karawang	3.914.137	Reklasifikasi keluar meubelair lainnya
SUPM Bone	105.050.000	Reklas keluar speedboat/motor tempel menjadi alat bantu lainnya
SUPM Pontianak	1.109.500.000	Reklasifikasi keluar long boat menjadi alat penolong lainnya
<b>Penghentian Aset Dari Penggunaan</b>		
Balai Besar Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	1	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
BPPP Ambon	465.554.545	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
BPPP Tegal	3.712.166.093	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	475.276.755	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	48.475.418	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	281.500.000	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
Balai Riset Perikanan Laut	655.376.405	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	67.947.600	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	448.000.000	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
Politeknik KP Jemberana	125.800.000	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
Politeknik KP Sidoarjo	341.300.000	Penghentian aset berupa alar angkut untuk penghapusan
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	632.785.511	Penghentian aset berupa alar angkut untuk penghapusan
Pusat Pendidikan KP	12.543.750	Penghentian aset rusak berat berupa printer untuk penghapusan
Pusat Riset Perikanan	1.034.453.000	Penghentian aset dari penggunaan
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	5.493.790.398	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
SUPM Bone	1.243.486.997	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
SUPM Kota Agung	5.123.026.434	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
SUPM Ladong	85.276.002	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
SUPM Pontianak	3.593.814.444	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan
SUPM Sorong	110.291.000	Penghentian aset rusak berat untuk penghapusan

Saldo Alat Besar Per 31 Desember 2023 adalah 1.887 unit, sebesar Rp40.060.982.707,00 terdiri dari saldo awal Per 31 Desember 2022 *Audited* adalah 1.768 unit, sebesar Rp44.308.966.107,00 Alat Besar bertambah sebanyak 175 unit, sebesar Rp3.481.135.180,00 dan berkurang sebanyak 297 unit sebesar Rp4.216.539.796,00.

Rincian mutasi Alat Besar pada Per 31 Desember 2023, disajikan dalam tabel berikut ini:

<b>ALAT BESAR</b>	<b>1.887</b>	<b>40.060.982.707</b>
Batal Transfer Keluar	6	817.100.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	50.000
Pembelian	37	317.350.640
Perolehan Lainnya	2	13.375.500
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	40	259.627.256
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	14	6.801.300
Reklasifikasi Masuk	5	119.200.000
Transfer Masuk	71	1.947.630.484
	<b>175</b>	<b>3.481.135.180</b>
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	49	354.809.256
Penghapusan	32	5.700.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	40	259.627.256
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	93	14.572.800

Transfer Keluar	83	3.581.830.484
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	3	3.267.000
	<b>297</b>	<b>4.216.359.796</b>

Transaksi Mutasi Alat Besar terdiri dari:

Batal Transfer Keluar		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	817,100,000	Batal Transfer portable generating set, portable water pump, dan stationary generating set ke BRIN karena kesalahan input nilai perolehan akibat normalisasi K3

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	50.000	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada portable water pump yang akan diserahkan ke BRIN karena kesalahan input nilai perolehan akibat normalisasi K3

Pembelian		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	24.910.000	Pembelian 2 unit portable water pump
BPPP Banyuwangi	79.936.740	Pembelian 13 unit water treatment
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	16.460.300	Pembelian 2 unit pompa air dan 4 unit pompa portable
Politeknik KP Bone	131.300.000	Pembelian 1 unit alat bantu lainnya
Politeknik KP Pangandaran	37.806.600	Pembelian 2 unit mesin proses lainnya dan 1 unit water treatment
SUPM Kupang	11.080.000	Pembelian 6 unit pompa air
SUPM Ladong	9.863.000	Pembelian 1 unit water treatment dan 1 unit pompa air
SUPM Pontianak	5.994.000	Pembelian 4 unit full body harness

Perolehan Lainnya		
Politeknik KP Kupang	13.375.500	Perolehan lainnya berupa 1 unit mesin diesel dan 1 unit pompa air
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		
BPPP Tegal	3.267.000	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 3 unit portable water pump, 3 unit stationary water pump, dan 8 unit submersible pump
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	11.350.000	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 2 unit alat bantu lainnya
Pusat Riset Perikanan	15.550.000	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 1 unit alat pengolahan air kotor lainnya
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	60.775.000	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 9 unit mesin diesel
SUPM Kota Agung	22.550.000	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 5 unit pompa lainnya
SUPM Pontianak	87.637.800	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 1 unit nitrogen servicing, 6 unit pompa air, 1 unit pompa angin, dan 1 unit pompa lumpur

<b>Reklasifikasi Masuk</b>		
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	14.150.000	Reklasifikasi masuk 3 unit alat bantu lainnya
SUPM Bone	105.050.000	Reklasifikasi masuk 2 unit alat bantu lainnya

<b>Reklasifikasi Masuk dari Persediaan</b>		
Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (AK KP Wakatobi)	4.969.800	Reklasifikasi masuk dari persediaan berupa 13 unit peralatan senam lainnya
Politeknik KP Kupang	1.831.500	Reklasifikasi masuk dari persediaan berupa 1 unit pompa air

<b>Transfer Masuk</b>		
BPPP Tegal	1.935.166.184	Transfer masuk dari pusriskel
Balai Riset Budidaya Ikan Hias	3.995.000	Transfer masuk 2 unit pompa portable dari BRPBATPP Sempur
Balai Riset Pemuliaan Ikan	8.469.300	Transfer masuk 2 unit pompa air dari BRPBATPP Sempur

<b>Penghentiaan Aset Dari Penggunaan</b>		
BPPP Tegal	61.764.456	Penghentiaan aset yg rusak berat berupa 3 unit portable water pump, 3 unit stationary water pump, dan 8 unit summersible pump
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	11.350.000	Penghentiaan aset yg rusak berat berupa 2 unit alat bantu lainnya
Pusat Riset Perikanan	15.550.000	Penghentiaan aset yg rusak berat berupa 1 unit alat pengolahan air kotor lainnya
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	60.775.000	Penghentiaan aset yg rusak berat berupa 9 unit mesin diesel
SUPM Kota Agung	22.550.000	Penghentiaan aset yg rusak berat berupa 5 unit pompa lainnya
SUPM Pontianak	87.637.800	Penghentiaan aset yg rusak berat berupa 1 unit nitrogen servicing, 6 unit pompa air, 1 unit pompa angin, dan 1 unit pompa lumpur

<b>Reklasifikasi Keluar ke Persediaan</b>		
Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	14.572.800	Reklasifikasi keluar ke persediaan berupa peralatan senam lainnya

<b>Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	1.634.200.000	Transfer keluar ke BRIN
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	12.464.300	Transfer keluar ke BRBIH dan BRPI
Pusat Riset Perikanan	1.935.166.184	Transfer keluar ke BPPP Tegal

Saldo Alat Angkutan Per 31 Desember 2023 adalah 10.030 unit, sebesar Rp469.618.967.594,00 dengan saldo per 31 Desember 2022 *Audited* adalah 1.505 unit, sebesar Rp469.455.306.931,00. Alat Angkutan bertambah sebanyak 88 unit

sebesar Rp7.296.201.903,00 dan berkurang sebanyak 155 unit sebesar Rp8.126.575.182,00.

Rincian mutasi Alat Angkutan pada Per 31 Desember 2023, disajikan dalam tabel berikut ini:

<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>10.030</b>	<b>469.618.967.594</b>
Batal Transfer Keluar	2	76.364.000
Hibah Masuk	5	104.993.453
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	112.060.000
Koreksi Perubahan Kondisi	0	0
Pembelian	4	1.264.679.760
Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif	3	130.600.000
Perolehan Lainnya	12	1.595.057.040
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	32	2.564.855.370
Saldo Awal	23	307.748.280
Transfer Masuk	7	1.139.844.000
	<b>88</b>	<b>469.455.306.931</b>
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	53	2.736.933.942
Penghapusan	50	172.913.870
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	32	2.564.855.370
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	3	130.600.000
Reklasifikasi Keluar	6	1.228.700.000
Transfer Keluar	11	1.292.572.000
	<b>155</b>	<b>8.126.575.182</b>

Penjelasan Mutasi tambah Alat Angkutan sebagai berikut:

<b>Batal Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	76.364.000	Batal Transfer Keluar 1 unit alat angkutan apung bermotor lainnya dan 1 unit speed boat/motor tempel ke BRIN karena kesalahan nilai perolehan

<b>Hibah Masuk</b>		
Pusat Riset Perikanan	104.993.453	Hibah masuk berupa 5 unit sepeda motor

<b>Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	112.060.000	Koreksi Pencatatan 1 Unit Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya

<b>Pembelian</b>		
Politeknik KP Sidoarjo	11.894.000	Pembelian 2 unit meja dorong saji/trolley saji
Pusat Pendidikan KP	540.000.000	Pembelian 1 Unit Mini Bus
Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	712.785.000	Pembelian 1 unit sedan untuk Kepala Badan

<b>Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif</b>		
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	2.800.000	Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif berupa 1 unit lori dorong dan 1 unit meja dorong saji/trolley saji
Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	127.800.000	Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif berupa 1 unit mini bus

<b>Perolehan Lainnya</b>		
Politeknik KP Bitung	384.000.000	Perolehan lainnya 1 unit kapal penangkap ikan yang merupakan barang rampasan kejaksaan
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	114.087.040	Perolehan lainnya 8 unit sarpras penyuluh berupa Sepeda Motor
SUPM Pariaman	660.472.000	Perolehan lainnya 1 unit kapal penangkap ikan yang merupakan barang rampasan kejaksaan
SUPM Sorong	28.498.000	Perolehan lainnya 1 unit kapal penangkap ikan yang merupakan barang rampasan kejaksaan
SUPM Waeheru	408.000.000	Perolehan lainnya 1 unit kapal pengangkut ikan yang merupakan barang rampasan kejaksaan

<b>Saldo Awal</b>		
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	307.748.280	Saldo awal berupa sarpras penyuluh roda 2 dari 13 kabupaten dengan total 23 kendaraan roda 2

<b>Transfer Masuk</b>		
BPPP Banyuwangi	586.687.000	Transfer masuk 1 unit Kapal Patroli Pantai dari LRSDKP
BPPP Tegal	327.117.000	Transfer masuk 1 unit Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya. 1 unit jeep. dan 2 unit mini bus dari Pusriskel
Politeknik KP Dumai	110.355.000	Transfer masuk 1 unit mini bus dari Pusat Pendidikan KP
Politeknik KP Pangandaran	115.685.000	Transfer masuk 1 unit mini bus dari Pusat Pendidikan KP

<b>Penghentian aset dari penggunaan</b>		
BPPP Ambon	465.554.545	Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit mini bus
BPPP Tegal	46.700.000	Penghentian Aset Dari Penggunaan Berupa 1 unit Perahu Karet
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	270.225.000	Penghentian Aset Dari Penggunaan Berupa 1 unit Survey Boat
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	281.500.000	Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit mini bus
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	17.956.100	Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit perahu motor tempel
Politeknik KP Jembrana	125.800.000	Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit mini bus

Politeknik KP Sidoarjo	341.300.000	Penghentian Aset Dari Penggunaan Berupa 3 unit Mini Bus
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP	41.453.000	Penghentian Aset Berupa 3 unit Sepeda Motor
Pusat Riset Perikanan	424.950.000	Penghentian Aset Dari Penggunaan Berupa 2 unit Mini Bus dan 1 unit Sepeda Motor
SUPM Bone	72.659.525	Penghentian Aset Berupa 4 unit Sepeda Motor dan 1 unit perahu kare
SUPM Kota Agung	107.500.000	Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit mini bus
SUPM Pontianak	258.966.200	Penghentian Aset Dari Penggunaan Berupa 1 unit Mini Bus dan 5 unit Sepeda Motor
SUPM Sorong	110.291.000	Penghentian Aset Dari Penggunaan Berupa 1 unit Mini Bus dan 2 unit Sepeda Motor

Reklasifikasi Keluar		
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	14.150.000	Rekalsifikasi keluar 3 unit speed baot/motor tempel
SUPM Bone	105.050.000	Rekalsifikasi keluar 2 unit speed boar/motor tempel menjadi 2 unit alat bantu lainnya
SUPM Pontianak	1.109.500.000	Rekalsifikasi keluar 1 unit long boat

Transfer Keluar		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	152.728.000	Transfer keluar 2 unit alat angkutan apung bermotor lainnya dan 1 unit speed boat/motor tempel ke BRIN
Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	586.687.000	Transfer keluar 1 unit Kapal Patroli Pantai ke BPPP Banyuwangi
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kp	275.367.000	Transfer keluar 1 unit jeep dan 2 unit mini bus
Pusat Pendidikan Kp	226.040.000	Transfer keluar 2 unit mini bus ke Politeknik KP Dumai dan Politeknik KP Pangandaran
Pusat Riset Perikanan	51.750.000	Transfer keluar 1 unit Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya ke BPPP Tegal

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur 31 Desember 2023 adalah 4.566 unit, sebesar Rp27.750.085.867,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 *Audited* adalah 3.167 unit, sebesar Rp27.878.142.322,00. Alat Bengkel dan Alat Ukur bertambah sebanyak 221 unit, sebesar Rp860.384.069,00 dan berkurang sebanyak 1.399 unit, sebesar Rp1.623.231.643,00.

Rincian mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Periode 31 Desember 2023, disajikan dalam tabel berikut ini:

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4,566	27.750.085.867
Batal Transfer Keluar	1	184.800.857
Hibah Masuk	41	86.660.612
Koreksi Perubahan Kondisi	0	0
Pembelian	4	18.484.000
Perolehan Lainnya	8	25.246.700
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	167	545.191.900



	<b>221</b>	<b>860.384.069</b>
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	655	700.579.529
Penghapusan	574	6.658.500
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	167	545.191.900
Transfer Keluar	3	370.801.714
	<b>1.399</b>	<b>1.623.231.643</b>

## Penjelasan Transaksi

<b>Batal Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	184.800.857	Batal Transfer Keluar 1 unit orbital shaker ke BRIN karena kesalahan pencatatan nilai perolehan

<b>Hibah Masuk</b>		
Pusat Riset Perikanan	86.660.612	Hibah Masuk berupa 1 unit memori programmer. 1 unit mesin bor. 36 unit thermometer standar. 1 unit tool kit box. dan 2 unit tool kit set

<b>Pembelian</b>		
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	15.984.000	Pembelian 3 unit Perkakas AC
SUPM Ladong	2.500.000	Pembelian 1 unit Mesin Las Listrik

<b>Perolehan Lainnya</b>		
Politeknik KP Kupang	25.246.700	Perolehan lainnya 1 unit kunci khusus pembuka mur/baut. 4 unit mesin bor listrik tangna. dan 3 unit mesin gerinda tangan

<b>Penghentian Aset dari Penggunaan</b>		
BPPP Tegal	19.179.000	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 39 unit
Pusat Riset Perikanan	843.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 1 unit tool kit set
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	319.312.200	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 67 unit
SUPM Bone	32.928.100	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 15 unit
SUPM Kota Agung	169.354.600	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 14 unit
SUPM Pontianak	3.575.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 6 unit gergaji dan 25 unit palu kecil

<b>Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	370.801.714	Transfer Keluar berupa 1 unit mesin kompresor dan 2 unit orbital shaker ke BRIN

Saldo Alat Pertanian 31 Desember 2023 adalah 4.083 unit, sebesar Rp40.101.160.382,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 *Audited* adalah

3.718 unit, sebesar Rp49.925.994.689,00. Alat Pertanian bertambah sebanyak 524 unit, sebesar Rp9.715.132.745,00 dan berkurang sebanyak 902 unit, sebesar Rp16.294.608.458,00.

Rincian mutasi Alat Pertanian pada 31 Desember 2023, disajikan dalam tabel berikut ini:

<b>ALAT PERTANIAN</b>	<b>4,083</b>	<b>40.101.160.382</b>
Batal Transfer Keluar	6	6.060.129.000
Hibah Masuk	14	13.999.944
Koreksi Perubahan Kondisi	0	0
Pembelian	4	74.653.800
Perolehan Lainnya	12	57.276.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	485	2.951.881.201
Reklasifikasi Masuk	1	539.815.000
Transfer Masuk	2	17.377.800
	<b>524</b>	<b>9.715.132.745</b>
Koreksi Pencatatan	2	57.276.000
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	294	1.007.623.484
Penghapusan	107	140.191.973
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	485	2.951.881.201
Transfer Keluar	14	12.137.635.800
	<b>902</b>	<b>16.294.608.458</b>

Penjelasan Mutasi sebagai berikut:

<b>Batal Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	6.060.129.000	Batal Transfer Keluar berupa 3 unit cold storage dan 3 unit keramba (jaring apung) ke BRIN karena kesalahan pencatatan nilai perolehan
<b>Hibah Masuk</b>		
Pusat Riset Perikanan	13.999.944	Hibah Masuk berupa 14 unit skipjack pole and lines (huhate)
<b>Pembelian</b>		
BPPP Medan	57.276.000	Pembelian alat produksi perikanan lainnya
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	17.377.800	Pembelian 2 unit alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya
<b>Perolehan Lainnya</b>		
BPPP Medan	57.276.000	Perolehan lainnya 12 unit alat produksi perikanan lainnya karena kesalahan penginputan oleh modul komitmen yang diinput secara gelondongan
<b>Reklasifikasi Masuk</b>		
Politeknik KP Bone	539.815.000	Reklasifikasi Masuk berupa 1 unit alat produksi perikanan lainnya

<b>Transfer Masuk</b>		
Balai Riset Pemuliaan Ikan	17.377.800	Transfer Masuk berupa 2 unit alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya dari BRPBATPP Sempur
<b>Koreksi Pencatatan</b>		
BPPP Medan	57.276.000	Koreksi Pencatatan 2 unit alat produksi perikanan lainnya karena kesalahan penginputan oleh modul komitmen yang diinput secara gelondongan
<b>Penghentian Aset dari Penggunaan</b>		
Balai Besar Riset Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan	1	Penghentian aset karena rusak berat berupa 1 unit alat pengering
BPPP Tegal	263.620.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 10 unit bak pemeliharaan sementara. 55 unit drift gill net. 70 unit encircling gill net. 30 unit ekramba. 30 unit shrimp gill net. dan 18 unit skipjack pole and lines
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	2.544.133.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 10 unit alat pengukur intensitas cahaya. 209 unit bak pemeliharaan sementara. 2 unit perangkat lainnya. dan 1 unit tractor four wheel
SUPM Bone	671.200	Penghentian aset karena rusak berat berupa 4 unit alat pembekuan dan 1 unit garpu
SUPM Kota Agung	141.962.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 11 unit alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya. 1 unit alat pengolahan lainnya. 3 unit boat raft lift net. 1 unit jarring angkat lainnya. 9 unit lemari penyimpanan. 3 unit pancing lainnya. 1 unit rak-rak penyimpan. dan 10 unit selo
SUPM Pontianak	1.495.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 1 unit pukot
<b>Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	12.120.258.000	Transfer Keluar 6 unit cold storage dan 6 unit keramba ke BRIN
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	17.377.800	Transfer Keluar 2 unit alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya ke BRPI

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga 31 Desember 2023 adalah 101.400 unit, sebesar Rp225.021.431.963,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 *Audited* adalah 82,061 unit, sebesar Rp222.146.969.381,00. Alat Kantor dan Rumah Tangga bertambah sebanyak 11.236 unit, sebesar Rp24.268.151.216,00 dan berkurang sebanyak 19.501 unit, sebesar Rp29.864.423.131,00.

Rincian mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga pada 31 Desember 2023, disajikan dalam tabel berikut ini:

<b>ALAT KANTOR &amp; RUMAH TANGGA</b>	<b>101.400</b>	<b>225.431.963</b>
Batal Transfer Keluar	240	209.071.972
Hibah Masuk	34	313.354.167
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	1.613.063
Koreksi Perubahan Kondisi	0	0
Pembelian	877	3.810.008.197
Perolehan Lainnya	2.443	5.108.077.100
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4.011	5.449.253.408
Reklasifikasi Masuk	7	29.034.132
Saldo Awal	2.438	5.091.925.100
Transfer Masuk	1.186	4.255.814.077
	<b>11.236</b>	<b>24.268.151.216</b>
Koreksi Pencatatan	2.441	5.323.622.100
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	5.102.254.863
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	6.950	9.189.140.137
Penghapusan	4.984	347.000.940
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	4.011	5.449.253.408
Reklasifikasi Keluar	1	3.914.137
Transfer Keluar	1.114	4.449.237.546
	<b>19.501</b>	<b>29.864.423.131</b>

Penjelasan Mutasi sebagai berikut:

<b>Batal Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	209.071.972	Batal Transfer Keluar ke BRIN karena kesalahan pencatatan nilai perolehan
<b>Hibah Masuk</b>		
Pusat Riset Perikanan	313.354.167	Hibah masuk sebanyak 34 unit
BPPP Bitung	723.070.200	Transfer masuk dari
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	251.489.658	Transfer masuk dari Pusatlituh
Politeknik KP Pangandaran	5.202.000	Transfer dari BDA Sukamandi berupa 7 unit tabung gas
<b>Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah</b>		
Politeknik KP Karawang	1.613.063	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berupa lemari besi/metal dan meja resepsionis
<b>Pembelian</b>		
BPPP Ambon	186.215.000	Pembelian 2 unit treng air/tandon air

BPPP Bitung	49.228.500	Pembelian 4 unit ac split. 2 unit kursi kayu. dan 1 unit sofa
BPPP Tegal	509.486.060	Pembelian 10 unit ac split. 1 unit dispenser. 24 unit Kasur. 3 unit lemari es. 1 unit meja makan kayu. 1 unit mesin cuci. 21 unit mebelair lainnya. 1 unit enon box. 13 unit televisi. dan 4 unit sound system
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	83.639.993	Pembelian 42 unit Kasur/spring beda dan 1 unit loudspeaker
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	6.291.480	Pembelian 1 unit ac split
Politeknik KP Bitung	141.500.000	Pembelian 133 unit kursi besi/metal. 18 unit tabung pemadam api. dan 5 unit tempat tidur besi
Politeknik KP Bone	198.249.435	Pembelian 1 unit alat pendingin lainnya. 60 unit lemari besi/metal. 1 unit portable air conditioner. dan 1 unit alat pendingin lainnya
Politeknik KP Jembrana	4.543.840	Pembelian 2 unit mesin pemotong rumput
Politeknik KP Kupang	203.275.000	Pembelian 5 unit LCD projector dan 33 unit tempat tidur besi
Politeknik KP Pangandaran	116.217.750	Pembelian 101 unit meja kerja kayu. 1 unit mesin cuci. dan 1 unit oven listrik
Politeknik KP Sidoarjo	1.044.228.956	Pembelian 1 unit cold storage. 8 ac split. 2 air curtain. 2 unit mesin pemotong rumput. 2 unit pallet plastik. 4 rak besi. dan 1 tangga aluminium
Politeknik KP Sorong	244.836.483	Pembelian 32 unit kursi besi/metal. 5 unit laci box. 4 unit lemari besi/metal. 7 unit meja kerja kayu. 1 unit meja rapat. 9 unit portable air conditioner. 1 unit rice cooker. 2 televisi. dan 1 tempat tidur kayu
SUPM Kupang	49.500.000	Pembelian 3 unit rak besi. 2 unit portable air conditioner. dan 2 unit water filter
SUPM Kota Agung	296.191.000	Pembelian 10 unit kursi besi/metal. 10 unit meja kerja kayu. 120 unit meja computer. dan 33 unit tempat tidur besi
SUPM Ladong	288.862.000	Pembelian 1 unit rak besi. 10 unit filing cabinet besi. 2 unit gordyin/kray. 13 unit lemari besi/metal. 25 unit meja kerja kayu. 1 unit meja rapat. 3 unit sofa. 1 unit televisi. dan 2 unit trang air/tandon air
SUPM Pariaman	23.976.000	Pembelian 9 unit tabung pemadam api
SUPM Pontianak	42.080.1000	Pembelian 4 unit dispenser. 2 unit filing cabinet besi. 8 unit lemari besi/metal. dan 1 unit sound system
SUPM Tegal	15.789.000	Pembelian 1 unit televisi. 1 unit camera video. dan 1 unit wireless
SUPM Waehu	232.334.100	Pembelian lampu dan 30 unit tempat tidur besi
Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia	73.563.500	Pembelian 1 unit lemari es. 1 unit lemari es. 1 unit coffee maker. dan 2 unit alat rumah tangga lainnya

<b>Perolehan Lainnya</b>		
BPPP Medan	10.350.000	Perolehan lainnya berupa 1 unit meja kerja besi/metal dan 1 unit mimbar/podium
Politeknik KP Dumai	5.800.000	Perolehan lainnya 3 unit rak dapur
Politeknik KP Karawang	5.091.927.100	Perolehan lainnya 2.438 mebelair

<b>Saldo Awal</b>		
Politeknik KP Karawang	5.091.927.100	Perolehan lainnya 2.438 mebelair

<b>Transfer Masuk</b>		
BPPP Tegal	2.748.553.764	Transfer masuk dari Pusriskel
BPPP Bitung	723.070.200	Transfer masuk dari Puslatluh
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	281.489.658	Transfer masuk dari Pusalatluh
Balai Riset Pemuliaan Ikan	6.291.480	Transfer masuk dari BRPBATPP Sempur berupa 1 unit ac split
Politeknik KP Karawang	49.720.000	Transfer masuk dari BDA Sukamandi berupa 30 unit Kasur/spring bed dan 22 unit tempat tidur kayu
Politeknik KP Pangandaran	5.202.000	Transfer dari BDA Sukamandi berupa 7 unit tabung gas
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	441.486.975	Transfer masuk 2 unit bangku Panjang besi/metal. 613 unit kursi besi/metal. dan 10 unit meja rapat

<b>Koreksi pencatatan</b>		
BPPP Ambon	186.215.000	Koreksi pencatatan 2 unit teng air/tandon air karena kesalahan pencatatan kode barang oleh modul komitmen yang seharusnya memakai kode KDP tetapi memakai kode aset tetap lainnya
BPPP Tegal	45.480.000	Koreksi pencatatan 1 unit televisi
Politeknik KP Karawang	5.091.927.100	Koreksi pencatatan pada meubelair

<b>Koreksi pencatatan</b>		
Politeknik KP Karawang	5.102.254.863	Koreksi pencatatan pada meubelair lainnya

<b>Penghentian Aset dari Penggunaan</b>		
BPPP Tegal	1.2252.748.076	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 4.011 unit
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	79.896.755	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 59 unit
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	102	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 102 unit
Balai Riset Perikanan Laut	156.786.005	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 259 unit
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4.882.500	Penghentian aset karena rusak berat berupa 3 unit kursi besi/metal dan 5 unit kursi fiber glas/plastik
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP	77.198.000	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 11 unit
Pusat Riset Perikanan	13.088.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 3 unit ac split

Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	221.781.100	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 40 unit
SUPM Bone	525.962.306	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 360 unit
SUPM Kota Agung	1.775.929.588	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 1.238 unit
SUPM Ladong	84.710.000	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 140 unit
SUPM Pontianak	1.256.270.974	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 539 unit

<b>Reklasifikasi Keluar</b>		
Politeknik KP Karawang	3.914.137	Reklasifikasi keluar 1 unit meubelair lainnya

<b>Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	534.024.444	Transfer keluar sebanyak 544 unit ke BRIN
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	54.922.000	Transfer keluar ke Politeknik KP Pangandaran. BPPP Bitung. BDA Sukamandi
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	6.291.480	Transfer keluar 1 unit ac split ke BRPI
Balai Riset Perikanan Laut	79.200.000	Transfer keluar 3 unit partisi ke BRIN
Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan	21.686.000	Transfer keluar 6 unit ac split ke Pangkalan PSDKP Batam
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kp	1.004.559.858	Transfer keluar ke BPPP Bitung dan BDA Sukamandi
Pusat Riset Perikanan	2.748.553.764	Transfer keluar ke BPPP Tegal

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Per 31 Desember 2023 adalah 5.843 unit, sebesar Rp76.698.445.789,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 *Audited* adalah 5.251 unit, sebesar Rp75.957.060.549,00. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar bertambah sebanyak 613 unit, sebesar Rp2.359.139.928,00 dan berkurang sebanyak 1.419 unit, sebesar Rp3.076.711.242,00.

Rincian mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada 31 Desember 2023, disajikan dalam tabel berikut ini:

<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>5.843</b>	<b>76.698.445.789</b>
Batal Transfer Keluar	1	15.000.000
Hibah Masuk	103	542.690.462
Koreksi Perubahan Kondisi	0	0
Pembelian	38	316.156.508
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	437	957.734.801
Transfer Masuk	34	527.558.157
	<b>613</b>	<b>2.359.139.928</b>
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	526	1.545.868.284
Penghapusan	419	15.150.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	437	957.734.801
Transfer Keluar	37	557.958.157

1.419

3.076.711.242

**Penjelasan Mutasi sebagai berikut:**

<b>Batal Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	15.000.000	Batal Transfer Keluar ke BRIN berupa 1 unit power amplifier karena kesalahan pencatatan nilai perolehan

<b>Hibah Masuk</b>		
Pusat Riset Perikanan	542.690.462	Hibah masuk sebanyak 103 unit

<b>Pembelian</b>		
BPPP Ambon	4.620.000	Pembelian 3 unit alat pemanas prosesing
BPPP Banyuwangi	93.000.000	Pembelian 1 unit genset
BPPP Tegal	94.000.000	Pembelian 20 unit alat pemanas prosesing
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	21.776.990	Pembelian 1 unit drone
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong	27.955.350	Pembelian 1 unit telepon satelit
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	35.500.000	Pembelian 1 unit camera digital. 1 unit mesin ptong. 1 unit microphone. dan 1 unit mixer sound system
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	3.508.000	Pembelian 1 unit audio mixing portable dan 1 unit UPS
Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	35.796.168	Pembelian 4 unit handy talky. 1 unit video conference. dan 1 unit voice recorder

<b>Transfer Masuk</b>		
BPPP Tegal	127.716.500	Transfer masuk dari Pusriskel
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	378.064.667	Transfer masuk dari Pustlatluh
Balai Riset Pemuliaan Ikan	21.776.990	Transfer masuk 1 unit drone dari BRPBATPP Sempur

<b>Transfer Keluar</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	30.400.000	Transfer keluar sebanyak 3 unit ke BRIN
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	21.776.990	Transfer keluar sebanyak 1 unit ke BRPI
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP	378.064.667	Transfer keluar sebanyak 16 unit ke BDA Sukamandi
Pusat Riset Perikanan	127.716.500	Transfer keluar sebanyak 17 unit ke BPPP Tegal

<b>Penghentian Aset dari Penggunaan</b>		
BPPP Tegal	179.113.572	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 60 unit
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	9.350.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 1 unit dehumidifier
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	5	Penghentian aset karena rusak berat berupa 1 unit GPS receiver. 3 unit handy talky. 1 telephone
Balai Riset Perikanan Laut	55.550.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 1 unit alat komunikasi lainnya
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP	80.888.872	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 15 unit



Pusat Riset Perikanan	6.000.000	Penghentian aset karena rusak berat berupa 1 unit satellite link
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	44.531.000	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 18 unit
SUPM Bone	165.279.016	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 36 unit
SUPM Kota Agung	158.267.336	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 48 unit
SUPM Pontianak	258.755.000	Penghentian aset karena rusak berat sebanyak 252 unit

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp1.684.337.201.  
059*

### C.19 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan jumlah 2.144 unit sebesar Rp1.684.337.201.059,00. Jumlah tersebut terdiri dari nilai per 31 Desember 2022 (Audited) adalah 2.103 unit sebesar Rp1.708.358.631.133,00. Bertambah 738 unit sebesar Rp242.901.890.951,00 dan berkurang 272 unit sebesar Rp184.604.781.025,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel C.22**  
**Rincian Gedung dan Bangunan**

URAIAN	Kuantitas (unit)	Nilai Perolehan
Saldo Nilai Per 31 Desember 2023	2,144	1,683,932,058,235
Saldo Nilai Per 31 Desember 2022 Audited	2,103	1,708,358,631,133
<b>Mutasi Tambah</b>		
Saldo Awal	42	1.163.203.287
Pembelian	84	2.144.362.579
Transfer Masuk	1	277.171.000
Perolehan Lainnya	111	3.588.418.026
Reklasifikasi BMN Ke PI	1	51.545.157.028
Reklasifikasi Masuk	134	73.446.980.680
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	10.222.530.410
Koreksi Susulan	0	1.153.087.983
Likuidasi Masuk	97	52.395.594.801
Pengembangan Melalui KDP	0	9.222.819.454
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	1.718.524.683
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	13	1.745.725.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	9	4.897.334.254

Total	738	242.901.890.951
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	8	1.581.710.500
Koreksi Pencatatan	21	4.739.592.056
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	1.064.310.160
Likuidasi Keluar	97	52.395.594.801
Perubahan BMN Ke PI	1	51.545.157.028
Reklasifikasi Keluar	128	73.001.245.480
Transfer Keluar	1	277.171.000
<b>Total</b>	<b>272</b>	<b>184.604.781.025</b>

Penjelasan Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Satker	Nilai	Penjelasan
<b>SALDO AWAL</b>		
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	26.250.000	Input Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen, merupakan temuan itjen tahun 2022 secara BMN sudah dilakukan Penghapusan aset tetapi dari pegawai ada yang melakukan renovasiperbaikan dengan anggaran pribadi, dan pegawai yang menempati bangunan rumah tersebut juga ditarik PNPB, sehingga menjadi temuan Inspektorat harus dilakukan transaksi input Kembali menjadi BMN
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	310.721.250	Input saldo awal Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen sebanyak 2 unit dari hasil koreksi temuan Inspektorat untuk temuan dari 1 kopel rumah menjadi 2 NUP masing - masing Rumah Negara senilai Rp110.546.250
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	826.232.000	
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru	37	
<b>PEMBELIAN</b>		
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon	174.885.000	Pengadaan Pengembangan Bangunan Gedung merupakan kesalahan komitmen melakukan input data mencatat menjadi gedung baru seharusnya pengembangan ke gedung pendidikan dan latihan NUP 1
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	143.557.583	Pengadaan Pengembangan Gedung dan Bangunan tetapi terdapat Kesalahan Komitmen dalam menentukan kode barang, harusnya tercatat sebagai perolehan KDP (kode 7.XX) tetapi operator komitmen mencatat langsung ke pengadaan Bangunan Gedung
Balai Riset Budidaya Ikan Hias	174.060.965	Pengadaan Gedung dan Bangunan brp lapangan terbuka, bangunan terbuka lainnya (4 unit) sebanyak 7 nup, dengan Nilai Rp174.060.965,00 dari pengadaan 521253 (ekstrakomtable)
Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan	869.600.000	Pengadaan Gedung berupa Gazebo sebanyak 35 unit
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	49.150.000	Pengadaan bangunan tempat ibadah
Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek Aup) Jakarta	49.833.450	Belanja Konsultan Pengawas pekerjaan Gedung dan Bangunan
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jembrana	98.806.428	Pengadaan Pekerjaan Taman Permanen dan bangunan Gudang
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung	21.605.500	Pengadaan Asrama Permanen
<b>KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	6.714.426.805	Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan atas koreksi nilai proses normalisasi berdasarkan surat dari DJKN nomor S-46/KN2/2023 tgl

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	70.676.000	Pengembangan dari belanja pemeliharaan yang mengkapitalisasi menjadi aset
Loka Riset Budidaya Rumput Laut	25.256.608	Pemeliharaan pagar Permanen dari belanja 52 yang menjadi temuan itjen untuk dikapitalisasi menjadi aset
<b>KOREKSI SUSULAN</b>		
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon	199.757.880	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, kesalahan komitmen melakukan input data mencatat menjadi KDP seharusnya pengembangan ke gedung pendidikan dan latihan NUP 1
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru	305.551.575	koreksi pencatatan karena adanya Pencatatan Aset ganda (Asrama Permanen NUP 8 dan 9)
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jembrana	98.806.428	Kesalahan Komitmen dalam menentukan kode barang, harusnya tercatat sebagai pengembangan Kolam sebanyak 6 unit kolam, tetapi tercatat langsung sebagai bangunan kolam
Sekretariat BRSDMKP	88.802.000	berupa pekerjaan interior ruang dharma wanita brsdm pada bangunan gedung kantor permanen NUP 4 di satker sekretariat brsdm
<b>LIKUIDASI MASUK</b>		
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone	38.155.082.118	Likuidasi Masuk Gedung dan Bangunan dari Satker SUPM Bone yang terkena likuidasi
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Kupang	13.341.701.683	Likuidasi Masuk Gedung dan Bangunan dari Satker SUPM Kupang yang terkena likuidasi
<b>Pengembangan Nilai Aset (Langsung)</b>	<b>116.064.400</b>	
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal	199.194.500	Terdapat pengembangan langsung gedung bangunan (bengkel hanggar Permanen NUP 7) merupakan dari Belanja BLU Rp116.064.400
<b>Penyelesaian Pembangunan Langsung</b>		
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jembrana	82.667.440	Penyelesaian Pembangunan Bangunan Kolam/Bak Ikan dari Belanja Modal
<b>Perolehan Lainnya</b>		
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung	2.792.971.130	Perolehan lainnya atas temuan itjen berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen dari belanja pemeliharaan 52 yang membentuk menjadi Aset sebesar Rp107.799.000 dan perolehan lainnya akibat kesalahan hapus koreksi catat, harusnya penghapusan untuk koreksi yang penambahan nilai tetapi yang terhapus gedung dan bangunan NUP 3 sehingga dilakukan input Kembali dengan perolehan lainnya
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru	74.907.240	Perolehan atas Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya diperoleh dari belanja Persediaan (kegiatan TEFA Eduwisata)
<b>Transfer Masuk</b>		
Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	277.171.000	Transfer masuk 1unit Gedung dan Bangunan berupa mess/wisma yang berada di Depok dengan nilai Rp277.171.000 dari satker BRPPBATPP Bogor
<b>Reklasifikasi Masuk</b>		
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Medan	149.578.000	Reklas Tanah Bangunan tempat kerja lainnya seharusnya tercatat sebagai bangunan gedung kantor lainnya (bangunan workshop)
Loka Riset Budidaya Rumput Laut	2.358.744.000	koreksi perubahan tipe dan golongan rumah negara sebanyak 12 unit, sesuai temuan itjen agar dirubah dari tipe rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	665.801.000	Reklas Gedung dan bangunan laboratorium, Gedung jemur menjadi Gedung Pendidikan dan Pelatihan sesuai surat keterangan reklas nomor B.455/BRSDM-SUPM.PTK/PL.760/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	197.034.000	Reklas Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sesuai dengan arahan inspektorat
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	51.545.157.028	Perubahan Kode dan Jenis Barang berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2 Menjadi

		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen NUP 6 SK Terlampir Pada CALKBMN
--	--	--

## Penjelasan Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Satker	Nilai	Penjelasan
<b>Likuidasi Keluar</b>		
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang	13.341.701.683	Transfer Likuidasi Aset ke Poltek KP Kupang
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone	38.155.082.118	Transfer Likuidasi Aset ke Poltek KP Bone
<b>Reklasifikasi Keluar</b>	<b>3.183.833.000</b>	
Loka Riset Budidaya Rumput Laut	2.358.744.000	koreksi perubahan tipe dan golongan rumah negara sebanyak 12 unit, sesuai temuan itjen agar dirubah dari tipe rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	628.055.000	Reklas Gedung dan bangunan laboratorium, Gedung jemur menjadi Gedung Pendidikan dan Pelatihan sesuai surat keterangan reklas nomor B.455/BRSDM-SUPM.PTK/PL.760/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	197.034.000	Reklas Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sesuai dengan arahan inspektorat
<b>Koreksi Pencatatan</b>	<b>736.929.998</b>	
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon	174.885.000	Koreksi catat Pengadaan Pengembangan Bangunan Gedung merupakan kesalahan komitmen melakukan input data mencatat menjadi gedung baru seharusnya pengembangan ke gedung pendidikan dan latihan NUP 1
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	44.289.173	Kesalahan Komitmen dalam menentukan kode barang, harusnya tercatat sebagai perolehan KDP (kode 7.XX) tetapi operator komitmen mencatat langsung ke pengadaan aset.
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	212.204.250	koreksi catat Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen atas tahun perolehan tercatat tahun 2021 seharusnya tahun 2011
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru	305.551.575	Koreksi Bangunan Asrama Permaneni koreksi pencatatan akibat Aset ganda (Asrama Permanen NUP 8 dan 9)
<b>Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	1.047.584.798	Koreksi nilai terhadap 4 unit bangunan atas proses normalisasi berdasarkan surat dari DJKN nomor S-46/KN2/2023 tgl
Pusat Riset Perikanan	89.972.562	Koreksi Nilai Pencatatan Gedung PIAMARI karena adanya temuan BPK terkait kurang kuantitas pekerjaan Gedung Aquarium PIAMARI.
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	98.517.000	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen dari Rp197.034.000, menjadi senilai Rp98.517.000 dan sisa 1 nup lagi diinput lewat saldo awal senilai 98.517.000
Politeknik KP Sorong	195.868.000	Pada Anaudited terdapat koreksi 2 NUP Rumah Negara (nup 1 & nup 5) yang dipecah menjadi 4 NUP(nup 1,5,6,dan 7), sehingga nilainya disesuaikan lagi sebagai tindak lanjut koreksi CHR reviu itjen di LKBMN
<b>Transfer Keluar</b>		
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	277.171.000	Transfer Keluar 1unit Gedung dan Bangunan berupa mess/wisma yang berada di Depok dengan nilai Rp277.171.000 kw Setba

<b>Penghentiaan Aset Dari Penggunaan</b>		
Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	1.062.718.000	Penghentiaan 2 unit Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Bengkel dan Bangunan Gudang Permanen untuk diajukan usulan penghapusan BMN
<b>Perubahan ke PI</b>		
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal	51.545.157.028	Koreksi perubahan kodifikasi Gedung dan Bangunan dari aset tetap menjadi asset Properti Investasi
<b>Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan</b>		
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waehu	8.798.270	Pos Jaga Semi Permanen NUP 1 dan Pagar Permanen NUP 1 untuk proses penghapusan

*Jalan, Irigasi dan Irigasi  
Rp349.388.079.750*

### **C.20 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp349.388.079.750,00 dan Rp347.452.105.770,00.

Jika dibandingkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 *Audited* untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar 0,56 persen.

Kenaikan sebesar 0,56 persen sampai dengan 31 Desember 2023 disebabkan karena sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 terdapat pagu belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang ada pada beberapa satker, yaitu:

1. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon;
2. Politeknik AUP Jakarta;
3. Pusat Riset Perikanan;
4. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone;
5. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember; dan
6. Sekretariat Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Rincian perbandingan nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *Audited* adalah sebagai berikut:

**Tabel C.23**  
**Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	31 Desember TA 2023	31 Desember TA 2022 (Audited)	Naik/ Turun (%)
1	Jalan, Irigasi dan Jembatan	349.388.079.750	347.452.105.770	0,56
<b>Jumlah</b>		<b>349.388.079.750</b>	<b>347.452.105.770</b>	<b>0,56</b>

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2023</b>	<b>338,606</b>	<b>99,734,461,279</b>
<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2022</b>	<b>338,606</b>	<b>99,734,461,279</b>
<b>Koreksi Tambah :</b>		
Transfer Masuk	9,648	2,724,791,455
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	75	405,685,000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	4,427	4,992,502,028
Pengembangan Nilai Aset	0	315,536,710
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	8,252	189,790,000
Pengembangan Melalui KDP	65,366	6,818,040,700
	87,768	15,446,345,893
	<b>87,768</b>	<b>15,446,345,893</b>
Transaksi Normalisasi BMN	2,480	2,537,976,164
Transfer Keluar	23,883	11,648,884,830
Koreksi Pencatatan	400	189,790,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	4	198,398,625
	<b>26,767</b>	<b>14,575,049,619</b>

**a. Penjelasan Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan sebagai berikut:**

**Pembelian**

Satker	Nilai	Penjelasan
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	514.250.600	Renovasi Jalan Keliling Kampus Politeknik AUP Jakarta yg tercatat sebagai pengadaan asset jalan

**Pengembangan Nilai Aset Langsung**

Satker	Nilai	Penjelasan
Politeknik KP Sidoarjo	108.180.000	

Penjelasan Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan sebagai berikut:

**Penghentiaan Aset Dari Penggunaan**

Satker	Nilai	Penjelasan
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	(198.398.625)	Penghentiaan aset karena rusak berat

**Transfer Keluar**

Satker	Nilai	Penjelasan
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Serang	(2.121.221.830)	Transfer keluar ke Poltek KP Jakarta
Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	(259.735.000)	Transfer keluar ke Poltek KP Jakarta

**b. Penjelasan Mutasi Tambah Irigasi sebagai berikut:**

Saldo Irigasi 31 Desember 2023 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp180.226.450.236,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 *Audited* adalah sebesar Rp166.374.531.617,00.

<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2023</b>	<b>295</b>	<b>180.243.226.236</b>
<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2022</b>	<b>295</b>	<b>180.243.226.236</b>
<b>Koreksi Tambah :</b>		
Transfer Masuk	29	2.166.057.756
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2	2.029.845.680
Reklasifikasi Masuk	5	1.213.621.485
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	4.545.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	2	210.646.061
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	241.972.597
Pengembangan Melalui KDP	0	842.577.500
	<b>39</b>	<b>6.709.266.079</b>
Transaksi Normalisasi BMN	1	193.870.061
Transfer Keluar	22	2.858.441.756
Reklasifikasi Keluar	1	1.895.345.680
Koreksi Pencatatan	1	241.972.597
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17	709.986.000
	<b>42</b>	<b>5.899.616.094</b>

Penjelasan Mutasi Tambah irigasi sebagai berikut:

**Transfer Masuk**

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Riset Perikanan	128.525.000	Transfer masuk dari Pusriskel
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	2.037.532.756	Transfer masuk dari BAPPL Serang dan Juruluhkan

Mutasi Kurang Irigasi sbb:

**Penghentiaan Aset Dari Penggunaan**

Satker	Nilai	Penjelasan
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal	(87.886.000)	Penghentiaan aset karena rusak berat
Pusat Riset Perikanan	(3.700.000)	Penghentiaan aset karena rusak berat
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	(440.212.000)	Penghentiaan aset karena rusak berat

**Transfer Keluar**

Satker	Nilai	Penjelasan
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Serang	(1.458.179.756)	Transfer keluar ke Poltek KP Jakarta

Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	(139.141.000)	Transfer keluar ke Poltek KP Jakarta
---	---------------	--------------------------------------

Saldo Instalasi 31 Desember 2023 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp45.183.316.199,00 Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 Audited adalah sebesar Rp45.431.848.207,00.

<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2023</b>	<b>130</b>	<b>45.183.316.199</b>
Saldo Awal Per 31 Desember 2022	130	45.183.316.199
<b>Koreksi Tambah :</b>		
Pembelian	1	140.787.152
Transfer Masuk	62	3.949.502.000
Reklasifikasi Masuk	1	33.000.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	3	126.656.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	4	231.000.000
Pengembangan Nilai Aset	0	108.775.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	34.396.635
	<b>71</b>	<b>4.624.116.787</b>
<b>Koreksi Kurang :</b>		
Transaksi Normalisasi BMN	2	115.500.000
Transfer Keluar	11	4.245.008.795
Reklasifikasi Keluar	100	3.000.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	56	509.140.000
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>4.872.648.795</b>

Penjelasan Mutasi Tambah Instalasi sebagai berikut:

#### Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas

Satker	Nilai	Penjelasan
SUPM Bone	34.396.635	TL itjen tahun 2020 berupa instalasi (belanja dgn akun 52 yg dikapitalisasi mnjd aset tetap) harga barang tidak sesuai dengan kwitansi

#### Pembelian

Satker	Nilai	Penjelasan
BPPP Ambon	140.787.152	Pembuatan jaringan internet di gedung kantor Balai

#### Pengembangan Nilai Aset

Satker	Nilai	Penjelasan
BPPP Ambon	108.775.000	Pengembangan pengadaan jaringan internet di gedung kantot balai

#### Pengembangan Langsung

Satker	Nilai	Penjelasan
SUPM Bone	126.656.000	Pengembangan pemasangan jatingan listrik dari belanja 52

#### Reklasifikasi Masuk



Satker	Nilai	Penjelasan
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jembrana	33.000.000	Merupakan filter air perkomponen direklas keluar menjadi filter air 1 unit

**Transfer Masuk**

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Riset Perikanan	3.901.552.000	Transfer masuk dari Pusriskel
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	47.950.000	Transfer masuk dari BAPPL Serang dan Juruluhkan

Penjelasan Mutasi Kurang sebagai berikut:

**Penghentiaan Aset Dari Penggunaan**

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Riset Perikanan	(509.140.000)	Penghentiaan aset karena rusak berat

**Reklasifikasi Keluar**

Satker	Nilai	Penjelasan
BPPP Bitung	(1.880.000)	Temuan BPK tahun 2020 salah catatan alsin. dari JJ harusnya diinput ke alsin
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	(3.000.000)	Temuan BPK 2012 jaringan pipa gas dengan nilai dibawah kapitalisasi hrs masuk ekstra

**Transfer Keluar**

Satker	Nilai	Penjelasan
BAPPL Serang	(47.950.000)	Transfer keluar ke Poltek KP Jakarta

**c. Penjelasan Mutasi Tambah Jaringan sebagai berikut:**

Saldo Jaringan 31 Desember 2023 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp21.847.309.289,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.011.023.314,00.

Saldo Nilai Per 31 Desember 2023	91	21.847.309.289
Saldo Nilai Per 31 Desember 2022	91	21.847.309.289
<b>Koreksi Tambah :</b>		
Pembelian	1	199.714.460
Transfer Masuk	3	50.330.325
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3	527.331.515
	7	<b>777.376.300</b>
<b>Koreksi Kurang :</b>		
Transaksi Normalisasi BMN	4	375.000.000
Transfer Keluar	4	551.130.325
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	1	14.960.000
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>941.090.325</b>

Rincian mutasi tambah kurang sebagai berikut:

**Pembelian**

Satker	Nilai	Penjelasan
STP Jakarta	199.714.460	Pengadaan Jaringan Hotspot Wifi Terpadu

**Transfer Masuk**

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Riset Perikanan	12.750.000	Transfer Masuk dari Pusriskel
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	37.580.325	Transfer masuk dari BAPPL Serang

**Penghentiaan Aset Dari Penggunaan**

Satker	Nilai	Penjelasan
SUPM Negeri Kupang	(14.960.000)	Penghentiaan aset karena rusak berat

**Transfer Keluar**

Satker	Nilai	Penjelasan
BAPPL Serang	(2.580.325)	Transfer keluar ke Poltek KP Jakarta
STP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	(35.000.000)	Transfer keluar ke Poltek KP Jakarta

**d. Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Renovasi sebagai berikut:**

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.018.919.431,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.800.549.140,00.

Saldo Nilai Per 31 Desember 2023	15	8.800.549.140
<b>Koreksi Tambah :</b>		
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3	1.364.531.691
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	127.538.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	10	1.816.195.310
Reklasifikasi Masuk	1	789.238.273
Transfer Masuk	3	3.047.403.650
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>7.144.906.924</b>
<b>Koreksi Kurang :</b>		
Koreksi Pencatatan	2	2.715.980.900
Penghapusan	2	509.560.200
Reklasifikasi Keluar	1	837.396.573
Transaksi Normalisasi BMN	10	1.816.195.310
Transfer Keluar	3	3.047.403.650
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>8.926.536.633</b>

Mutasi Tambah dan Kurang tersebut terdiri dari :

### Penyelesaian Pembangunan dengan KDP

Satker	Nilai	Penjelasan
Sekretariat BPPSDM KP KP	1.364.531.691	Penyelesaian Pembangunan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

### Penyelesaian Pembangunan Langsung

Satker	Nilai	Penjelasan
Sekretariat BPPSDM KP KP	127.538.000	Pekerjaan Pengadaan Pembuatan Ruang Makan Pegawai Sekretariat di Lantai 6 Gedung GMB III KKP

### Transfer Masuk

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Riset Perikanan	3.047.403.650	Transfer masuk dari satker pusriskel yang terkena likuidasi kebijakan 1 DIPA merupakan pekerjaan pengurangan tanah yang berada di Saumlaki pada tahun 2015 sebesar Rp 2.537.843.450,- yang secara aset tanah tersebut masih milik pemda dan belum dilakukan serah terima ke pemda dan pekerjaan renovasi ruangan di gedung II BPPSDM KPKP Ancol lantai 5 sebesar Rp101.215.000,- dan ATR sebesar Rp195.733.500 merupakan pekerjaan instalasi listrik gedung Instalasi Teknologi Perikanan Pusrisikan yang berada di Pasar Minggu, ATR sebesar Rp313.760.200, berupa Renovasi Gedung dan Bangunan lantai 2 Gedung Instalasi Teknologi Kelautan Pasar Minggu
Satker	Nilai	Penjelasan
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang	-2.642.480.900	Koreksi berupa rumah susun sewa yang secara aset sudah diserahkan dari PUPR ke KKP
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Kupang	-73.500.000	Penyelesaian pekerjaan tangga dapur gedung asrama yang secara pencatatan gedung asrama msh tercatat di SUPM Kupang

Aset Tetap Dalam Renovasi Tahun 2022 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdapat pada Satuan Kerja :

No	Satker	Nilai	Penjelasan
1	Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi	1.730.529.480.	AKKP Wakatobi ATR sebesar Rp1,730,529,480,- merupakan pekerjaan Jasa Konsultasi Amdal pembangunan Tanah Wakatobi sebesar Rp.187.346.500,- dan pekerjaan rehab gedung Akademi Kelautan Wakatobi sebesar Rp1.543.182.980,-
2	Pusat Riset Perikanan	2.537.843.450.	Pusat Riset Kelautan : merupakan pekerjaan pengurangan tanah yang berada di Saumlaki pada tahun 2015 sebesar Rp 2.537.843.450,- yang

			secara aset tanah tersebut masih milik pemda dan belum dilakukan serah terima ke pemda
3	Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	2.750.546.501.	Sekretariat BPPSDM KP : ATR sebesar Rp1,306,635,110,- renovasi gedung ruang kerja partisi sekretariat BPPSDM KP Gedung GMB III lantai 7 dan Renovasi Ruangan Gedung GMB II untuk tempat kerja kantor Pusdik KP yang rencana pindah dari Gedung BPPSDM KP Ancol ke GMB II Gambir lantai 5. Dan sebesar Rp127.538.000,- merupakan pekerjaan Ruang Makan pegawai di Lantai 5 gedung GMB III
	<b>TOTAL</b>	<b>7.018.919.431</b>	

*Aset Tetap Lainnya*  
Rp28.434.958.070

### C.21 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp28.434.958.070,00 dan Rp30.936.424.721,00.

Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro kartografi naskah dan lukisan dan alat bercorak kebudayaan.

Jika dibandingkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 *Audited* untuk Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar (8,09) persen.

Tabel C.24  
Rincian perbandingan nilai Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	31-Des-23	31 Desember TA 2022 (Audited)	Naik/ Turun (%)
1	Aset Tetap Lainnya	28.434.958.070	30.936.424.721	(8,09)
	<b>Jumlah</b>	<b>28.434.958.070</b>	<b>30.936.424.721</b>	<b>(8,09)</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Per 31 Desember 2023	54.142	25.326.127.461
Saldo Awal Per 31 Desember 2022	56.539	26.149.195.847
BAHAN PERPUSTAKAAN	52.471	17.285.902.284
Saldo Awal	54.891	18.236.340.670
Likuidasi Masuk	3.734	200.770.162
Likuidasi Keluar	3.734	200.770.162

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BPPSDM TAHUNAN T.A 2023 Audited

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	11	734.470.000
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1.661	7.940.854.177
Saldo Awal	1.648	7.912.855.177
Pembelian	12	1.830.241.895
Likuidasi Masuk	313	687.421.485
	325	2.517.663.380
Koreksi Pencatatan	2	1.730.870.895
Likuidasi Keluar	313	687.421.485
	315	2.418.292.380

Penjelasan Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

601	BAHAN PERPUSTAKAAN		
	Jenis Transaksi	Nilai	Penjelasan
	Likuidasi Masuk	200.770.162	Transfer BMN Likuidasi masuk pada satker Poltek KP Bone dan Poltek KP Kupang
	Likuidasi Keluar	200.770.162	Transfer BMN Likuidasi keluar asset pada satker SUPM Bone dan SUPM Kupang
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA		
	Jenis Transaksi	Nilai	Penjelasan
	Pembelian	1.830.241.895	Pengadaan peralatan music modern/Band pada satker Poltek KP Jakarta, SUPM Ladong dan Poltek KP Sidoarjo
	Likuidasi Masuk	687.421.485	Transfer BMN Likuidasi masuk pada satker Poltek KP Bone dan Poltek KP Kupang
	Likuidasi Keluar	687.421.485	Transfer BMN Likuidasi keluar asset pada satker SUPM Bone dan SUPM Kupang
	Koreksi Pencatatan	1.730.870.895	Pada satker Poltek KP Jakarta terdapat koreksi pengadaan peralatan Modern/Band dari 2 unit dan dikapitalisasi menjadi beberapa asset alat music
604	IKAN		
605	TANAMAN		

Aset tetap lainnya merupakan koleksi buku-buku perpustakaan terkait bahan-bahan sebagai referensi penelitian, buku peta citra, dan peta bumi, Barang Bercorak Kesenian, Alat Bercorak Kebudayaan, terdapat pada satuan kerja:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	032.12.237373	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	576.398.216.
2	032.12.238010	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung	1.088.533.250.
3	032.12.238741	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Medan	62.748.900.
4	032.12.238755	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon	155.769.275.
5	032.12.238762	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	311.342.195.

6	032.12.239188	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal	393.441.572.
7	032.12.239260	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Bitung	63.652.000.
8	032.12.245124	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Supm) Negeri Kupang	385.261.660.
9	032.12.403816	Pusat Riset Kelautan	0.
10	032.12.403817	Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir	111.800.000.
11	032.12.403818	Balai Riset Dan Observasi Laut	176.819.326.
12	032.12.403820	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	45.968.610.
13	032.12.403821	Pusat Riset Perikanan	6.978.037.852.
14	032.12.403822	Balai Riset Perikanan Laut	8.000.000.
15	032.12.403823	Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan	244.815.000.
16	032.12.403824	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	109.433.000.
17	032.12.403827	Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	738.465.890.
18	032.12.403828	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	745.515.000.
19	032.12.403829	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	275.652.000.
20	032.12.403830	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	220.875.000.
21	032.12.403832	Balai Riset Pemuliaan Ikan	287.585.790.
22	032.12.403835	Balai Besar Riset Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan	182.791.050.
23	032.12.403836	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan	1.250.473.788.
24	032.12.403837	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang	101.206.860.
25	032.12.403838	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Kupang	0.
26	032.12.403839	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone	130.668.743.
27	032.12.403875	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai (Poltek Kp Dumai)	172.477.000.
28	032.12.403879	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran (Poltek Kp Pangandaran)	97.800.000.
29	032.12.427511	Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	4.164.369.795.
30	032.12.427536	Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Serang	0.
31	032.12.427551	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	622.719.826.
32	032.12.427573	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	502.468.086.
33	032.12.427582	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	273.008.386.
34	032.12.427602	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone	502.929.987.
35	032.12.427618	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru	1.577.432.822.
36	032.12.427630	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	580.303.206.
37	032.12.440013	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jembrana (Poltek Kp Jembrana)	92.000.000.
38	032.12.440043	Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	0.

39	032.12.440796	Pusat Pendidikan Kelautan Dan Perikanan	0.
40	032.12.622035	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo	509.580.890.
41	032.12.622152	Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan	0.
42	032.12.626402	Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	669.261.047.
43	032.12.634146	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong	793.332.743.
44	032.12.652009	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung	940.258.408.
45	032.12.653526	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	125.368.000.
<b>TOTAL</b>			<b>26.268.565.173</b>

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp1.248.525.149*

### C.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan periode 31 Desember 2023 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.248.525.149,00 dan Saldo Awal Per 31 Desember 2022 *Audited* senilai Rp1.657.242.754,00 mutasi tambah senilai Rp14.657.390.533,00 dan mutasi kurang senilai Rp15.066.108.138,00.

Jika dibandingkan sampai dengan per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 *Audited* untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mengalami penurunan nilai sebesar 24,66 persen.

Rincian perbandingan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *Audited* adalah sebagai berikut:

**Tabel C.25  
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

No	Uraian	31-Des-23	31 Desember TA 2022 ( <i>Audited</i> )	Naik/ Turun (%)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	1.248.525.149	1.657.242.754	(24,66)
<b>Jumlah</b>		<b>1.248.525.149</b>	<b>1.657.242.754</b>	<b>(24,66)</b>

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tanggal pelaporan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Per 31 Desember 2023	1,248,525,149
Saldo Nilai Per 31 Desember 2022	2.176.984.514
<b>Transaksi Tambah:</b>	
Saldo Awal	1.657.242.754
Pengembangan KDP	9.476.715.092
Koreksi Nilai KDP Bertambah	2.859.404.430

Perolehan/Penambahan KDP	1.799.407.904
Perolehan Lainnya KDP	521.863.107
<b>Total</b>	<b>14.657.390.533</b>
<b>Transaksi Kurang:</b>	
Penghapusan/Penghentian KDP	807.697.250
Koreksi Pencatatan KDP	59.956.380
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	14.198.454.508
<b>Total</b>	<b>15.066.108.138</b>

Pada laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 terdapat perbedaan catat antara Rincian transaksi di KDP dan Neraca Laporan KDP antara lain:

Penjelasan Mutasi Tambah Kurang Sebagai Berikut:

Koreksi Nilai KDP Bertambah	2.795.817.403	
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	2.795.817.403	Pekerjaan Pembangunan GOR Mini, Asrama Serang, Saluran Irigasi, Gedung Rektorat, Gedung Asrama dan Aula Aup Jakarta

Pengembangan KDP	129.746.144	
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	129.746.144	Pembayaran uang muka pembangunan Gedung Display dan pembayaran Pengawasan Pembangunan Kolam Budidaya
Sekretariat BRSDMKP	194,922,050	berupa pekerjaan penggantian plafon lobby lt.2 dan ruang ka badan gedung I BRSDM

Perolehan Lainnya KDP	521.863.107	
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	521.863.107	Transaksi Perolehan lainnya atas koreksi salah pencatatan kodefikasi BMN untuk Pekerjaan Pembangunan GOR Mini, Gedung Rektorat, Gedung Asrama dan Aula Aup Jakarta

Perolehan/Penambahan KDP	1.260.767.274	
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon	24.872.880	Perencanaan Pembangunan Gedung Pengawasan Pelayanan Publik
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	205.384.000	Pembayaran Perencanaan Pembangunan Gedung Display dan pembayaran Pengawasan Pembangunan Kolam Budidaya
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	1.030.510.394	Pekerjaan Pembangunan GOR Mini, Asrama Serang, Saluran Irigasi, Gedung Rektorat, Gedung Asrama dan Aula Aup Jakarta



Sekretariat BRSDMKP	194,442,962	berupa pekerjaan rehab ruang transit gedung brsdm ancol di satker sekretariat brsdm
---------------------	-------------	---

<b>Koreksi Pencatatan KDP</b>	<b>24.872.880</b>	
Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon	24.872.880	Perencanaan Pembangunan Gedung Pengawasan Pelayanan Publik

<b>Penghapusan/Penghentian KDP</b>	<b>203.599.000</b>	
Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi	124.839.000	Penghapusan perencanaan pembangunan rumah dinas pimpinan dan Perencanaan Pembangunan Stasiun Lapangan sesuai dengan SK Menteri KP Nomor: 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 5 April 2023
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone	78.760.000	Penghapusan Perencanaan pembangunan Asrama Akademi Komunitas Morotai pada tahun 2019
Sekretariat BRSDMKP	438,093,950	penghapusan KDP pada anak satker puslatluh berupa pembuatan masterplan dan IMB pembangunan gedung training center dan pembuatan jalan rintisan BPPP Palembang sesuai dengan SK penghapusan Nomor 746/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 19 September 2023

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per Satuan Kerja Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6
<b>136111</b>	<b>Konstruksi Dalam pengerjaan</b>	<b>1.657.242.754</b>	<b>14.657.390.533</b>	<b>15.066.108.138</b>	<b>1.248.525.149</b>
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	0	68.664.025	0	68.664.025
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	15.470.000	93.572.820	0	109.042.820
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.148.931.944	14.395.069.388	14.811.398.888	732.602.444
7010101004	Jalan Dalam Pengerjaan	359.537.350	78.300.800	232.925.750	204.912.400
7010101005	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	0	21.783.500	21.783.500	0
7010101006	Irigasi Dalam Pengerjaan	133.303.460	0	0	133.303.460
<b>162311</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>41.803.527</b>	<b>41.803.527</b>	<b>0</b>
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	41.803.527	41.803.527	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.657.242.754</b>	<b>14.699.194.060</b>	<b>15.107.911.665</b>	<b>1.248.525.149</b>

Penjelasan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Kode Satker	Nama Satker	Saldo	KETERANGAN
-------------	-------------	-------	------------

1	Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	705.796.945	Perencanaan Situasi Kawasan Kampus Serang Rp70.383.460 Perencanaan Penanggulangan Banjir Kampus Serang Rp62.920.000 Perencanaan Renovasi Asrama Kampus Serang Rp78.720.400 Perencanaan Bangunan Kantin Rp19.932.400 Perencanaan GOR mini kampus Serang Rp83.950.240 tidak dilanjutkan senilai Rp315.906.100 dan dalam Proses usulan Penghapusan Pekerjaan Pembangunan GOR Mini, Asrama Serang, Saluran Irigasi, Gedung Rektorat, Gedung Asrama dan Aula Aup Jakarta sebesar Rp389.890.845, dilanjutkan di tahun 2024
2	Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	39.128.300	KDP anak Satker Pusat Pendidikan KP gedung bangunan berupa pembayaran honor Tim Pokja dan KDP Pembangunan Gedung Asrama di Morotai Rp23.658.300, dan KDP anak Satker Pusat Pendidikan KP merupakan KDP peralatan mesin (cold storage) Rp15.470.000, sudah terbit SK Penghapusan no 26/KEPMENKP/SJ/PL.750/2024 tgl 11 Januari 2024
3	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai (Poltek Kp Dumai)	114.927.688	Perencanaan pembangunan asrama dan aula tahun 2021 terkena refocusing dan untuk tahun 2022 belum ada anggaran untuk kelanjutannya
4	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Bitung	32.687.016	KDP berupa Perencanaan Pembangunan kolam ikan tahun 2021, sudah terbit SK Penghapusan no 39/KEPMENKP/SJ/PL.750/2024 tgl 12 Januari 2024
5	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	122.384.000	Pekerjaan pengembangan talud, tambak milenial dan ruang pelayanan, terdapat refocusing tahun 2021 dan tidak ada anggaran pembangunan di tahun 2022, rencana akan diajukan penghapusannya
6	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone	78.760.000	Perencanaan pembangunan Asrama Akademi Komunitas Morotai pada tahun 2019, dalam proses penghapusan/persetujuan Kementerian Keuangan-KPKNL sesuai Surat Kepala Biro keuangan kepada KPKNL Nomor 206/BRSDM.1/PL.750/1/2022 tanggal 24 Januari 2023.
7	Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi (Ak Kp Wakatobi)	42.600.000	Perencanaan rumah dinas pimpinan tahun 2021 dan Pembangunan Jalan di tahun 2021 rencana masih akan dilanjutkan di tahun 2024
8	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo	9.088.800	Perencanaan Pembangunan jalan Dermaga Tahun 2020, rencana akan diajukan usulan Penghapusannya
9	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong	181.912.400	Pembangunan Jalan dermaga tahun 2021, pekerjaan tidak dilanjutkan, Proses diajukan reviu itjen untuk penghapusan KDP no surat B.118/POLTEK.SRG/PL.710/1/2024 tgl 18 Januari 2024
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.248.525.149</b>	

Rincian Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

*Audited* sebagai berikut :

KODE SATKER	Nama Satker	Saldo	KETERANGAN
626402	Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	477.222.250	Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp477.222.250,00 merupakan KDP pada anak Satker Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan nilai Rp438.093.950,00 merupakan pembuatan masterplan, IMB pembangunan Gedung training center dan jalan rintisan BPPP Palembang dan KDP anak Satker Pusat Pendidikan KP dengan nilai Rp39.128.300,00 merupakan KDP peralatan mesin (cold storage) pada satker SUPM Waiheru dan KDP gedung bangunan di Morotai.
403875	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai (Poltek Kp Dumai)	114.927.688	Perencanaan pembangunan asrama dan aula tahun 2021 terkena refocusing dan untuk tahun 2022 belum ada anggaran untuk kelanjutannya
403839	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone	78.760.000	merupakan perencanaan pembangunan Asrama Akademi Komunitas Morotai pada tahun 2019
403838	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Kupang	45.972.300	Perencanaan pembangunan Jalan Kampus
239260	Bppp Bitung	32.687.016	KDP berupa Perencanaan Pembangunan kolam ikan tahun 2021
403828	Balai Riset Dan Pengembangan Air Payau Maros	122.384.000	Perencanaan Talud Tambak superintensif sebesar Rp63.712.000, Perencanaan Pembangunan tambak milenial shrimp farm sebesar Rp43.472.000, Perencanaan Ruang pelayanan, Toilet umum lab tanah dan lab basah senilai Rp15.200.000, semua KDP terkena refocusing dan belum tersedia anggaran di tahun 2022
634146	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong	505.928.400	KDP berupa Renovasi Pembangunan Gedung Rektorat Kampus Thun 2021
427511	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jakarta	315.906.100	Perencanaan renovasi kantin dan gor mini sebesar Rp78,720,400, Perencanaan renovasi asrama kampus serang sebesar Rp71,080,240, Pengelolaan kegiatan renovasi asrama kampus serang sebesar Rp39,585,428, Perencanaan penanggulangan banjir Serang sebesar 62,204,560, Pemetaan situasi Kawasan Kampus

			Serang sebesar 62,920,000, Pengelolaan kegiatan rencana penanggulangan banjir sebesar Rp1,395,472
427551	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	964.997.427	KDP berupa Konsultan Perencanaan, Biaya Perjalanan, Honor Pokja Pengembangan Gedung Rektorat tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat anggaran dilanjutkan dengan pembangunan fisik
427630	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	120.032.000	Perencanaan Pembangunan Gedung Rektorat tahun 2020 tahun 2020 terdapat kebijakan refocussing anggaran untuk percepatan penanganan covid dan di tahun 2021 belum ada anggaran untuk kelanjutannya
352595	AKKP Wakatobi	167.439.000	perencanaan Pembangunan stasiun lapang dan perencanaan rumah dinas pimpinan tahun 2020, di tahun 2021 belum ada anggaran untuk kelanjutannya.
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.946.256.181</b>	

Penjelasan atas Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Tahun 2023 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

#### **PUSRISHEL**

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pusat Riset Kelautan akan membangun Kelembagaan Riset Kelautan (*Integrated Aquarium & Marine Research Institute/IAMARI*) di Pangandaran Jawa Barat (PIAMARI) dan Pulau Morotai Prop. Maluku Utara (MIAMARI), yang dilakukan pembangunan secara kontrak tahun Jamak dengan jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan selama 16 (enam belas) bulan (TA 2017 s/d TA 2018). Pekerjaan yang direncanakan dengan kontrak tahun jamak tersebut telah memenuhi kelayakan teknis sebagaimana disampaikan oleh menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Surat Nomor BU.01.06-Mn/569 tanggal 20 September 2017 tentang pendapat Teknis Pembangunan *Marine Research Center* PIAMARI dan MIAMARI lebih dari

satu tahun anggaran.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pusat Riset Kelautan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.137.109.750,00. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp57.424.104.614,00 mutasi tambah sebesar Rp1.840.177.574,00 dan mutasi kurang sebesar Rp38.127.172.438,00

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pusat Riset Kelautan, antara lain:

- Transaksi Peloehan/Penambahan KDP (502) transaksi ini diperoleh hasil dari pengadaan barang dan jasa dalam pembayarannya dengan termin dan pekerjaannya dalam tahan penyelesaian, sehingga dari hasil pengadaan tersebut tidak bisa langsung dijadikan Aset menjadi aset tetap, transaksi tersebut berupa:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nilai Perolehan
1.	7.01.0101.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	3	15.248.000,-
2.	7.01.0101.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3	154.512.250,-
3.	7.01.0101.003	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	1	95.452.500,-
	JUMLAH		7	265.212.750,-

- Transaksi Pengembangan KDP (503) transaksi ini hasil dari Pengembangan KDP penambahan nilai KDP, transaksi tersebut berupa:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nilai Perolehan
1.	7.01.0101.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan		1.242.003.374,-
2.	7.01.0101.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		232.680.450,-
3.	7.01.0101.003	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan		100.281.000,-
	JUMLAH			1.574.964.824,-

- Transaksi Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi (599) transaksi ini hasil dari Perolehan dan Pengembangan KDP untuk dijadikan aset tetap, transaksi tersebut berupa:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nilai Perolehan
1.	7.01.0101.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	1.257.251.374,-
2.	7.01.0101.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	36.674.187.564,-
3.	7.01.0101.003	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	1	195.733.500,-

	JUMLAH		38.127.172.438,-
--	--------	--	------------------

- o Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP antara lain berupa :

No	Nama Barang	Nilai Perolehan
1.	A.c. Sentral	1.201.240.00
2.	Bangunan Gedung Permanen	36.674.187.56

- o Pengembangan Melalui KDP antara lain berupa : Pemasangan Jaringan Listrik di Gedung Kantor PUSRISKAN Ruang SATREP Pasar Minggu

No	Nama Barang	Nilai Perolehan
1.	Gedung Bangunan Dalam Renovasi	195.733.500,-

- o Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan KDP per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.137.109.750,00 tersebut terdiri dari:
  1. KDP Gedung dan Bangunan No. 1 sebesar Rp18.626.832.815,00 nilai KDP adalah nilai Pembangunan Gedung dan Bangunan MIAMARI yang berlokasi di Morotai Kab. Kepulauan Morotai Selatan Maluku Utara;
  2. KDP Gedung dan Bangunan no. 3 sebesar Rp1.275.329.435,00 Nilai DED Pembangunan Gedung Kelembagaan Riset MIAMARI Kep. Morotai;
  3. KDP Gedung dan Bangunan no. 15 sebesar Rp79.983.000,00 Nilai Kontraktual Pembangunan Pintu Gerbang PIAMARI;
  4. KDP Gedung dan Bangunan no. 16 sebesar Rp178.100.000,00 Nilai Kontraktual Pemasangan Instalasi Listrik Gedung Bangunan Aquarium MIAMARI Kep. Morotai;
  5. KDP Gedung dan Bangunan no. 16 sebesar Rp50.000.000,00 Nilai Kontraktual Penyusunan Naskah Akademik Balai Riset Laut Dalam PIAMARI Pangandaran; dan
  6. KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp926.864.500,00 nilai KDP adalah Nilai Kontraktual, Nilai Pengelola kegiatan dan Nilai DED Pembangunan Jembatan yang berlokasi di PIAMARI Pangandaran Ciamis Jawa Barat.

#### PUSAT PENDIDIKAN KP

- a. Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan pelaporan periode per 31 Desember 2019, yang belum diselesaikan pembangunannya sebanyak 1 paket pekerjaan yaitu KDP Peralatan dan Mesin berupa pembelian Cold Storage sebesar Rp22.720.000,00;
- b. Penambahan KDP merupakan pembangunan Gedung Tefa Politeknik KP Jembrana, pembangunan gapura dan pagar Politeknik KP Jembrana, Pembangunan Jalan dan Drainase Politeknik KP Jembrana.

#### **Poltek KP Bone**

KDP Sebesar Rp78.760.000,00 Merupakan Pembayaran 100% Konsultan Perencana Pembangunan Asrama Akademi Komunitas Morotai Dengan BAST Nomor 001/PL.2/PPHP/POLTEKKB.BN/PL.420/IV/2019, Tanggal 29 April 2019.

#### **a. ASET LAINNYA**

Saldo Aset lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2023 senilai Rp110.880,748,501,00. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 31 Desember 2022 senilai Rp112.497.295.358,00 Aset Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tak Berwujud	19.628.321.577
2	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
3	Aset lain-lain	62.722.271.684
4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(66.902.717.752)
	<b>Total</b>	<b>15.447.875.509</b>

Aset Lainnya berupa:

- i. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tidak mempunyai aset kemitraan dengan pihak ketiga.
- ii. Aset Tak Berwujud  
Saldo Aset Tak Berwujud Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Manusia Kelautan dan

Perikanan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.628.321.577,00 sedangkan pada Per 31 Desember 2022 *Audited* senilai Rp140.614.348.909,00 terdapat mutasi tambah senilai Rp17.503.700.598,00 dan mutasi Kurang senilai Rp138.489.727.930,00.

<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2023</b>	<b>19.628.321.577</b>
<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2022</b>	<b>140.614.348.909</b>
<b>Koreksi Tambah</b>	
Pembelian	52.975.400
Transfer Masuk	5.447.045.840
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	731.604.800
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.636.037.279
Reklasifikasi Masuk	5.636.037.279
<b>Total</b>	<b>17.503.700.598</b>
<b>Koreksi Kurang</b>	
Transaksi Normalisasi BMN	731.584.800
Transfer Keluar	131.900.395.572
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	145.703.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	76.007.279
Reklasifikasi Keluar	5.636.037.279
<b>Total</b>	<b>138.489.727.930</b>

Penjelasan Mutasi tambah kurang ATB sebagai berikut:

#### Transfer Masuk

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Riset Perikanan	3.028.009.140	Transfer masuk dari Pusriskel krn kebijakan 1 DIPA
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	55.675.000	Transfer masuk dari Bappl serang dan Jurluhkan Bogor
Sekretariat BPPSDM KP	2.363.361.700	Transfer masuk dari Pusdik dan Puslatluh

#### Reklasifikasi Masuk

Satker	Nilai	Penjelasan
Balai Riset Dan Observasi Laut	5.636.037.279	Reklas masuk citra satelit resolusi sedang dan peta tematik lainnya

#### Hibah Masuk

Satker	Nilai	Penjelasan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	47.825.400	Hibah masuk dari program ACIAR

#### Transfer Keluar

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan	(1.439.515.000)	Transfer ke Sekretariat BPPSDM KP karena kebijakan 1 DIPA



Pusat Pendidikan Kelautan Dan Perikanan	(923.846.700)	Transfer ke Sekretariat BPPSDM KP karena kebijakan 1 DIPA
Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	(55.675.000)	Transfer ke Poltek Kp Jakarta karena kebijakan 1 DIPA
Pusat Riset Kelautan	(722.973.840)	Transfer ke Pusat Riset Perikanan karena kebijakan 1 DIPA
Balai Riset Dan Observasi Laut	(1.543.115.000)	Transfer ke Pusdatin

### Reklasifikasi Keluar

Satker	Nilai	Penjelasan
Balai Riset Dan Observasi Laut	(5.636.037.279)	Reklas keluar citra satelit resolusi tinggi

### Penghentian Aset dari Penggunaan

Satker	Nilai	Penjelasan
Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan	(118.820.000)	Penghentian BMN berupa software Komputer yang sudah kadaluarsa masa pakainya
Pusat Riset Perikanan	(26.883.000)	Penghentian BMN karena sudah kadaluarsa

Terdapat aset tak berwujud lainnya di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia kelautan dan perikanan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp78.610.254.195,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Kode Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	032.12.238010	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung	25.000.000.	Website
2	032.12.403816	Pusat Riset Perikanan	317.105.000.	Software, data citra satelit, server, aplikasi
3	032.12.403818	Balai Riset Dan Observasi Laut	78.070.587.201	Berupa data citra radar satelit
4	032.12.403820	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	111.410.000.	Website, dan OTT SOF Hidras 3
5	032.12.403836	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan	76.151.994.	Software
6	032.12.652009	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung	10.000.000.	Website
<b>TOTAL</b>			<b>78.610.254.195</b>	

Nama Satker	Merk/Tipe	Tgl Perolehan	Nilai Buku
Pusat Riset Perikanan	Software Informasi IPTEK	7/30/2009	9.750.000
	Software (CD) Persuratan	5/3/2010	9.850.000

	Software (CD) Anilisis Kebij. I	5/3/2010	4.775.000
	Sotware Aplikasi Sistm Inf. Buoy (CD)	5/3/2010	39.800.000
	DATA CITRA SETELIT R.TINGGI	12/31/2010	34.300.000
	GIS SERVER MOBILE CLIENT	12/31/2010	49.900.000
	Aplikasi KIOSK DISPLAY	12/31/2015	67.155.000
	APLIKASI ANDROID	12/31/2015	91.575.000
SUPMN Kota Agung	Website	12/19/2011	10.000.000
Politeknik KP Bitung	Website PoltekKP-Bitung.ac.id	4/17/2015	25.000.000
LPTK	OTT SOF HIDRAS 3	7/29/2011	46.634.000
	Website LPTK	10/4/2014	26.000.000
BROL	PERENCANAAN PERBAIKAN TANGGUL	6/3/2016	49.159.000
	Radar data 1800 Scenes	12/31/2014	33.614.116.407
	Oceanography data VAIDASI DATA 2.5 TAHUN	12/31/2014	24.260.279.982
	Optical data 33 KM	12/31/2014	6.271.446.697

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp1.806.536.564.817,00)*

### C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai (Rp1.806.536.564.817,00) dan (Rp1.710.765.462.204,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.27**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**31 Desember 2023**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.455.058.616.217	1.317.054.617.258	2.772.113.233.475
2	Gedung dan Bangunan	1.684.337.201.059	328.780.429.431	2.013.117.630.490
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	349.388.079.750	154.573.340.235	503.961.419.985
4	Aset Tetap Lainnya	28.434.958.070	6.128.177.893	34.563.135.963
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>3.517.218.855.096</b>	<b>1.806.536.564.817</b>	<b>5.323.755.419.913</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak  
Berwujud  
Rp18.384.479.90  
2

### C.24 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp18.384.479.902,00 dan Rp19.332.907.160,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Jika dibandingkan periode 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 *Audited* untuk nilai Aset Tak Berwujud tidak mengalami penurunan sebesar 4,91 persen.

Rincian perbandingan nilai untuk aset tetap berupa Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *Audited* adalah sebagai berikut:

**Tabel C.28**  
**Rincian Aset Tak Berwujud**  
**31 Desember 2023**

No	Uraian	31 Desember TA 2023	31 Desember TA 2022 ( <i>Audited</i> )	Naik/ Turun (%)
1	Aset Tak Berwujud	18.384.479.902	19.332.907.160	(4,91)
<b>Jumlah</b>		<b>18.384.479.902</b>	<b>19.332.907.160</b>	<b>(4,91)</b>

Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2023</b>	<b>19.628.321.577</b>
<b>Saldo Nilai Per 31 Desember 2022</b>	<b>140.614.348.909</b>
<b>Koreksi Tambah</b>	
Pembelian	52.975.400
Transfer Masuk	5.447.045.840
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	731.604.800
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.636.037.279
Reklasifikasi Masuk	5.636.037.279
<b>Total</b>	<b>17.503.700.598</b>
<b>Koreksi Kurang</b>	
Transaksi Normalisasi BMN	731.584.800
Transfer Keluar	131.900.395.572
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	145.703.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	76.007.279

Reklasifikasi Keluar	5.636.037.279
<b>Total</b>	<b>138.489.727.930</b>

Penjelasan Mutasi tambah kurang ATB sebagai berikut:

### Transfer Masuk

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Riset Perikanan	3.028.009.140	Transfer masuk dari Pusriskel krn kebijakan 1 DIPA
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	55.675.000	Transfer masuk dari Bappl serang dan Jurluhkan Bogor
Sekretariat BPPSDM KP	2.363.361.700	Transfer masuk dari Pusdik dan Puslatluh

### Reklasifikasi Masuk

Satker	Nilai	Penjelasan
Balai Riset Dan Observasi Laut	5.636.037.279	Reklas masuk citra satelit resolusi sedang dan peta tematik lainnya

### Hibah Masuk

Satker	Nilai	Penjelasan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	47.825.400	Hibah masuk dari program ACIAR

### Transfer Keluar

Satker	Nilai	Penjelasan
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan	(1.439.515.000)	Transfer ke Sekretariat BPPSDM KP karena kebijakan 1 DIPA
Pusat Pendidikan Kelautan Dan Perikanan	(923.846.700)	Transfer ke Sekretariat BPPSDM KP karena kebijakan 1 DIPA
Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	(55.675.000)	Transfer ke Poltek Kp Jakarta karena kebijakan 1 DIPA
Pusat Riset Kelautan	(722.973.840)	Transfer ke Pusat Riset Perikanan karena kebijakan 1 DIPA
Balai Riset Dan Observasi Laut	(1.543.115.000)	Transfer ke Pusdatin

### Reklasifikasi Keluar

Satker	Nilai	Penjelasan
Balai Riset Dan Observasi Laut	(5.636.037.279)	Reklas keluar citra satelit resolusi tinggi

### Penghentian Aset dari Penggunaan

Satker	Nilai	Penjelasan
--------	-------	------------

Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan	(118.820.000)	Penghentian BMN berupa software Komputer yang sudah kadaluarsa masa pakainya
Pusat Riset Perikanan	(26.883.000)	Penghentian BMN karena sudah kadaluarsa

Terdapat aset tak berwujud lainnya di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia kelautan dan perikanan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp78.610.254.195,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
032.12.238010	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung	25.000.000.	Website
032.12.403816	Pusat Riset Perikanan	317.105.000.	Software, data citra satelit, server, aplikasi
032.12.403818	Balai Riset Dan Observasi Laut	78.070.587.201.	Berupa data citra radar satelit
032.12.403820	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	111.410.000.	Website, dan OTT SOF Hidras 3
032.12.403836	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan	76.151.994.	Software
032.12.652009	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung	10.000.000.	Website
<b>TOTAL</b>		<b>78,610,254,195.</b>	

Nama Satker	Merk/Tipe	Tgl Perolehan	Nilai Buku
Pusat Riset Perikanan	Software Informasi IPTEK	7/30/2009	9.750.000
	Software (CD) Persuratan	5/3/2010	9.850.000
	Software (CD) Analisis Kebij. I	5/3/2010	4.775.000
	Sotware Aplikasi Sistm Inf. Buoy (CD)	5/3/2010	39.800.000
	DATA CITRA SETELIT R.TINGGI	12/31/2010	34.300.000
	GIS SERVER MOBILE CLIENT	12/31/2010	49.900.000
	Aplikasi KIOSK DISPLAY	12/31/2015	67.155.000
	APLIKASI ANDROID	12/31/2015	91.575.000
SUPMN Kota Agung	Website	12/19/2011	10.000.000
Politeknik KP Bitung	Website PoltekKP-Bitung.ac.id	4/17/2015	25.000.000
LPTK	OTT SOF HIDRAS 3	7/29/2011	46.634.000
	Website LPTK	10/4/2014	26.000.000
BROL	PERENCANAAN PERBAIKAN TANGGUL	6/3/2016	49.159.000
	Radar data 1800 Scenes	12/31/2014	33.614.116.407
	Oceanography data VAIDASI DATA 2.5 TAHUN	12/31/2014	24.260.279.982

	Optical data 33 KM	12/31/2014	6.271.446.697
--	--------------------	------------	---------------

*Aset Lain-Lain*  
*Rp46.646.116.16*  
*5*

### C.25 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp46.646.116.165,00 dan Rp42.259.917.182,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas dan sampai tanggal pelaporan baru akan dilakukan usulan proses penghapusan BMN kepada Sekretariat BPPSDM KP.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2023</b>	<b>62.027.574.090</b>
Mutasi tambah:	-
- Reklasifikasi dari aset tetap	2.400.202.594
Mutasi kurang:	
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- Penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022 Audited</b>	<b>64.427.776.684</b>
Akumulasi penyusutan s.d. 30 September 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022 Audited</b>	<b>64.427.776.684</b>

Pada 31 Desember 2023 untuk Aset Lain-lain tidak mengalami kenaikan senilai Rp4.386.198.983,00 yang diperoleh dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Barang Milik Negara Semester II/Tahunan Tahun Anggaran 2023.

*Akumulasi*  
*Penyusutan dan*  
*Amortisasi Aset*  
*Lainnya*  
*(Rp56.093.521.67*  
*3)*

### C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp56.093.521.673,00) dan (Rp50.718.430.129,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.29**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**  
**31 Desember 2023**

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud:	18.384.479.902	(56.093.521.673)	(37.709.041.771)
Software	5.659.825.600	-	5.659.825.600
Aset Tak Berwujud Lainnya	518.675.394	-	518.675.394
<b>Jumlah</b>	<b>24.562.980.896</b>	<b>(56.093.521.673)</b>	<b>(31.530.540.777)</b>
Aset Lain-lain	46.646.116.165	-	46.646.116.165
<b>Jumlah</b>	<b>71.209.097.061</b>	<b>(56.093.521.673)</b>	<b>15.115.575.388</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp4.747.010.656*

### **C.27 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp4.747.010.656,00 dan Rp3.768.842.417,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.30**  
**Rincian Utang kepada Pihak Ketiga**  
**31 Desember 2023**

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	204.518.284	651.652.215
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.910.582.350	1.628.542.806
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.138.076.326	-
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	-	-
Dana Pihak Ketiga	1.488.047.396	1.488.647.396
Dana Pihak Ketiga Lainnya-BLU	5.786.300	
<b>Jumlah</b>	<b>4.747.010.656</b>	<b>3.768.842.417</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023, Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp4.747.010.656,00 dengan rincian:

- a. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar senilai Rp574.636.657,00 yang merupakan transaksi SPM Gaji Pegawai PNS Bulan Januari 2024 yang belum terbit SP2D nya pada 31 Desember 2023 yang sudah tercatat sebagai nilai akrual pada Tahun 2023, yaitu:

No	Nama Satker	Nilai
1	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	(28.346.464,)
2	SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	(63.158.082,)
3	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	(112.806.004,)
		<b>(204.310.550)</b>

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Per tanggal 31 Desember 2023 berasal dari 3 Satker dengan rincian:

- Kekurangan Gaji bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
  - Kekurangan uang makan bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
  - Kekurangan pembayaran gaji pokok bulan Desember 2023; dan
  - Kekurangan tunjangan kinerja bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- b. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar senilai Rp1.910.582.350,00 yang merupakan transaksi SPM yang belum terbit SP2D nya pada 31 Desember 2023 yang sudah tercatat sebagai nilai akrual pada Tahunan Tahun 2023, yaitu:



No	Nama Satker	Nilai
1	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	(45.083.359,)
2	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	(26.256.501,)
3	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	(45.942.295,)
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	(48.140.690,)
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	(81.831.635,)
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	(68.030.701,)
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	(25.797.270,)
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	(10.318.925,)
9	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	(8.791.669,)
10	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	(91.889.926,)
11	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	(9.396.272,)
12	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	(106.413.384,)
13	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	(63.487.835,)
14	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	(61.609.748,)
15	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	(61.416.738,)
16	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	(11.368.173,)
17	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	(42.843.154,)
18	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	(53.945.464,)
19	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	(32.771.310,)
20	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP)	(40.551.530,)
21	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	(214.609.356,)
22	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	(22.786.237,)
23	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	(51.096.910,)
24	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	(14.565.523,)
25	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	(10.742.600,)
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	(47.632.245,)
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	(102.463.556,)
28	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(195.750.079,)
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	(228.008.100,)
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	(53.218.930,)
31	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	(33.822.235,)
		<b>(1.910.582.350,)</b>

- c. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar senilai Rp0,00 yang merupakan transaksi SPM Belanja Modal yang belum dibuat SPP nya pada 31 Desember 2023 yang sudah tercatat sebagai nilai akrual pada Tahunan T.A 2022. yaitu:

No	Nama Satker	Nilai
1		
2		
3		
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

- d. Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar senilai Rp0,00 yang merupakan transaksi pada saat adanya resume tagihan atas permintaan Uang Persediaan pada Tahunan T.A 2023, yaitu:

No	Nama Satker	Nilai
1		0,
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

- e. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp1.138.076.326,00 yang merupakan kewajiban terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun belanja modal, yaitu:

No	Nama Satker	Nilai
1	PUSAT RISET PERIKANAN	(286.358.008,)
2	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	(13.449.347,)
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	(182.156.000,)
4	SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	(656.112.971,)
<b>TOTAL</b>		<b>(1.138.076.326)</b>

- f. Dana Pihak Ketiga senilai Rp1.488.047.396,00 yang terdapat pada satker Pusat Riset Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai
1	PUSAT RISET PERIKANAN	(1.488.047.396,)
<b>TOTAL</b>		<b>(1.488.047.396)</b>

Dana Pihak Ketiga Per tanggal 31 Desember 2023 berasal dari 2 Satker dengan rincian:

- Pada Satker Pusat Riset Perikanan senilai Rp1.488.047.396,00 merupakan sisa Kas Hibah Uang dari ACIAR dengan nomor register 2EU1XEUA senilai Rp949.918.483,00 dan CSIRO dengan nomor register 2LGLQQ1A senilai Rp538.128.913,00 yang telah dikembalikan ke negara donor sesuai dengan SP3HL tanggal 27 Desember 2022 dan kedua rekening hibah tersebut telah ditutup.
- g. Dana Pihak Ketiga lainnya BLU senilai Rp5.786.300,00 yang terdapat pada satker BPPP Tegal.

*Utang Yang  
Belum  
Ditagihkan  
Rp0,00*

### **C.28 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Hibah yang  
Belum Disahkan  
Rp8.820.342.608

### C.29 Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp8.820.342.608,00 dan Rp0,00.

Hibah yang belum disahkan merupakan Hibah langsung yang belum diterbitkan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung disebabkan belum tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2023.

Adapun rincian Hibah yang Belum Disahkan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.31**  
**Rincian Hibah yang Belum Disahkan**  
**31 Desember 2023**

No	Nama Satker	Nilai
1	PUSAT RISET PERIKANAN	(8.820.342.608)
	<b>TOTAL</b>	<b>(8.820.342.608)</b>

Saldo kas hibah pada Pusat Riset Perikanan merupakan pencatatan aset hasil dari Hibah Masuk hasil kerjasama Riset antara JICA (Negara Jepang) dan SATREP Pusat Riset Kelautan, Penerimaan Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dengan Nomor berita acara: B.327/BRSDM.2/KS.120/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Kerja Sama Riset SATREP Pusat Riset Kelautan dengan JICA Negara Jepang dimulai pada tahun 2017, dari kerjasama tersebut Pihak JICA menyediakan Barang barang untuk pelaksanaan Riset BlueCARES (Satrep), dengan diterbitkannya Register untuk Periode 3 Februari 2017 dengan Nomor Register 2LJNZYPA senilai JPY 78.753.059 atau setara dengan Rp.8.820.342.608,00. Setelah pelaksanaan kerja sama tersebut barang barang hasil dari Pihak JICA diserahkan ke Pusat Riset Kelautan pada tanggal 24 Maret 2023 dengan dituangkan dalam berita Acara Nomor .327/BRSDM.2/KS.120/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK.

Setelah berata acara itu diterima oleh TIM BMN Pusat Riset Kelautan, TIM BMN Pusat Riset Kelautan menginventarisir barang barang tersebut yang tertuang

dalam lampiran berita acara serah terima, dari hasil Inventaris Tim Inventaris Pusat Riset Kelautan barang barang yang tertuang dalam berita acara tersebut tidak semuanya ada, sehingga Pusat Riset Kelautan belum bisa mencatat barang barang tersebut sebagai aset Pusat Riset Kelautan dikarenakan sebgai barang barang tersebut tidak ada. Karena jumlah barang dan jumlah barang harus sesuai dengan jumlah dan nilai barang yang tertuang dalam berita acara.

Pelaksanaan Inventarisasi dilaksanakan 3 kali pada bulan April, Agustus dan Bulan November 2023, hasil inventarisasi pada bulan November barang barang dari hasil kerjasama antara SATREP Pusat Riset Kelautan dan JICA Negara Jepang barang sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara dan pada bulan Desember 2023 barang barang tersebut Tercatat pada Pusat Riset Kelautan. Untuk register untuk Periode 3 Februari 2017 dengan Nomor Register 2LJNZYPA

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp0,00

### C.30 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *Audited* masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp176.356.699,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi per 31 Desember 2023. *(Terlampir Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi)*

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama Satker	2023	2022
1	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	0,	(176.356.699,)
		0,	(176.356.699,)

Tidak terdapat Kas di Bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023, sedangkan pada 31 Desember 2022 *Audited* berasal dari Satker BPPP Ambon yang merupakan merupakan saldo TUP yang seharusnya merupakan anggaran kegiatan dengan sumber dana PNBPN, namun terjadi kesalahan pembebanan (dibebankan ke sumber dana RM) pada saat mengajukan permohonan TUP Desember 2022 pada SAKTI. Sesuai hasil konsultasi dengan KPPN Ambon, anggaran tersebut telah disetor ke Kas Negara menggunakan akun 815514 dengan NTPN 8C50B395ARQFJ6DB Tanggal 5 Januari 2023.

*Pendapatan  
Diterima di Muka  
Rp405.098.832*

### **C.31 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp405.098.832,00 dan Rp277.665.894,00.

Pendapatan Diterima di Muka pada BPPSDM KP merupakan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Berupa pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi dan Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima Dimuka.

**Tabel C.32**  
**Rincian Pendapatan Diterima di Muka**  
**31 Desember 2023**

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	205.237.611	121.465.006
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	70.462.221	156.200.888
Pendapatan Diterima di Muka BLU	129.399.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>405.098.832</b>	<b>277.665.894</b>

Rincian Pendapatan Sewa diterima dimuka senilai Rp405.098.832,00 periode 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel C.33**  
**Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka**

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	(2.928.000)	Jurnal atas pendapatan sewa diterima di muka untuk tahun 2023, merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya yaitu berupa sewa tanah seluas ( 3m x 2m) 6 meter persegi yang berdiri diatas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai untuk penempatan ATM milik PT. BRI (Persero) Tbk selama 3 (tiga) tahun senilai Rp17.568.000,00, nomor surat perjanjian sewa tanah B.1662/BRSDM-BPPP.BYW/PL.210/VII/2023 dengan perhitungan sbb: Rp17.568.000,00/ 3 tahun = Rp2.928.000,00/ tahun. Penghitungan awal pada bulan Juli 2023 dan berakhir pada bulan Juni 2026. Hak sewa yg belum diakui dalam laporan keuangan TA 2023 sebesar Rp2.928.000,00 (sewa bulan Juli s.d Desember 2023).
2	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	(19.209.967)	Jurnal atas Pendapatan Sewa atas Kantor BRPPUPP dengan Koperasi Penelitian dan penyuluhan di Kota Palembang sebesar Rp.13.377.884,- dan Pendapatan Sewa atas Gedung ATM Bank BNI sebesar Rp.5.832.084,- yang Diterima Dimuka pada tahun 2023
3	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	(55.947.500)	Jurnal penyesuaian khusus diatas merupakan jurnal pendapatan sewa diterima dimuka untuk semester II tahun 2023, merupakan pendapatan yang sudah diterima pemabayarannya yaitu berupa Sewa Lahan tanah seluas 5,06 m persegi yang terdiri diatas bedasarkan Sertifikat Hak Pakai untuk Ruang Pengoperasian ATM milik PT. BRI (Persero) Tbk selama 3 (Tiga) tahun senilai Rp. 57.546.000, nomor surat perjanjian sewa tanah 01/BRSDM-BRPBATPP/ PKS/XII/2023 selama 3 tahun mulai 22 Desember 2023 s.d 21 Desember 2026 dengan perhitungan sbb : Rp. 57.546.000/ 3 tahun = Rp. 19.182.000 / tahun. Sisa hak sewa yang belum diakui dalam laporan keuangan Semester II TA. 2023 sebersar Rp. 55.947.500
4	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	(17.933.332)	Jurnal penyesuaian atas pendapalan sewa tanah gedung dan bangunan dibayar dimuka dari ATM BNI dengan perhitungan: Jurnal balik alas pendapalan sewa sebelumnya senilai Rp.4.007.332,- dan Jurnal penyesuaian alas pendapalan sewa lahun ini senilai Rp17.933.332,
5	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	(70.619.218)	1. Jurnal atas pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa tanah, gedung dan bangunan kantor pemerintah di Poltek AUP untuk ATM Bank Mandiri senilai Rp5.646.805,00; 2. Jurnal atas pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa tanah, gedung dan bangunan kantor pemerintah di Kampus Bogor untuk ATM Bank BNI senilai Rp64.972.413,00;
6	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	(38.599.594)	Jurnal atas pendapatan diterima dimuka sewa PEMANFAATAN BMN (Yayasan SUPM Kalbar), sesuai: 1. SK Nomor 960/KEPMEN-KP/SJ/PL.720/2022, 28 November 2022 senilai Rp39.798.497,00 yang telah disetorkan ke Kas negara sesuai dengan NTPN D63688N3E1N108RT, 30 Desember 2022 berlaku 3 tahun; 2. SK Nomor 1001/KEPMEN-KP/SJ/PL.720/2022, 19 Desember 2022 senilai Rp12.320.000,00 yang telah disetorkan ke Kas negara sesuai dengan NTPN 0C13E6U8ECI868SP, 30 Desember 2022 berlaku 3 tahun dan telah dilakukan Jurnal balik Tahun Ke-1 (desember 2023) dari total 3 tahun (desember 2022 sd desember 2025) atas pendapatan diterima dimuka, sewa PEMANFAATAN BMN (Yayasan SUPM Kalbar) senilai Rp. 13.518.903
		(205.237.611)	

Rincian Perhitungan pengakuan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 senilai (Rp70.462.221,00) adalah sebagai berikut:

**Tabel C.34**  
**Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka**

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	(22.728.888)	1. Jurnal penyesuaian sewa sebagian tanah untuk ATM BTN periode 2022 s.d 2025 senilai Rp1.704.667 2. Jurnal penyesuaian sewa sebagian tanah untuk ATM BRI periode 2022 s.d 2025 senilai Rp1.704.667
2	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	(1.300.000)	Jurnal akrual atas pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka berupa biaya pendidikan semester ganjil 2023/2024 bulan jan s.d Feb 2024 senilai Rp1.300.000,-
3	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	(33.400.000)	Jurnal akrual atas pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka berupa biaya pendidikan semester ganjil 2023/2024 bulan jan s.d Feb 2024 senilai Rp33.400.000,00
4	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	(13.033.333)	Jurnal akrual atas pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka berupa biaya pendidikan semester ganjil 2023/2024 bulan jan s.d Feb 2024 senilai Rp13.033.333,-
		<b>(70.462.221)</b>	

Rincian Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka BLU per 31 Desember 2023 senilai Rp26.138.222,00 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.35**  
**Rincian Pendapatan Diterima di Muka BLU**

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	(129.399.000)	1. Jurnal penyesuaian pendapatan diterima dimuka untuk pembayaran pelatihan yang akan dilaksanakan Bulan Januari 2023 senilai Rp24.399.000,- 2. Jurnal penyesuaian pendapatan sewa aset pengolahan periode 1 Agustus 2023 s.d 31 Juli 2024 senilai Rp105.000.000,-
		<b>(129.399.000)</b>	

*Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00*

### **C.32 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp360.000,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara pada periode pelaporan. Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya pada 31 Desember 2023, yaitu:

**Tabel C.36**  
**Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya**  
**31 Desember 2023 dan 31 Desember TA 2022 Audited**

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1			
2			
		-	

Penjelasan Utang Jangka Pendek Lainnya Merupakan uang pajak yang belum disetor oleh bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023 karena uang diterima sudah diatas jam operasonal bank.

*Ekuitas*  
*Rp7.899.796.695.*  
*676*

### **C.33 Ekuitas**

Saldo Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp7.899.796.695.676,00 dan Rp7.964.170.647.372,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP-  
LO  
Rp29.923.299.103

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak- LO

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kelautan dan Perikanan adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat sektor Kelautan dan Perikanan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Peningkatan PNBP dari sektor Kelautan dan Perikanan ini berasal dari PNBP Non Sumber Daya Alam berupa pendapatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saldo Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp29.923.299.103,00 dan Rp16.316.563.834,00.

Jika dibandingkan PNBP sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, maka pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan nilai sebesar 83,39 persen.

Kenaikan nilai sebesar 83,39 persen untuk PNBP sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dikarenakan kegiatan operasional tugas dan fungsi BPPSDM telah berjalan secara normal serta program unggulan *Smart Fisheries Village* telah berkembang dan meningkat, hal ini menyebabkan beberapa pendapatan Negara mengalami kenaikan.

Perbandingan rincian PNBP sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 1**  
**Perbandingan PNB**  
**31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022**

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.696.524.107,00	4.425.803.239	51,31
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan	142.074.007,00	-	-
Pendapatan Penyediaan Barang	3.774.135.400,00	-	-
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	610.516.196,00	717.644.900	(14,93)
Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	38.310.000,00	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.472.093.971,00	-	-
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	108.210.360,00	15.772.205	586,08
Pendapatan Lain-lain BLU	84.126.998,00	4.585.000	1.734,83
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	13.637.334,00	4.545.778	200,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	41.884.700,00	66.577.988	(37,09)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	772.676.771,00	9.082.600	8.407,22
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	102.892.554,00	310.000	33.091,15
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	-	56.379.851	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	34.310.000,00	39.615.000	(16,70)
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	33.000.000,00	-	-
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	5.642.151.987,00	2.887.757.985	(78,21)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	629.181.210,00	1.011.308.750	46,09
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.477.394.625,00	1.470.475.135	81,20
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.664.551.466,00	1.121.044.430	(87,60)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	138.964.000,00	330.522.000	(2,01)
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	323.873.000,00	426.102.500	243,03
Pendapatan Biaya Pendidikan	1.461.669.167,00	2.019.431.966	68,59
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.404.615.000,00	1.405.970.000	(99,98)
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	275.625,00	-	-
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan	7.645.775,00	7.250.000	(100,00)
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	-	1.200.000	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	1.125.000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	85.970.767,00	252.143.765	(35,51)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	162.614.083,00	10.875.652	275.040,28
<b>Jumlah</b>	<b>29.923.299.103</b>	<b>16.285.523.744</b>	<b>83,74</b>

Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan disebabkan oleh:

1. Aktivitas kegiatan praktek, pelatihan dan pendidikan sudah berjalan normal sehingga mendorong kenaikan pendapatan; dan
2. Penyesuaian tarif atas jenis PNB atasan pemanfaatan SDA Perikanan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Pendapatan-LO Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan senilai Rp6.664.884.330,00 merupakan Pendapatan dari Diklat BST, BST KLM, BSTF, Rating, Peningkatan ke AT/ANKAPIN I, Upgrading SKK ke AN/ATKAPIN III, Ujian Upgrading SKK AN/ATKAPIN III, Revalidasi BST, Revalidasi BST KLM, Uji Kompetensi, Pelatihan Las Listrik, Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan. Terjadi Peningkatan karena adanya pembukaan kelas pelatihan baru seperti Rating dan peningkatan AN/ATKAPIN I pada BPPP Tegal senilai Rp5.561.786.589,00 dan Politeknik KP Sidoarjo merupakan pendapatan pendaftaran taruna baru, seleksi penerimaan taruna baru (seleksi kesehatan, psikotes, dan wawancara) senilai Rp1.103.097.741,00. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan PMK 198/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Estimasi pendapatan senilai Rp6.696.524.107,00;
2. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan senilai Rp142.074.007,00 merupakan pendapatan Jasa Pelatih di Luar Unit Penyelenggara pada BPPP Tegal senilai dan Politeknik KP Sidoarjo yang merupakan pendapatan Imbal jasa atas jasa SDM Politeknik KP Sidoarjo, seperti jasa Narasumber. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo dari estimasi pendapatan senilai Rp12.000.000,00;
3. Pendapatan Penyediaan Barang senilai Rp3.774.135.400,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp2.835.680.000,00, berasal dari:
  - a. Politeknik KP Sidoarjo merupakan pendapatan permakanan yang dibayar oleh taruna jalur umum dan pendapatan dari penjualan hasil produk TEFA Pengolahan (Batari, otak-otak, siomay, nugget, dll), TEFA Budidaya Air Payau (Udang vannamei, bandeng), TEFA Budidaya Air Tawar (Ikan Nila), TEFA Budidaya Air Laut (Udang vannamei), TEFA Wirausaha (Ikan Gurame, patin, bawal). Dasar pemungutan pendapatan

Permakanan taruna berdasarkan PMK 198/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Sedangkan dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo. Pendapatan akun ini pada TA 2023 meningkat karena pada TA 2022 terdapat peningkatan jumlah taruna jalur mandiri, pada TA 2022 hanya 12 taruna sedangkan pada TA 2023 sebanyak 144 taruna; dan

- b. BPPP Tegal merupakan Pendapatan Jasa Catering, Penjualan Produk Pengolahan dan Budidaya.
2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya senilai Rp610.516.196,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp512.400.000,00, yang berasal dari:
    - a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp607.416.916,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari TEFA Mekanisasi (Perbengkelan mobil, sepeda motor, cuci AC dan digital printing) dan TEFA Wirausaha berasal dari Kunjungan edukatif. Sedangkan dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan
    - b. BPPP Tegal senilai Rp3.100.000,00 merupakan Pendapatan dari perbaikan dan Cetak Ulang Sertifikat Pelatihan.
  3. Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah senilai Rp38.310.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan Pendapatan yang berasal dari Karcis Masuk Pulau Cemara pada satker BLU BPPP Tegal;
  4. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha senilai Rp1.472.093.971,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan dengan DJPT dan PSDKP, IFISH, Kompensasi Tetap Aquarium Indonesia Pangandaran pada satker BLU BPPP Tegal;
  5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU senilai Rp108.210.360,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp28.541.000,00 yang berasal dari:
    - a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp40.400.734,00 merupakan Pendapatan

BLU yang berasal dari bunga bank atas rekening operasional penerimaan, operasional pengeluaran, dan deposito. Pada tahun ini terdapat peningkatan pendapatan karena mulai tahun ini ada rekening deposito, dan peningkatan saldo di rekening operasional penerimaan, sehingga bunga yang didapatkan juga meningkat. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan

- b. BPPP Tegal senilai Rp67.809.626,00 merupakan Pendapatan Bunga rekening dan Deposito.
6. Pendapatan Lain-lain BLU senilai Rp84.126.998,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp564.108.000,00, yang berasal dari:
    - a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp5.186.998,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari TEFA Wirausaha yang berupa kegiatan wisata edukatif seperti penyewaan stand, penyewaan pancing, tikar, dan biaya parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Pendapatan tersebut mengalami peningkatan di tahun ini karena pada tahun sebelumnya tidak ada pendapatan tersebut. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan
    - b. BPPP Tegal senilai Rp78.940.000,00 merupakan Pendapatan dari pembuatan surat keterangan sehat peserta pelatihan.
  7. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah sebesar Rp13.637.334,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00.
  8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari sewa dapur, sewa laboratorium dan sewa ruang pertemuan. Sewa dapur ini merupakan penyedia bahan makan taruna yang menyewa dapur untuk memasak makanan untuk taruna. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp41.884.700,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp28.000.000,00;
  9. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan senilai Rp772.676.771,00 dari

estimasi pendapatan senilai Rp790.096.000,00, yang berasal dari:

- a. Politeknik KP Sidoarjo yang merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari sewa asrama taruna jalur umum. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan PMK 198/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Pendapatan akun ini pada TA 2023 meningkat karena pada TA 2023 terdapat peningkatan jumlah taruna jalur mandiri, pada TA 2022 hanya 12 taruna sedangkan pada TA 2023 sebanyak 144 taruna; dan
  - b. BPPP Tegal yang merupakan Pendapatan dari sewa Auditorium, sewa ruang kelas dan Workshop, Sewa Kamar Asrama/Bahari Residence, Sewa kamar *dormitory*/Hotel Aquarium Indonesia di Pangandaran. Terjadi Peningkatan Pendapatan dikarenakan pada tahun 2023 BPPP Tegal mulai mengelola secara komersil sewa kamar Bahari *Residence* dan Hotel Aquarium Indonesia, dan beberapa sewa lainnya seperti Sewa Aula, sewa kelas pada tahun sebelumnya (2022) menggunakan akun Sewa Gedung (424922).
10. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin senilai Rp102.892.554,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp61.749.000,00, yang berasal dari:
- a. Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp15.177.100,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari pendapatan sewa coldstorage. Pendapatan ini meningkat karena adanya peningkatan tonase yang menggunakan mesin coldstorage. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Kepdir Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan
  - b. BPPP Tegal senilai Rp87.715.454,00 merupakan Pendapatan dari Sewa *Cold Storage*, Sewa Kursi untuk Aula dan sewa *extra bed*.
11. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya senilai Rp34.310.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan perjalanan dalam rangka pengurusan sertifikat, perjalanan dalam rangka menjadi narasumber, perjalanan penyelenggaraan pelatihan pada BPPP Tegal;
12. Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU senilai Rp33.000.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan

- Pendapatan dari Penjualan Mesin Alat Pakan Ikan pada BPPP Tegal;
13. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp5.642.151.987,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan hasil samping Budidaya Udang, Kegiatan Pelatihan dan penjualan dari hasil samping praktek TEFA yang terdapat pada 26 Satker dari estimasi pendapatan senilai Rp5.760.612.000,00;
  14. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya senilai Rp629.181.210,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan hasil samping praktek TEFA yang terdapat pada 24 Satker dari estimasi pendapatan senilai Rp309.425.000,00;
  15. Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp1.477.394.625,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp448.314.000,00 yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari Sewa Rumah dinas yang dipotong langsung dari SPM gaji Induk Januari s/d Desember 2023, sewa pemanfaatan tanah peruntukan bangunan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan sewa lahan dari 33 Satker lingkup BPPSDMKP;
  16. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi senilai Rp2.664.551.466,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp1.337.119.000,00, yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Sewa Alat Selam, Sewa tambak Busmetik, Sewa Asrama, Sewa Ruang Rapat dan Kelas di 23 Satker lingkup BPPSDMKP;
  17. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya senilai Rp138.964.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp720.834.000,00 yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari Hasil Laboratorium Pelayanan Pemeriksaan Hama/Kesehatan/Penyakit Ikan/Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Parasit Bakteri Jamur Virus Enzim Hormon dan Protein dengan Metode Biologi (Pengkayaan) serta *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Konvensional *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dengan *Single Step* pada 7 Satker lingkup BPPSDMKP;
  18. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan senilai Rp328.873.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp415.580.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pendaftaran/seleksi masuk pendidikan sekolah dan politeknik di 11 Satker lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
  19. Pendapatan Biaya Pendidikan senilai Rp1.461.669.167,00 dari estimasi

pendapatan senilai Rp1.175.600.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Biaya SPP Politeknik di 11 Satker lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;

20. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan senilai Rp3.404.615.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp3.002.370.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pelatihan BST, BST-F, Revalidasi BST dan Upgrading SKK 60 Mil ke Ankapin/Atkapin III, di 9 Satker lingkup BPPSDMKPKP
21. Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual senilai Rp275.625,00 merupakan pendapatan dari Royalti Vaksin Ikan Satker BRPBATPP Sempur dengan estimasi pendapatan senilai Rp0,00;
22. Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan senilai Rp7.645.775,00 merupakan pendapatan dari Royalti atas Penjualan Wakatobi AIS dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00;
23. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi senilai Rp0,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp30.000.000,00;
24. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp85.970.767,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari Politeknik AUP Jakarta berupa pengembalian pekerjaan renovasi gedung;
25. Pendapatan Anggaran Lain-lain senilai Rp162.614.083,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 dari 4 satker Lingkup BPPSDMKP yaitu:
  - a. Pada Poltek KP Sidoarjo yaitu senilai Rp147.653.680,00 berupa Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan atas Paket Pekerjaan pengadaan Makan Taruna Tahun 2023 oleh CV. Reneo Maju Bersama;
  - b. Pada BPPP Medan yaitu senilai Rp155,00 yang merupakan setoran sisa TUP September 2023 pada Balai Diklat Perikanan Medan Tahun Anggaran 2023 dan sudah dilakukan tindak lanjut perbaikan;
  - c. Pada BPPP Banyuwangi yaitu senilai Rp82.748,00 yang merupakan karena kelebihan setor sisa TUP di bulan November 2023 sebesar Rp82.748,00.; dan
  - d. Pada Politeknik KP Bone yaitu senilai Rp14.877.500,00.



*Beban Pegawai*  
*Rp733.365.596.878*

## **D.2 Beban Pegawai**

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp733.365.596.878,00 dan Rp777.263.529.211,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jika dibandingkan beban pegawai sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun 2022, maka pada 2023 mengalami penurunan nilai sebesar 5,65 persen.

Penurunan nilai sebesar 5,65 persen untuk beban pegawai pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 disebabkan antara lain oleh:

1. Beban Gaji Pokok PNS dan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap penurunan beban pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2023. Penurunan beban ini disebabkan adanya penurunan jumlah pegawai (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang pensiun pada Tahun 2022;
2. Berkurangnya tenaga profesi guru karena peleburan SUPM ke Politeknik;
3. dan berkurangnya realisasi lembur pegawai.
4. Adanya koreksi atas temuan tugas belajar BPK.

Nilai perbandingan antara realisasi beban pegawai pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel D. 2**  
**Perbandingan Beban Pegawai**  
**Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	230.212.068.296	249.760.710.873	(7,83)
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.366.111	3.616.629	(6,93)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	17.287.473.345	18.738.519.002	(7,74)
Beban Tunj. Anak PNS	5.290.325.499	5.697.623.447	(7,15)
Beban Tunj. Struktural PNS	761.995.000	1.115.183.426	(31,67)
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.692.271.360	46.837.039.061	(17,39)
Beban Tunj. PPh PNS	1.168.740.855	1.689.017.794	(30,80)
Beban Tunj. Beras PNS	13.510.747.620	14.700.173.700	(8,09)
Beban Uang Makan PNS	36.848.510.700	41.600.341.250	(11,42)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70.350.000	71.300.000	(1,33)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1.213.350.000	1.245.265.000	(2,56)
Beban Tunjangan Umum PNS	2.603.809.616	2.836.290.850	(8,20)
Beban Tunjangan Profesi Guru	3.185.831.700	5.940.109.395	(46,37)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	9.994.067.450	10.004.142.610	(0,10)
Beban Gaji Pokok PPPK	15.866.610.100	13.384.848.000	18,54
Beban Pembulatan Gaji PPPK	382.129	296.432	28,91
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.041.302.700	856.725.200	21,54
Beban Tunjangan Anak PPPK	272.226.974	229.384.820	18,68
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.848.185.000	2.436.480.000	16,90
Beban Tunjangan Beras PPPK	977.887.260	799.661.640	22,29
Beban Uang Makan PPPK	3.357.110.550	2.812.199.800	19,38
Beban Uang Makan PPPK	1.275.000	-	-
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	1.620.000	-	-
Beban Tunjangan Umum PPPK	1.771.813.550	-	-
Beban Uang Lembur	4.786.000	1.376.448.900	(99,65)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	323.796.239.015	336.003.795.398	(3,63)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	22.583.251.048	19.124.379.384	18,09
<b>TOTAL</b>	<b>733.365.596.878</b>	<b>777.263.552.611</b>	<b>(5,65)</b>

*Beban Persediaan*  
*Rp18.638.491.150,*

### D.3 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp18.638.491.150,00 dan Rp16.862.932.687,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jika dibandingkan beban persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan

Tahun Anggaran 2022, maka pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 10,53 persen. Kenaikan nilai sebesar 10,53 persen untuk beban persediaan sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dikarenakan pada Tahun Anggaran 2023 sudah melakukan aktivitas operasional secara normal dan banyak transaksi yang dilakukan oleh satker terkait tuisi penyuluhan dan pengembangan. Selain hal tersebut terdapat koreksi nilai persediaan atas temuan BPK. Transaksi yang terjadi di beberapa satker lingkup Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Rincian Beban Persediaan sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 3**  
**Rincian Beban Persediaan Tahunan TA 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	12.224.894.691	10.915.032.243	12,00
Beban Persediaan bahan baku	2.584.876.667	3.066.706.050	(15,71)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	359.900	1.247.000	(71,14)
Beban Persediaan Lainnya	3.828.359.892	2.879.947.394	32,93
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>18.638.491.150</b>	<b>16.862.932.687</b>	<b>10,53</b>

Penjelasan Beban Persediaan yaitu:

- Kenaikan pada beban persediaan konsumsi sebesar 12,00 persen karena kegiatan operasional satker telah berjalan normal;
- Penurunan beban persediaan bahan baku senilai 15,71 persen karena berkurangnya pembelian stok bahan kimia, bahan pakan, Bahan Bangunan dan bahan bakar Minyak karena menurunnya kegiatan dalam bidang Riset karena seluruh peneliti sudah berpindah ke BRIN sehingga kegiatan laboratorium tidak beroperasi kembali;
- Beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga mengalami penurunan sebesar 71,14 persen; dan
- Beban persediaan lainnya mengalami kenaikan sebesar 32,93 persen untuk mendukung kegiatan operasional lainnya satker.

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp406.347.291.214,*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp406.347.291.214,00 dan Rp392.494.323.480,00.

Jika dibandingkan antara beban barang dan jasa pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan Tahunan Tahun Anggaran 2022, maka beban barang dan jasa mengalami penurunan nilai sebesar 3,62 persen.

Kenaikan nilai sebesar 3,62 persen tersebut dikarenakan telah terdapat akun baru beban "BLU" dan beban barang dan jasa pada Poltek KP Sidoarjo dan BPPP Tegal serta beban ekstrakomptabel pada Tahunan Tahun Anggaran 2023.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa sampai dengan Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 4**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan Tahun 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	79.058.430.354	73.954.477.677	6,90
Beban Pengadaan Bahan Makanan	30.578.467.359	42.437.809.741	-27,95
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	515.025.426	750.768.448	-31,40
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	284.666.152	206.625.488	37,77
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6.237.008.850	6.263.648.200	-0,43
Beban Barang Operasional Lainnya	9.574.903.327	4.363.103.808	119,45
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	463.382.537	2.077.560.692	-77,70
Beban Bahan	35.943.265.881	28.868.570.369	24,51
Beban Honor Output Kegiatan	45.728.508.954	55.164.826.008	-17,11
Beban Barang Non Operasional Lainnya	79.448.134.541	69.888.145.564	13,68
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	18.750.000		
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	223.265.522	2.140.922.400	-89,57
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.443.832.737		
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	1.533.082.178		
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	196.414.000		
Beban Langganan Listrik	22.463.327.897	22.173.168.186	1,31
Beban Langganan Telepon	236.514.412	237.326.624	-0,34
Beban Langganan Air	1.754.622.732	1.915.124.549	-8,38
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.211.827.045	5.624.936.527	10,43
Beban Jasa Pos dan Giro	231.000	3.206.600	-92,80
Beban Jasa Konsultan	462.126.500	803.883.437	-42,51
Beban Sewa	6.096.679.198	3.716.275.708	64,05
Beban Jasa Profesi	7.881.047.851	7.721.914.730	2,06
Beban Jasa Lainnya	62.684.083.544	60.034.928.966	4,41
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.444.003	1.005.298.972	-99,76
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	47.358.801	145.845.144	-67,53
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	36.108.173	14.850.000	143,15
Beban Barang	4.550.520.340	1.805.034.038	152,10
Beban Jasa	1.541.215.900	764.978.933	101,47
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	132.046.000	66.821.720	97,61
<b>Jumlah</b>	<b>406.347.291.214</b>	<b>392.150.052.529</b>	<b>3,62</b>

Kenaikan signifikan pada Belanja Barang dan Jasa pada BPPSDM terdapat pada:

1. Akun Beban Barang merupakan akun yang muncul karena terdapat BLU yaitu BPPP Tegal dan Poltek Sidoarjo pada 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp4.550.520.340,00 dan Rp1.805.034.038,00 yang berisi beban

- barang operasional dan non operasional;
2. Akun Beban Jasa merupakan akun yang muncul karena terdapat BLU yaitu BPPP Tegal dan Poltek Sidoarjo pada 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp1.541.215.900,00 dan Rp764.978.933,00 yang berisi belanja jasa operasional;
  3. Beban Barang Operasional Lainnya berupa tol pada kendaraan operasional, pengadaan baju dinas, pemeliharaan ruangan (pengharum ruangan) pada 34 satker; dan
  4. Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya pada Poltek AUP.

*Beban Pemeliharaan  
Rp98.972.343.624,*

#### **D.5. Beban Pemeliharaan**

Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp98.972.343.624,00 dan Rp49,040,544,584,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Jika dibandingkan antara beban pemeliharaan sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan Tahunan Tahun Anggaran 2022, maka sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 beban pemeliharaan mengalami kenaikan nilai sebesar 101,67 persen.

Kenaikan nilai sebesar 101,67 persen dikarenakan adanya kenaikan terhadap realisasi beban pemeliharaan peralatan dan mesin yang salah satunya digunakan untuk biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena adanya tambahan beberapa gedung Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Rincian beban pemeliharaan sampai dengan Tahunan Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 5**  
**Rincian Beban Pemeliharaan**  
**Tahunan Tahun 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.810.480.441	23.640.847.824	161,46
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	399.363.831	41.861.500	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.864.318.442	20.560.597.229	35,52
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	509.987.220	338.452.823	50,68
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.165.853.060	342.941.562	239,96
Beban Pemeliharaan Irigasi	838.921.961	12.413.000	6658,41
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.521.650.375	2.268.249.575	99,35
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.027.455.681	751.095.430	36,79
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	376.878.509	372.471.325	1,18
Beban Persediaan suku cadang	404.647.604	641.525.616	-36,92
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	52.786.500	70.088.700	-24,69
<b>Jumlah</b>	<b>98.972.343.624</b>	<b>49.075.988.584</b>	<b>101,67</b>

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp79,685.500.339*

#### **D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp79,685,500,339,00 dan Rp27.699.684.813,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Jika dibandingkan antara beban perjalanan dinas sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan Tahunan Tahun Anggaran 2022, maka sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 untuk beban perjalanan dinas mengalami kenaikan nilai sebesar 71,63 persen.

Kenaikan nilai sebesar 71,63 persen dikarenakan pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk perjalanan dinas kegiatan dan perjalanan dinas pimpinan, serta perjalanan dinas berupa kunjungan luar negeri pimpinan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas sampai dengan Tahunan Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 6**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	61.319.514.679	35.625.377.229	72,12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.384.389.504	1.608.818.170	48,21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.711.843.395	1.464.941.999	85,12
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.477.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.224.652.803	6.857.481.179	63,68
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.494.745.496	382.234.789	100,00
Beban Perjalanan	550.354.462	230.872.485	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>79.685.500.339</b>	<b>46.171.202.851</b>	<b>72,59</b>

*Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada Masyarakat  
Rp1.253.883.955*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.253.883.955,00 dan Rp803.856.570,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Jika dibandingkan antara Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan Tahunan Tahun Anggaran 2022 maka sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 untuk beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat mengalami kenaikan nilai sebesar 55,98 persen.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahunan Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel D. 7**  
**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
**31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	260.000	0,00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	291.467.330	588.151.750	-50,44
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	55.676.625	115.038.670	100,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	906.740.000	100.406.150	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.253.883.955</b>	<b>803.856.570</b>	<b>55,98</b>

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 antara lain diperoleh dari:

1. Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp291.467.330,00 diperoleh dari Satker:

NAMA SATKER	NILAI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	35.000.000,
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	2.000.000,
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	56.433.330,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	71.559.000,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	123.975.000,
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	2.500.000,
<b>TOTAL</b>	<b>291.467.330,</b>

2. Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp55.676.625,00 diperoleh dari Satker:

NAMA SATKER	NILAI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	13.855.000,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	41.502.500,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	319.125,
<b>TOTAL</b>	<b>55.676.625,</b>

3. Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat senilai Rp906.740.000,00 diperoleh dari Satker:

NAMA SATKER	NILAI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	5.777.000,
PUSAT RISET PERIKANAN	884.325.000,
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	16.638.000,
<b>TOTAL</b>	<b>906.740.000,</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp0,00*

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp463.190,00.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat penurunan dan kenaikan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

Rincian Beban Bantuan Sosial pada Tahunan Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 8**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial**  
**31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-23	31-Des-22	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	463.190	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>463.190</b>	<b>0,00</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp114.555.144.174*

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp114.555.144.174 dan Rp128.319.214.762,00.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 9**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Tahunan Tahun 2023 dan 2022**

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.126.611.081	63.599.302.377	-19,61
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.839.425.212	45.135.395.432	-0,66
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.233.965.619	9.442.318.381	-12,80
Beban Penyusutan Irigasi	6.399.659.472	6.511.129.368	-1,71
Beban Penyusutan Jaringan	1.813.306.482	1.816.957.575	-0,20
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	119.312.710	113.673.105	4,96
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	418.032.845	652.155.681	-35,90
Beban Penyusutan Properti Investasi	515.451.570		
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>113.465.764.991</b>	<b>127.270.931.919</b>	<b>-10,85</b>
Beban Amortisasi Hak Cipta	357.142	357.142	0,00
Beban Amortisasi Paten	710.746.004	740.503.208	-4,02
Beban Amortisasi Software	378.276.037	307.422.493	23,05
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>1.089.379.183</b>	<b>1.048.282.843</b>	<b>3,92</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>114.555.144.174</b>	<b>128.319.214.762</b>	<b>-10,73</b>

Jika dibandingkan antara beban penyusutan dan amortisasi pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan Tahunan Tahun Anggaran 2022, maka pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan terjadi penurunan beban penyusutan dan amortisasi sebesar 10,73 persen.

Penurunan nilai sebesar 10,73 persen sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 disebabkan karena penurunan beban penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah, penurunan beban penyusutan peralatan dan mesin, dan beban amortisasi paten.

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp1.439.114.710,00*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.439.114.710,00 dan Rp536.153,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan Tahunan Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 10**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  
**31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	724.337	172.514	319,87
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.438.074.338	4.494.322	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU	83.835		
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan	11.250		
Beban Penyisihan Piutang Jangka Panjang	220.950	14.068.755	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.439.114.710</b>	<b>18.735.591</b>	<b>7581,18</b>

Jika dibandingkan antara beban penyisihan piutang tak tertagih sampai dengan Tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan 2022, maka pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terjadi penurunan beban penyisihan piutang tak tertagih dengan nilai sebesar 96,59 persen.

*Beban Lain-lain  
Rp0,00*

#### **D.11 Beban Lain-lain**

Saldo Beban lain-lain merupakan beban untuk mencatat beban selain beban yang digunakan dalam operasional dalam suatu periode. Jumlah Beban lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Surplus /Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp3.713.823.965

## D.12 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan nilai senilai Rp3.713.823.965 dan Rp1.941.804.598,00. Rincian Kegiatan Non Operasional pada Tahunan Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 11**  
**Rincian Kegiatan Non Operasional**  
**31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022**

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>1.114.552.360</b>	<b>898.769.800</b>	<b>24,01</b>
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	13.982.999	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	859.534.706	551.144.446	55,95
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	255.017.654	333.642.355	(23,57)
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>1.696.370.095</b>	<b>1.916.344.883</b>	<b>(11,48)</b>
Beban Pelepasan Aset	1.696.370.095	1.916.344.883	(11,48)
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(581.817.735)</b>	<b>(1.017.575.083)</b>	<b>42,82</b>
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>40.661.644.785</b>	<b>6.028.152.074</b>	<b>574,53</b>
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	100.690.000	148.199.999	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	253.209.710	531.543.560	(52,36)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	681.675.625	366.465.200	86,01
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	86.972.562		#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang			
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	4.176.629.388	4.907.424.315	(14,89)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	35.362.467.500	74.519.000	47.354,30
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>35.661.155.585</b>	<b>796.926.867</b>	<b>4.374,83</b>
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	35.443.861.000	536.398.872	6.507,74
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	217.294.585	260.527.995	(16,59)
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>4.418.671.465</b>	<b>4.213.650.124</b>	<b>(4,87)</b>

*\*)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai Tahun 2017 sampai dengan saat ini.*

Pos Luar Biasa  
Rp0,00

### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Saldo Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D. 12**  
**Rincian Pos Luar Biasa**  
**31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022**

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	-	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas	-	-	0,00
Beban Persediaan	-	-	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Surplus/Defisit-LO  
(Rp1.419.915.395.476)

### D.14 Surplus/Defisit - LO

Saldo Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai (Rp1.419.915.395.476,00) dan (1.390.433.425.778,00).

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal  
Rp7.964.170.647.372,-*

### E.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp7.964.170.647.372,00 dan Rp8.065.512.831.205,00. Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan per 1 Januari 2023.

*Surplus(defisit) LO  
(Rp1.419.915.395.476,-)*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit senilai (Rp1.419.915.395.476,00) dan (Rp1.390.433.425.778,00). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp0,00*

### E.3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp0,00*

#### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan  
Rp133.114.700,-*

#### E 3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp133.114.700,00 dan (Rp75.376.722,00)

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Rp(84.398.430,)*

#### E 3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai adalah masing-masing senilai

Rp(84.398.430) dan Rp 7.003.074,00

*Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00*

### E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi Rp3.682.230.780,-*

### E.3.5. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp3.682.230.780,00 dan Rp6.787.930.254,00.

Rincian Koreksi Atas Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi diperoleh dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp3.618.946.492,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel E. 1**

**Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

No	Satker	Nilai
1	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	57.505.900,
2	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	(695.188.988,)
3	Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (AK KP Wakatobi)	12.037.814,
4	Pusat Riset Perikanan	137.222.706,
5	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	94.701.000,
6	Loka Riset Perikanan Tuna	(492.232.450,)
7	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	(2.963.949.557,)
8	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	(1.254.593.834,)
9	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	17.760.000,
10	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	(21.253.417,)
11	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	(43.104.148,)
12	Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek AUP) Jakarta	3.183.218.775,
13	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	(25.725.000,)
14	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	214.062.192,
15	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru	(250.919.917,)
16	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	(77.828.659,)
17	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana (Poltek KP Jemberana)	(147.129.252,)
18	Sekretariat Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	(896.179.456,)
19	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	192.735.114,
20	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung	(568.831.880,)
	<b>TOTAL</b>	<b>(3.592.693.057,)</b> ,



**Tabel E. 2**  
**Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi**

No	Satker	Nilai
1	Pusat Riset Perikanan	71.442.500,
2	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	(2.388.750,)
3	Balai Besar Riset Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	(5.400.000,)
4	Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek AUP) Jakarta	39.058.527,
5	Sekretariat Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	(257.250.000,)
	<b>TOTAL</b>	<b>(154.537.723,)</b>

Lain-lain  
Rp310.273,-

### E.3.6 Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp310.273,00 dan (Rp128.905.890,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel E. 3**  
**Koreksi Lain-lain**

No	Satker	Nilai
1	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	(20.960.000,)
2	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	(1.428.485.977,)
3	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	(4.522.275,)
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	(4.812.273,)
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	(675.804,)
6	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	(70.150.880,)
7	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	(7.192,)
8	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	(16.355,)
9	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	(4.639.934,)
10	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	(1.440.373,)
11	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	(2.985.000,)
12	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	(36.229.025,)
13	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	(27.173.510,)
14	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	(2.089.500,)
15	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP)	(9.701.250,)
16	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	(21.228.325,)
17	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	(178.781,)
18	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	(48.100,)
19	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	(11.900.299,)
20	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	(105.000.000,)
21	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	(46.466.500,)
22	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(59.972,)
23	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	(21.807.350,)
24	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	(9.964.925,)
	<b>TOTAL</b>	<b>(1.830.543.600,)</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp1.349.979.953.130,-

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.349.979.953.130,00 dan Rp1.282.550.640.099,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel E. 4**  
**Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas**

Transaksi Antar Entitas	31-Des-23	31-Des-22
Diterima dari Entitas Lain	Rp 18.186.782.117	Rp 12.970.714.957
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp (1.333.354.518.437)	Rp (1.247.824.153.039)
Transfer Keluar	Rp 137.599.320.218	Rp 110.922.774.535
Transfer Masuk	Rp (135.857.754.115)	Rp (97.804.126.880)
Pengesahan Hibah Langsung	Rp (18.323.868.129)	Rp (64.273.606.186)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Rp -	Rp 1.969.709.118
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	Rp (18.229.914.784)	Rp 1.488.047.396
<b>Jumlah</b>	<b>Rp (1.349.979.953.130)</b>	<b>Rp (1.282.550.640.099)</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

##### E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain DDEL/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL senilai Rp18.186.782.117,00 sedangkan DKEL senilai (Rp1.333.354.518.437,00).

##### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai (Rp135.857.754.115,00) dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp137.599.320.218,00.

Rincian Transfer Masuk/Keluar Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Transfer Masuk:

No	Satker	Nilai
1	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	(648.000,)
2	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	(4.895.925.419,)
3	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	(8.070.000,)
4	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	(2.640.000,)
5	Loka Riset Perikanan Tuna	(17.175.000,)
6	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	(9.968.520,)
7	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	(109.779.750,)
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan	(110.575.100,)
9	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Kupang	(19.543.159.030,)
10	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone	(110.160.684.482,)
11	Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek Aup) Jakarta	(735.000.000,)
12	Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan	(242.913.909,)
13	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	(21.214.905,)
	<b>Total</b>	<b>(135.857.754.115,)</b>

Transfer Keluar:

No	Satker	Nilai
1	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Supm) Negeri Kupang	19.543.159.030,
2	Pusat Riset Perikanan	1.057.567.718,
3	Balai Riset Perikanan Laut	4.895.925.419,
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	17.175.000,
5	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	463.568.759,
6	Balai Riset Pemuliaan Ikan	1.620.000,
7	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone	110.160.684.482,
8	Sekretariat Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.459.619.810,
	<b>Total</b>	<b>137.599.320.218,</b>

Pengesahan Hibah  
Langsung  
(Rp18.323.868.129,)

### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023 senilai (Rp18.323.868.129,00).

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023 adalah Rp0,00.

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan transaksi pencatatan hibah tahun sebelumnya yang belum selesai senilai (Rp18.229.914.784,00) pada Satker Pusat Riset Perikanan. Rincian pengesahan Hibah Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

#### *Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Hibah Langsung 31 Desember TA 2023*

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Uang	-Rp 3.616.503.000,00
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp (3.616.503.000)</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp (3.616.503.000)</b>

Ekuitas Akhir  
Rp7.899.796.695.676,-

### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp7.899.796.695.676,00 dan Rp7.964.170.647.372,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat perubahan sistem aplikasi dan regulasi pelaporan keuangan pemerintah, dari sebelumnya pada Tahun 2021 menggunakan Aplikasi Saiba, Simak BMN dan Persediaan di Tahun 2022 berubah menggunakan Aplikasi *Online* terintegrasi (SAKTI dan MONSAKTI).

MONSAKTI merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring, interkoneksi, rekonsiliasi dan penyusunan LK. Data yang ditampilkan dan diolah MONSAKTI berasal dari data SAKTI didukung data SPAN dan data aplikasi lain yang terkait. MONSAKTI dikembangkan selain untuk memenuhi kebutuhan para pengguna SAKTI juga dalam rangka menjaga Performance SAKTI dengan memisahkan fungsi data transaksional (OLTP) dan data pelaporan (OLAP).

Terdapat Revisi DIPA yang mengubah nilai pagu anggaran semula senilai Rp1.383.637.166.000,00 menjadi senilai Rp1.390.279.515.000,00 disebabkan kenaikan belanja peralatan dan mesin dan belanja modal satker BLU.

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Jumlah Satker lingkup BPPSDMKP Tahun 2023 sebanyak 41 Satker aktif dan 2 (satu) Sakter Inaktif. Satker Aktif terdiri dari 2 (dua) Satker Kantor Pusat dan 39 Satker Kantor Daerah;
2. Berdasarkan data MonSAKTI dan Laporan Keuangan yang disampaikan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) sampai dengan 31 Desember 2023, Realisasi Belanja senilai Rp1.342.845.268.762,00, atau sebesar 98,36% dari pagu anggaran senilai Rp1.365.279.515.000,00, dengan rincian:
  - a) Realisasi Belanja Pegawai (52) senilai Rp734.036.420.418,00 atau 98,81% dari pagu senilai Rp742.912.977.000,00;
  - b) Realisasi Belanja Barang (52) senilai Rp570.985.639.092,00 atau 97,91% dari pagu senilai Rp583.146.966.000,00;
  - c) Realisasi Belanja Modal (53) senilai Rp37.823.209.252,00 atau 96,44% dari pagu senilai Rp39.219.572.000,00;
  - d) Belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 senilai Rp690.750.421,00 atau 96,85% dari pagu senilai Rp713.203.000,00, dengan rincian pada Tabel F.1.

**Tabel F.1**  
**Realisasi Anggaran Belanja Covid-19 lingkup BPPSDMKP per 31 Desember 2023**

No	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521131	Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	479.898.000	462.897.896	96,46
2	521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	228.050.000	222.608.522	97,61
3	521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi COVID-19	2.800.000	2.800.000	100
4	522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	2.455.000	2.444.003	99,55
<b>Total</b>			<b>713.203.000</b>	<b>690.750.421</b>	<b>96.85</b>

**Penyajian LK:**

**A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA):**

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp11.242.545.045,00 atau 45,46% dari estimasi pendapatan senilai Rp24.731.913.000, Angka-angka tersebut tidak terdapat koreksi.
2. Belanja  
Realisasi Belanja senilai Rp585.668.474.149,00, atau sebesar 42,13% dari pagu anggaran senilai Rp1.390.279.515.000,00, dengan rincian:
  - a. Realisasi Belanja Pegawai (52) senilai Rp365.606.198.992,00 atau 47,44% dari pagu senilai Rp770.600.000.000,00;
  - b. Realisasi Belanja Barang (52) senilai Rp208.618.066.780,00 atau 37,54% dari pagu senilai Rp555.690.043.000,00; dan
  - c. Realisasi Belanja Modal (53) senilai Rp11.444.208.377,00 atau 17,88% dari pagu senilai Rp63.989.472.000,00.

**B. Laporan Operasional :**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1.424.334.066.941,00)  
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp4.418.671.465,00  
Sehingga surplus/defisit LO senilai Rp(1.419.915.395.476,)

**C. Laporan Perubahan Ekuitas :**

Ekuitas awal senilai Rp7.964.170.647.372,00  
Surplus/Defisit LO senilai Rp(1.419.915.395.476,00)  
Ekuitas akhir senilai Rp7.899.796.695.676,00

**D. Neraca :**

1. Jumlah Aset senilai Rp7.913.769.147.772,00 terdiri dari:
  - a. Aset Lancar senilai Rp16.417.191.777,00

- b. Aset Tetap senilai Rp7.840.323.998.328,00
  - c. Aset Lainnya senilai Rp10.077.895.720
2. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas senilai Rp7.913.769.147.772,00 yaitu:  
Kewajiban berupa Kewajiban senilai Rp13.972.452.096;
  3. Ekuitas senilai Rp7.899.796.695.676,00

Catatan :

1. Persediaan

Persediaan senilai Rp5.541.349.905,00 dan tidak terdapat koreksi

Adapun catatan atas akun ini ialah terdapat barang persediaan bernilai lebih Rp1.000.000,00 yaitu adaptor USAMS 44 senilai Rp1.038.960,00 dan Logitech keyboard senilai Rp1.109.667,00, yang seharusnya dicatat sebagai aset pada Sekretariat BPPSDMKP, dan pencatatan persediaan AUP tahun berjalan.

3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya senilai Rp30.201.954.721,00.

Adapun catatan pada akun ini ialah terdapat nilai pada akun Aset Tetap Renovasi total senilai Rp4.975.198.260,00 terdiri dari senilai Rp2.437.354.810,00, yang merupakan pekerjaan dari tahun 2019 s.d 2022, seharusnya dilakukan TK - TM (dari sekretariat BPPSDMKP ke Biro umum) ke aset yang dilakukan renovasi, pada sekretariat BPPSDMKP dan senilai Rp2.537.843.450,00 pada satker pusrisikan berupa pengurangan yang di saumlaki; (Proses)

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp6.095.161.275,00 dan tidak terdapat koreksi. Adapun catatan pada akun ini antara lain :

- a. Masih tercatat senilai Rp114.927.688,00 (tidak dilanjutkan lagi) yang sedang proses penghapusan pada Politeknik KP Dumai (Proses);
- b. Masih tercatat senilai Rp4.664.097.004,00 (tidak dilanjutkan lagi) yang sedang proses penghapusan pada Politeknik AUP Jakarta (Proses);
- c. Masih tercatat senilai Rp477.222.250,00 (tidak dilanjutkan lagi) yang sedang proses penghapusan pada Sekretariat BPPSDMKP (Proses);
- d. Masih tercatat senilai Rp181.912.400,00 (tidak dilanjutkan lagi) yang sedang proses penghapusan pada Politeknik KP Sorong (Proses);

5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi  
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp(297.966.636,00). Adapun koreksi/catatan atas akun ini ialah terdapat senilai

Rp(297.966.636,00), seharusnya bernilai sama dengan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp(156.824,545,00), pada Sekretariat BPPSDM (Proses);

#### 4. Catatan atas Keuangan (CaLK) dan CLBMN

##### 1. CaLK

- a. Terdapat Koreksi Audited atas temuan BPK yang dijelaskan pada poin F.5
- b. Terdapat Hibah yang Belum Disahkan yang akan disahkan pada 2024 senilai Rp8.820.342.608,00.

##### 2. CALBMN

- a. Penjelasan terdapat Transfer Masuk berupa ikan senilai Rp2.640.000,00 dari BPBAT Sungai Gelam, pada BRUPP Palembang;
- b. Penjelasan terdapat likuidasi BMN dari SUPM Kupang ke Poltek Kupang sesuai dengan BAST Nomor B.154/BPPSDM-POLTEK.KPG/PL.740/II/2023 tanggal 3 Februari senilai Rp32.589.626.718,00, namun terdapat kesalahan penulisan nilai pada BAST dan CaLBMN yang tidak sesuai dengan Neraca pada aplikasi SAKTI, yaitu :
- c. Penjelasan atas transfer masuk berupa dari BBAT Sukabumi benih ikan nila sebanyak 10 ribu ekor senilai Rp1.300.000,00 dan BRPI berupa calon induk ikan nila sebanyak 120 ekor senilai Rp1.620.00,00 ke satker BRPBATPP; dan
- d. Penjelasan atas pelepasan aset senilai Rp17.676.000,00 berupa hasil penjualan lelang BMN 5 unit kendaraan Roda 2, pada BPPP medan.

#### Koreksi Satker pada periode Adj 1, yaitu:

##### 1. Satker Sekretariat BPPSDMKP

Satker Sekretariat BPPSDMKP menyerahkan Aset Tetap Renovasi senilai Rp2.437.354.810,00, yang merupakan pekerjaan dari tahun 2019 s.d 2022 kepada Biro Umum, dan selanjutnya melakukan TK -TM. Terhadap hal tersebut dilakukan pada Tahunan I 2023;

2. Politeknik AUP untuk melakukan penghapusan KDP senilai Rp315.906.100,00 yang tidak dilanjutkan lagi pekerjaannya. Terhadap hal tersebut dilakukan pada Tahunan I 2023;
3. Politeknik KP Sorong ,penghapusan KDP senilai Rp181.912.400,00 yang tidak dilanjutkan lagi pekerjaannya. Terhadap hal tersebut dilakukan pada Tahunan I 2023;
4. Penjelasan dalam CaLK atas Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN sebanyak 65 Transaksi senilai Rp5.311.858.425,00 pada 4 (Empat) Satker yaitu Balai Pelatihan dan



- Penyuluhan Perikanan Ambon, Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Medan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek AUP) Jakarta, dan Sekretariat BPPSDMKP;
5. BPPP Tegal melakukan pencatatan dan penyajian Properti Investasi berupa Gedung dan bangunan pada satker BP3 Tegal sebanyak 1 NUP senilai Rp47.936.996.038,00. Terhadap hal tersebut dilakukan pada Tahunan I 2023;
  6. Koreksi akun belanja (521252) versus kode BMN pada satker BPPP Ambon belanja barang peralatan mesin ekstrakomtabel senilai Rp44.733.100,00 menjadi belanja modal peralatan mesin (532111). Terhadap hal tersebut dilakukan pada Tahunan I 2023;
  7. Koreksi kodefikasi belanja Pada satker Politeknik AUP Jakarta berupa jasa pelabuhan perikanan senilai Rp2.120.000,00 yang merupakan sewa kolam renang, menjadi sewa gedung atau bangunan. Terhadap hal tersebut dilakukan pada Tahunan I 2023.

### **F.3 PENGUNGKAPAN BMN**

#### **F.3.1 Properti Investasi**

Sehubungan dengan terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (PSAP 17) yang mulai berlaku efektif penerapannya di tahun 2022, terdapat kemungkinan satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintah pusat untuk melakukan reklasifikasi keluar dari pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya atas penyajian aset berwujud yang bersifat properti di masing-masing Neraca per 31 Desember 2023.

BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi antara lain:

- Tanah yang dikuasai dengan tujuan kenaikan nilai
- Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan
- Bangunan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas & disewakan kepada pihak lain
- Bangunan yang belum terpakai dan untuk disewakan
- Bangunan infrastruktur yang disewakan kepada pihak lain

Pada Laporan Keuangan dan BMN Per 31 Desember 2023 Audited Satuan kerja lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) belum tercatat adanya perubahan Aset Tetap ke Properti Investasi. Berdasarkan identifikasi properti investasi, BPPSDMKP memiliki 1 (satu) nup barang berupa Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria properti investasi. Daftar BMN tersebut sebagai mana pada table dibawah ini:

No	Nama Satker	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Kuantitas (tanah = m <sup>2</sup> / GB = Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	BPPP Tegal	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	4010105001	2	1	51.545.157.028	2.061.806.280	3.608.160.990	47.936.996.038

Selanjutnya BPPSDMKP berkoordinasi dengan Biro Keuangan selaku Pengguna Barang untuk proses perubahan Aset Tetap ke Properti Investasi melakukan reklasifikasi asset ke Properti Investasi pada Tahunan I 2023.

### F.3.2 Asuransi BMN

Regulasi terkait asuransi BMN sudah dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Disebutkan dalam Pasal 45 (1) bahwa Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara. Beberapa tahun semenjak ditetapkannya PP 27, maka terbitlah pmk 97 tahun 2019 mengatur tentang subyek dan obyek hingga tata cara pengasuransian BMN ini, pemerintah semakin menunjukkan keseriusan dalam mengelola aset negara.

Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) menjadi kebutuhan penting sebagai bagian dari mitigasi risiko bencana, sehingga Pemerintah telah menetapkan bahwa pengasuransian BMN pada seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan terhitung mulai TA 2021, BMN yang dapat diasuransikan adalah berupa gedung dan bangunan dengan kriteria sebagai berikut:

mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang dan menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada Tahun 2022 Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengajukan usulan Rencana Pengasuransian Barang Milik Negara TA. 2023 pada 2 satker lingkup BPPSDMKP sesuai dengan surat usulan ke Biro Keuangan nomor 471/BPPSDM.1/PL.760/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 15 unit Gedung dan Bangunan dengan total nilai Rp61.079.762.549 untuk satuan kerja:

- Balai Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol,
- Politeknik KP Jembrana dan Loka Riset Perikanan Tuna Benoa.

Pada Tahun 2023 Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengajukan usulan Rencana Pengasuransian BMN TA.2024 pada 23 satker lingkup BPPSDMKP sesuai dengan surat usulan ke Biro Keuangan nomor 1280/BPPSDM.1/PL.710/VI/2023 tanggal 16

September 2023 sebanyak 320 unit Gedung dan Bangunan dengan total nilai Rp652.165.087.587.

#### **F.4 PERMASALAHAN BMN**

##### **F.4.1 Tanah yang belum bersertifikat**

1. Satker LRBRL Gorontalo Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah hasil hibah BMD dari Pemrov.Gorontalo yang dikuasai/ditatausahakan, yaitu belum adanya bukti kepemilikan tanah pada dua bagian tanah. Total luas tanah yang belum ada bukti kepemilikannya yaitu 125.691 m<sup>2</sup>. Hingga saat ini proses penyelesaian masih tetap dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait seperti Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
  - a. Bidang 1 dengan luas 68.776 M2, dimana terdapat tanah yang dibeli/dibebaskan oleh LRBRL tahun 2014 seluas 1.314 M<sup>2</sup> dan tanah yang masih milik pemprov Gorontalo seluas 6.194 M<sup>2</sup>;
  - b. Bidang II dengan Luas 115.021, dimana dalam bidang tanah tersebut terdapat tanah seluas 58.106 M2 masih milik Pemprov. Gorontalo yang belum diserahterimakan.
2. Tanah SUPM Negeri Ladong dengan luas total 153.053 m2 dengan rincian sebagai berikut:
  - Luas tanah 51.909 m2 An. Pemerintah RI Cq. Kementerian KKP Luas tanah 81.635 m2 An. Pemda Aceh;
  - Luas tanah 12.010 m2 An. Pemda Aceh, Luas tanah 5.500 m2 An. Pemda Aceh, Luas tanah 1.999 m2 An. Pemda Aceh (Akta Jual Beli).Tanah yang saat ini masih bersertifikat An. Pemda Aceh dan telah disampaikan permohonan hibah oleh BPPSDM-KP dengan nomor surat 27/BPPSDM/I/2019 Tanggal 8 Januari 2019.
3. Tanah SUPM Waiheru seluas 3 Ha yang berlokasi di Desa Waiheru, Kec. Baguala Kota Ambon Prov. Maluku, belum bersertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan masih terdapat gugatan dari masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
4. Aset Tanah pada Satker Pusat Riset Kelautan yang berlokasi di Desa Juanga Kec. Morotai Selatan, Kb. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara seluas 60.000 m2 belum bersertifikat disebabkan belum tersedia naskah hibah.

#### F.4.2 Sengketa Aset Tanah Yang Belum terselesaikan

1. Tanah SUPM Waiheru seluas 3 Ha berdasarkan surat Naskah Perjanjian Hibah No.421.3.431 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku pada tanggal 19 Januari 2016 terdapat laporan atas nama kantor Advokat & Konsulting Hukum SMR & Partner yang disampaikan kepada Ombudsmen RI Perwakilan Provinsi Maluku menyangkut adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku terkait dengan tuntutan ganti rugi ahli waris Syech Saleh Bin Said Atamimi. Saat ini masih dalam proses Persidangan.
2. Tanah BRPPUPP yang berlokasi di Jakabaring seluas 2 Ha, berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 dengan latar belakang atau alasan karena pada saat itu BRPPUPP telah mendapat tugas tambahan sebagai Sentra Penelitian dan Pengembangan Perikanan Perairan Umum Regional maupun Internasional yang terbentuk dalam lembaga *Southeast Asian Fisheries Development Centre* (SEAFDEC), pada tanggal 22 Januari 2013 ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 900/00156/BPKAD/2013 dan Nomor 83/SJ/I/2013 seluas 2 Ha; Peta Bidang Tanah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Silaberanti, atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tanggal 12 April 2013, Surat Ukur Nomor 66/Silaberanti/2013, tanggal 8 April 2013, saat ini terdapat gugatan melawan hukum dari ahli waris Alm. MUSTOFA HARIBUN, BA dan Ahli waris Alm.A. KORIE MUID, dan sampai akhir Desember 2018 telah dilakukan sidang yang ke-25 kali;
3. Bangunan Poltek Sidoarjo masih berdiri di atas tanah pinjam pakai berdasarkan Surat Perjanjian nomor 593/3155/404.3.15/2015 tanggal 18 September 2015 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, sudah mengajukan surat ke Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur untuk kemungkinan asset tersebut untuk di dapat dihibahkan, akhir Tahunan 2018 telah dibahas langkah konkrit penyelesaian status tanah Politeknik KP Sidoarjo dengan komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa opsi apakah berupa hibah, tukar guling, pembelian, maupun opsi yang lain.

### F.4.3 Sengketa Aset Tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga

Aset tanah pada satker SUPM Pariaman seluas 52.425 m<sup>2</sup> senilai Rp157.275.000,00 yang berlokasi di Nagari Campago, Kec. V Koto Kampung dalam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat Lokasi tanah telah dibangun oleh Masyarakat untuk tempat tinggal.

### F.5 TEMUAN BPK

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perihal pemeriksaan terinci atas laporan keuangan bagian anggaran 032 (BA 032) Tahun Anggaran 2023 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya.

Ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yaitu:

#### A. Temuan Non Tubel

No	Satker	Judul Temuan	Nilai Temuan	Setoran	Keterangan	Link Dokumen Tindak Lanjut
1.	Poltek AUP Jakarta	Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Renovasi pada Poltek Ahli Usaha Perikanan Jakarta tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp328.196.676,00				
		a Renovasi Asrama Aster Baru dan Aster Lama dengan nomor kontrak 159.2-SPK/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.420/V/2023 oleh PT. MARVIC LUMONGGA INDAH	116.634.150,00	116.634.150,00	Telah disetor Rp116.634.150,- Tgl 1-04-2024 dengan NTPN : 596F73C1FK1P QFJD	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/12YiarzJuHSdHYtIsz7fTQBw5PJEMpGix?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/12YiarzJuHSdHYtIsz7fTQBw5PJEMpGix?usp=sharing</a>
		b Renovasi Gedung Direktorat,Auditorium Madidihang dan Ruang VIP Poltek AUP dengan nomor kontrak 062.1-SPK/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.420/III/2023 oleh PT. NARA TUNAS KARYA	151.592.870,00	10.000.000,00	Telah disetor Rp10.000.000 tgl 29-04-2024 dengan NTPN 33FAE3C1FK4S FH2S	<a href="https://drive.google.com/file/d/16iKWHf5Q9hSicyYMaX_4AkYNPk939IIH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/16iKWHf5Q9hSicyYMaX_4AkYNPk939IIH/view?usp=sharing</a>
		c Renovasi Asrama Octopus,Thunus da Ruang Makan Loligo dengan nomor kontrak 159.0-SPK/BRSDM-POLTEK.AUP/	33.477.656,00	33.477.656,00	Telah diSetor Rp33.477.656,- Tgl 1-04-2024 dengan NTPN : 27BAB3C1FK1 PQGF5	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fqPXi5CmvUK6ytfIHmm1ACqbziEORq?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1fqPXi5CmvUK6ytfIHmm1ACqbziEORq?usp=sharing</a>

		PL.420/V/2023 oleh CV. ANDI				
		d . Pengadaan Jalan Keliling dengan nomor kontrak 166.6-SPK/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.420/VI/2023 oleh PT. NAGA TOBA PERKASA	26.492.000,00	26.492.000,00	Telah disetor Rp26.492.000,- - Tgl 22-04-2024 dengan NTPN : 03ABB48VVE MV5UAS	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tqZulpbBLHIFMsDN1Beu1Eolj_zfHumJ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tqZulpbBLHIFMsDN1Beu1Eolj_zfHumJ?usp=sharing</a>
			<b>328.196.676,00</b>	<b>186.603.806,00</b>		
2	Poltek AUP Jakarta	Enam Paket Pekerjaan pada Politeknik AUP Jakarta Mengalami Keterlambatan dan Belum Dikenakan Denda senilai Rp9.247.475,00 dan Empat Paket Diantaranya Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp52.157.078,00				
		a . Pekerjaan Perawatan Asrama (Taman Octopus dan Thunus) tidak sesuai kontrak senilai Rp18.668.472,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1.983.376,00 <b>SIMPUL PRIMA GEMILANG. CV</b> kontrak nomor SPK-331.30/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.420 /XI/2023	1.983.376,00	1.983.376,00	telah disetor Rp1.983.376,- Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : 7663D48VVEJJ 104D	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-c7xHioCivkuMqmv0-bAb-x-fkDCxnWb?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-c7xHioCivkuMqmv0-bAb-x-fkDCxnWb?usp=drive_link</a>
			18.668.472,00	18.668.472,00	telah disetor Rp18.668.472,- - Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : 37DD648VVEJ J1NNU	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nDNDHSpf8Y93lLQFauawECa8ZWZJV8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1nDNDHSpf8Y93lLQFauawECa8ZWZJV8?usp=sharing</a>
		b . Pekerjaan Pemeliharaan Asrama Bertingkat Lohan dan Bandeng mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda senilai Rp1.379.000,00 <b>WIJAYA PUTRA SEJAHTERA</b> kontrak nomor SPK-335.3/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.420/XI/2023	1.379.000,00	1.379.000,00	telah disetor Rp1.379.000,- Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : 91E5F2G4VPE Q7MBC	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bNI0kTRStRjN19oIBXh6xTBU5pvpUDa5?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1bNI0kTRStRjN19oIBXh6xTBU5pvpUDa5?usp=sharing</a>

	<p>c . Pekerjaan Perawatan Gedung Kantor Bertingkat tidak sesuai kontrak senilai Rp8.999.651,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1.834.958,00 <b>BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA</b> kontrak nomor SPK-331.24/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.4 20/XI/2023 tgl.20-11-2023</p>	<p>1.834.958,00</p>	<p>1.834.958,00</p>	<p>telah disetor Rp1.834.958,- Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : 1BAA50NA04 A1DPMD</p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IT0tktx8BvBxKrez0VhzKLCXhn-WK1XP?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IT0tktx8BvBxKrez0VhzKLCXhn-WK1XP?usp=sharing</a></p>
		<p>8.999.651,00</p>	<p>8.999.651,00</p>	<p>telah disetor Rp8.999.652,- Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : 1AD4C0NA04 A1DP1M</p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TP-viqGZrZisam-LO8Mwseqi3BDDEXf?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1TP-viqGZrZisam-LO8Mwseqi3BDDEXf?usp=sharing</a></p>
	<p>d . Pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan Bertingkat (Taman Pasca Sarjana) tidak sesuai kontrak senilai Rp13.032.128,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1.714.443,00 <b>KEMSIRO BERKARYA</b> kontrak nomor SPK-331.27/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.4 20/XI/2023</p>	<p>1.714.443,00</p>	<p>1.714.443,00</p>	<p>telah disetor Rp1.714.443,- Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : AC50F48VVEJJ 1P90</p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DZU4eDY0TzeDwOliG27R0ACn1yfv9oao?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1DZU4eDY0TzeDwOliG27R0ACn1yfv9oao?usp=sharing</a></p>
		<p>13.032.128,00</p>	<p>13.032.128,00</p>	<p>telah disetor Rp12.996.128,- Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : D0B261JNFUS DQP68</p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/18fMwENYVdlbEQISG95LB-TNJZORp99r?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/18fMwENYVdlbEQISG95LB-TNJZORp99r?usp=sharing</a></p>
				<p>telah disetor Rp36.000,- Tgl 18-03-2024 NTPN : B21176U8EUB 3R7T4</p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_ScFGPpkhTVPPXYtzWP9lVP7pGQMcDjx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1_ScFGPpkhTVPPXYtzWP9lVP7pGQMcDjx?usp=sharing</a></p>
	<p>e . Pekerjaan Perawatan Aster Baru (Pintu) mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda senilai Rp800.000,00 <b>SMART TECHTEX</b> kontrak nomor SPK-331.2/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.4 20/XI/2023</p>	<p>800.000,00</p>	<p>800.000,00</p>	<p>telah disetor Rp800.000,- Tgl 23-12-2023 SPM 00734T SP2D 23175130205 1843</p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nknNXMHVm0Cvdov8hVZp9j3vf_Jaykgs?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1nknNXMHVm0Cvdov8hVZp9j3vf_Jaykgs?usp=sharing</a></p>

		f	Pekerjaan Perawatan Asrama (Pemeliharaan Taman Kelas dan Perpustakaan) tidak sesuai kontrak senilai Rp11.456.827,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1.535.698,00 <b>DELAYU IRWA SETIA</b> kontrak nomor SPK-331.36/BRSDM-POLTEK.AUP/PL.4 20/XI/2023	1.535.698,00	1.535.698,00	telah disetor Rp1.536.698,- Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : B3F4961QV3 OBRBRS	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/12zdoLd4BBZITxdrdYee_mhzHbG9lqFsX?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/12zdoLd4BBZITxdrdYee_mhzHbG9lqFsX?usp=sharing</a>
				11.456.828,00	11.456.828,00	telah disetor Rp11.456.828,- Tgl 13-03-2024 dengan NTPN : 4BFEB7QLVOT 4LQ8A	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzLJ_i6BlpL6Lxh9KdegK3-ebYAbOepN?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1FzLJ_i6BlpL6Lxh9KdegK3-ebYAbOepN?usp=sharing</a>
				<b>61.404.554,00</b>	<b>61.404.554,00</b>		
3.	Poltek AUP Jakarta		Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Barang Penyelenggaraan Wisuda dan Pelantikan Taruna Baru Nasional Pendidikan Tinggi Vokasi pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Tidak Sesuai Kontrak Rp405.964.620,00				
		a	Pekerjaan Penyelenggaraan Wisuda TA 2023 yang dilaksanakan oleh CV Laju Jasco Maju tidak sesuai kontrak senilai Rp74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	telah disetor Rp74.000.000 tgl 25-04-2024 dengan NTPN 2102061QV3R SADAS	
		b	Pekerjaan Sewa Peralatan Panggung dan Multimedia TA 2023 yang dilaksanakan oleh PT Karya Yura Utama tidak sesuai kontrak senilai Rp146.412.120,00	146.412.120,00	146.412.120,00	telah disetor Rp146.412.120 tgl 25-04-2024 dengan NTPN B2D566U8EU E8NE23	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pSNbnjmSAZFqz3h64tsNHKen4p6Zk3Hq?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1pSNbnjmSAZFqz3h64tsNHKen4p6Zk3Hq?usp=sharing</a>
		c	Pekerjaan Sewa Tenda Wisuda dan Pelantikan Nasional TA 2023 yang dilaksanakan oleh PT Karya Yura Utama tidak sesuai kontrak senilai Rp5.562.500,00	5.562.500,00	5.562.500,00	telah disetor Rp5.562.500 tgl 24-04-2024 dengan NTPN 6662D2G4VPI AMEAB	
		d	Pekerjaan Sewa Tenda dan Pelantikan Nasional TA 2023 yang dilaksanakan oleh CV Alsabil Jaya Mandiri tidak	3.000.000,00	3.000.000,00	telah disetor Rp3.000.000 tgl 24-04-2024 dengan NTPN 2B4FF48VVEN 3GFHO	



		sesuai kontrak senilai Rp3.000.000				
		e . Pekerjaan Sewa Tenda Surnavile dan Flooring yang dilaksanakan oleh CV Indo Rahma Perdana tidak sesuai kontrak senilai Rp83.850.000,00	83.850.000,00	83.850.000,00	telah disetor Rp83.850.000,00 tgl 25-04-2024 dengan NTPN D94A62G4VPI AMG0D	
		f . Pekerjaan Sewa Sarana Pendukung Lainnya Dalam Rangka Wisuda dan Pelantikan Nasional TA 2023 yang dilaksanakan oleh CV Inovasi Multi Kreasi tidak sesuai kontrak senilai Rp49.140.000,00	49.140.000,00	49.140.000,00	telah disetor Rp49.140.000,00 tgl 25-04-2024 dengan NTPN 7BC367QLUP0 L4G6M	
		g . Pekerjaan Sewa Kursi dan Meja dalam Rangka Wisuda dan Pelantikan Nasional TA 2023 yang dilaksanakan oleh CV Galaxy Media Indonesia tidak sesuai kontrak senilai Rp43.990.000,00	43.990.000,00	43.990.000,00	telah disetor Rp43.990.000,00 tgl 24-04-2024 dengan NTPN 3526D2G4VPI AMGFA	
			<b>405.954.620,00</b>	<b>405.954.620,00</b>		
			<b>795.555.850,00</b>	<b>653.962.980,00</b>		
4	SUPM Pariaman	Penatausahaan Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP pada SUPM Pariaman Negeri Pariaman Tidak Tertib dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Senilai Rp60.021.000,00 Dipertanggungjawabkan Menggunakan Daftar Pengeluaran Riil			SPI	
		a . Proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja tidak tertib				
		b . Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Senilai Rp60.021.000,00 Dipertanggungjawabkan Menggunakan Daftar Pengeluaran Riil	60.021.000,00	60.021.000,00	telah diotor Rp60.021.000,00 - Tgl 22-04-2024 dengan NTPN: 8198648VVEN 28MU9	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oLGKjacRppaj7soRwYXdzzaigYWD9oF-?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1oLGKjacRppaj7soRwYXdzzaigYWD9oF-?usp=sharing</a>
			<b>60.021.000,00</b>	<b>60.021.000,00</b>		

5.	SUPM Sorong	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Senilai Rp178.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Senilai Rp20.791.827,00 pada SUPM Negeri Sorong Dipertanggungjawabkan Tidak Sesuai Kondisi Riil					
		a	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Senilai Rp178.000.000,00 Dipertanggungjawabkan Tidak Sesuai Kondisi Riil			SPI	
		- Pemeliharaan asrama taruni CV. Sunook	10.000.000,00	10.000.000,00	Telah disetor Rp10.000.000 tgl 03-05-2024 dengan NTPN 9BE5A7QLUP30I968	<a href="https://drive.google.com/file/d/1nZ79bC-RFsiFKsAYwaDa5j1ZPKN2wb6/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1nZ79bC-RFsiFKsAYwaDa5j1ZPKN2wb6/view?usp=sharing</a>	
		- Pemeliharaan asrama Kakap CV. Cendrawasih Jaya Mandiri	63.000.000,00	63.000.000,00	Telah disetor Rp63.000.000 tgl 03-05-2024 dengan NTPN 7019A3CIFK72H98E	<a href="https://drive.google.com/file/d/1XRPftHBUdeLK_UqIZup5nO2wW2lP1qqf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XRPftHBUdeLK_UqIZup5nO2wW2lP1qqf/view?usp=sharing</a>	
		- Pemeliharaan jalan khusus komplek dan saluran drainase CV. Cahaya Cemerlang	16.000.000,00	16.000.000,00	Telah disetor Rp16.000.000 tgl 03-05-2024 dengan NTPN 8FCDB48VVEPEU9B5	<a href="https://drive.google.com/file/d/13SfeU8_t-7b1MLBpxAf9umZZCw-luVY5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13SfeU8_t-7b1MLBpxAf9umZZCw-luVY5/view?usp=sharing</a>	
		- Pemeliharaan lab basah dan navigasi CV. Cendrawasih Jaya Mandiri	74.000.000,00	74.000.000,00	Telah disetor Rp74.000.000 tgl 03-05-2024 dengan NTPN AD6F748VVEPEU9EB	<a href="https://drive.google.com/file/d/1LXwLh7JuZWMHfPWznsMvuKnL5kGu95i/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LXwLh7JuZWMHfPWznsMvuKnL5kGu95i/view?usp=sharing</a>	
		- Penataan ruang rapat CV. Papua Raya Lestari	15.000.000,00	15.000.000,00	Telah disetor Rp15.000.000 tgl 03-05-2024 dengan NTPN DE9132G4VPM4AB7	<a href="https://drive.google.com/file/d/1dURoJT8TBswDLSMEDAGiRc7z7L9PW7AG/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dURoJT8TBswDLSMEDAGiRc7z7L9PW7AG/view?usp=sharing</a>	
			<b>178.000.000,00</b>	<b>178.000.000,00</b>			
		b	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Senilai Rp20.791.827 tidak benar				
		- Bahan bakar kapal CV. Sunook	20.791.827,00	20.791.827,00	Telah disetor Rp20.791.827 tgl 03-05-2024 dengan NTPN 631250NA04FTAAJ8	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hrOecKgbHudvksGfDrAALTreYEk6kG13/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hrOecKgbHudvksGfDrAALTreYEk6kG13/view?usp=sharing</a>	
	<b>20.791.827,00</b>	<b>20.791.827,00</b>					
	<b>198.791.827,00</b>	<b>198.791.827,00</b>					
6.	Poltek KP Sorong	Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP					

	pada Politeknik KP Sorong Tidak Tertib				
a	Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP Tidak Tertib (Proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja tidak tertib, nama penerima uang pada dokumen kuitansi pada aplikasi SAKTI tidak diisi, penggunaan tanda tangan pengeluaran tidak konsisten)			SPI	
b	Biaya perjalanan dinas dalam negeri berupa biaya hotel/penginapan, biaya pendaftaran pelatihan, dan biaya transportasi taksi senilai Rp37.370.000,00 dipertanggungjawabkan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (DPR)	37.370.000,00	37.370.000,00		telah disetor Rp37.370.000, - Tgl 18-04-2024 dengan NTPN : 4FD573CIFK4 GHQPM  <a href="https://drive.google.com/file/d/1xS9fCKxFa8uhtSU7V1o9_GPqjFjnGXh6/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1xS9fCKxFa8uhtSU7V1o9_GPqjFjnGXh6/view?usp=drive_link</a>
c	Realisasi Belanja Barang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp147.957.955,00	147.957.955,00	147.975.955,00		telah disetor Rp65.000.000, - Tgl 26-04-2024 dengan NTPN : E24981JNFV0 0F33U telah disetor Rp50.000.000, - Tgl 29-04-2024 dengan NTPN : 8C8955DF99 L64TE telah disetor Rp32.975.955, - Tgl 30-04-2024 dengan NTPN : 4FD573CIFK4 GHQPM  <a href="https://drive.google.com/file/d/1zFSDz4lvi8qOodHHMeWJsqGuO1C8jWaJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1zFSDz4lvi8qOodHHMeWJsqGuO1C8jWaJ/view?usp=sharing</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1qqXmDkIKor7R2tULPpShEFpMm_pOi6oN/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qqXmDkIKor7R2tULPpShEFpMm_pOi6oN/view?usp=sharing</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1fRE6skZwBYvXXqIKmwceEv8kErzK6-ca/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fRE6skZwBYvXXqIKmwceEv8kErzK6-ca/view?usp=sharing</a>
d	Pertanggungjawaban belanja honorarium jasa profesi tidak sesuai ketentuan - Pertanggungjawaban belanja honorarium jasa profesi senilai Rp294.065.910,00 tidak memiliki dasar hukum dan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp66.875.000,00	66.875.000,00	66.875.000,00		telah disetor Rp66.875.000, - Tgl 24-04-2024 dengan NTPN : 1C70261QV3R S9NCV  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1q0GRhUUPI--VMotxi8D43bn6b3n8i7nG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1q0GRhUUPI--VMotxi8D43bn6b3n8i7nG?usp=sharing</a>

		<p>-Bukti pembayaran honorarium dosen luar biasa senilai Rp163.300.000,00 tidak diyakini validitasnya</p> <p>-Pembayaran honorarium jasa profesi tidak sesuai dengan keputusan SK KPA total senilai Rp11.350.000,00</p>	11.350.000,00	11.350.000,00	telah disetor Rp11.350.000, - Tgl 30-04-2024 dengan NTPN: 13D957QLUP0 RH2R6	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O3iL2wRdijiiUELh63e898yX82qp5IJ7m?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1O3iL2wRdijiiUELh63e898yX82qp5IJ7m?usp=sharing</a>
7	Poltek KP Sorong	<p>Proses Perencanaan Penganggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Uang Makan dan Bantuan Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama pada Satker Pendidikan BPPSDMKP Tidak Sesuai Kondisi Riil senilai Rp169.675.000,00</p> <p>a Penganggaran dan realisasi belanja bantuan uang makan tidak sesuai ketentuan</p> <p>-Terdapat penggunaan bantuan uang makan yang tidak sesuai dengan kondisi riil senilai Rp169.765.000,00 karena bantuan uang makan tersebut tidak diberikan kepada peserta didik.</p> <p>b Penganggaran dan realisasi belanja bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan tidak sesuai ketentuan</p>	263.552.955,00	263.570.955,00	SPI	
			91.675.000,00	91.675.000,00	<p>Telah disetor Rp91.765.000 tgl 03-05-2024 dengan NTPN 91C2D0NA04F S9RCR</p>	<a href="https://drive.google.com/file/d/1SZYMRXwy2qcEmdY6C1c64GuZ6iDXlJjBX/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1SZYMRXwy2qcEmdY6C1c64GuZ6iDXlJjBX/view?usp=sharing</a>
			91.675.000,00	91.675.000,00		
			355.227.955,00	355.245.955,00		
8	BPPP Tegal	<p>Pengelolaan Keuangan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal Belum Tertib</p> <p>a Kelebihan Belanja Pegawai senilai Rp5.786.300,00 tidak dicatat dan dilaporkan oleh Bendahara Pengeluaran</p>	5.786.300,00	5.786.300,00	telah disetor Rp3.286.300,00 tgl 21-02-2024 dengan NTPN 685FA61QV3L PVD01	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eSVQvBFAZWdvG_fo6HXAmWNB02H8SVI8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1eSVQvBFAZWdvG_fo6HXAmWNB02H8SVI8?usp=sharing</a>

		b	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan kurang dibayar senilai Rp16.767.000,00	16.767.000,00	16.767.000,00	telah disetor Rp2.500.000,00 tgl 21-02-2024 dengan NTPN D78C648VVEH15ERJ telah dilakukan penyetoran sebesar Rp16.767.000,00 ke rekening operasional BLU BP3 Tegal pada tanggal 26 Maret 2024 senilai Rp12.741.000,00 serta tanggal 27 Februari senilai Rp2.031.000,00 dan Rp1.995.000,00. SPI-tanggapan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xadiXF7zWI2mGDkubIHQkFRC7XDvGzym?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1xadiXF7zWI2mGDkubIHQkFRC7XDvGzym?usp=sharing</a>
		c	BP3 Tegal belum menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri				<a href="https://drive.google.com/file/d/1UE2FFbigLE67OE_VTUUH-u3EmievsBJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UE2FFbigLE67OE_VTUUH-u3EmievsBJ/view?usp=sharing</a>
9	BRPPU PP Palembang		Penatausahaan Belanja Barang Dengan Mekanisme UP/TUP pada BRPPUPP Palembang Tidak Tertib dan Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban Senilai Rp24.123.055,00 serta Tidak Sesuai Kondisi Riil Senilai Rp165.158.129,00	<b>22.553.300,00</b>	<b>22.553.300,00</b>		
		a	Penatausahaan Belanja Barang dan Jasa pada BRPPUPP Tidak Tertib			SPI - tanggapan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1PFXYHsbJsh4KdHQhVIMdZToZyJUn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1PFXYHsbJsh4KdHQhVIMdZToZyJUn/view?usp=sharing</a>
		b	Belanja Barang dan Jasa dengan Mekanisme UP/TUP tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp24.123.055,00	24.123.055,00	24.123.055,00	telah disetor Rp24.123.055,00 - Tgl 3-04-2024 dengan NTPN: 67E450NA04CU2TBE	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/17zR9W865xOkC8BhppEE_lg7X2iMawWJI?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/17zR9W865xOkC8BhppEE_lg7X2iMawWJI?usp=sharing</a>
		c	Belanja Barang kepada Koperasi Penelitian Penyuluhan Perikanan (KP3) tidak sesuai kondisi riil senilai Rp165.158.129,00	165.158.129,00	165.158.129,00	Telah disetor Rp25.000.000 tgl 02-05-2024 dengan NTPN 4E67E48VVEPDTBDV	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Nr9DxrK2hROqzQjYSxPOGVO_CTfEJFb2/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Nr9DxrK2hROqzQjYSxPOGVO_CTfEJFb2/view?usp=sharing</a>
				<b>189.281.184,00</b>	<b>189.281.184,00</b>		

10	Satker BLU lingkup BPPSDM	<p>BLU lingkup KKP Belum Menyelenggarakan dan Mengembangkan Subsistem Akuntansi Secara Mandiri dan Belum Seluruhnya Menetapkan Pejabat Keuangan BLU</p> <p>a. Seluruh satuan kerja BLU belum menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri</p> <p>b. Lima satuan kerja BLU belum menetapkan Pejabat Keuangan BLU (BPPP Tegal dan Poltek KP Sidoarjo) - BPPP Tegal</p>			<p>SPI</p> <p>Tanggapan</p>	<p>-</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1U_E2FFbiqLE67OE_VTUUH-u3EmievsBJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1U_E2FFbiqLE67OE_VTUUH-u3EmievsBJ/view?usp=sharing</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1k_TrQamyc9b3P7aaP2Oo91KOVGOD81Kk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1k_TrQamyc9b3P7aaP2Oo91KOVGOD81Kk/view?usp=sharing</a></p>
		- Poltek KP Sidoarjo				<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1k_TrQamyc9b3P7aaP2Oo91KOVGOD81Kk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1k_TrQamyc9b3P7aaP2Oo91KOVGOD81Kk/view?usp=sharing</a></p>

**B. Temuan Tubel**

Pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Tugas Belajar pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tidak sesuai ketentuan senilai Rp529.134.714,00.

Terkait hal tersebut BPPSDM telah menindaklanjuti seluruh temuan baik itu dengan setoran pada tahun 2024 maupun dengan SPTJM.

Data Tindak Lanjut Tersebut dilakukan update data pada [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MRv-uy\\_e6RPpqmF\\_78v9mHT0wlhJzNzu/edit#gid=210545056](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MRv-uy_e6RPpqmF_78v9mHT0wlhJzNzu/edit#gid=210545056)

**C. Tindak Lanjut Pencatatan**

Berdasarkan hal tersebut di atas dilakukan koreksi jurnal atas persetujuan bersama BPK RI pada periode adj 2 2023.

## F.6 REKAPITULASI PERMASALAHAN HUKUM

No	Permasalahan Hukum	Perkembangan Saat Ini
1.	Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 865/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Gugatan Penguasaan Tanpa Hak Tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Selatan Kepemilikan tanah Tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu Jakarta Selatan digugat kembali oleh para ahli waris	Pada Tanggal 21 Desember 2021 Putusan pengadilan sudah tetap (Inkrach), pengurusan sertifikat tanah ke BPN
2.	Perbuatan melawan hukum Perkara Nomor 692/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Penghuni rumah negara di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Sempur Bogor. Gugatan Rumah Dinas BRPBATPP di Cibalagung, Bogor, Jawa Barat. Para penghuni yang sudah pensiun tidak bersedia meninggalkan rumah dinas dan mengkalim rumah tersebut sudah menjadi milik pribadi.	Tanggal 21 Desember 2021 telah dilaksanakan sidang ke 19 (proses persidangan masih berjalan)
3.	<b>Gugatan Perdata:</b> Memori Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 14/PDT/2021/PT.JAP Tgl 22 April 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 90/Pdt.G/2019/PN.Son Tgl 14 Desember 2020  <b>Pokok Gugatan:</b> Pemohon Memori Kasasi adalah ahli Waris Alm, Ir. Zulkifli Bugis (Dahulu PNS SUPM) mengajukan gugatan atas kepemilikan atas Tanah dan Rumah Negara milik SUPM Sorong seluas ± 200 m <sup>2</sup> ,	Saat ini sudah memasuki tahap Sidang Kasasi di Mahkamah Agung
4.	Penyelesaian temuan pemeriksaan BPK terkait pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan aquarium di Pangdaran dan Morotai a) dalam temuan tersebut, BPK mempermasalahkan kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan KSO yaitu pembangunan aquarium dengan bahan acrylic (panjang 32 meter, tinggi 4 meter, dan tebal 15 cm); b) berdasarkan pengukuran di lapangan oleh BPK, volume pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia yaitu aquarium dengan panjang 24,6 meter; c) kontrak awal dan rencana anggaran biaya awal tidak menyebutkan ukuran pasti aquarium dimaksud mengingat pekerjaan tersebut bersifat design and build yang berarti masih ada keleluasaan dalam menentukan dimensi ukuran aquarium dimaksud; d) selanjutnya dilakukan pembahasan detail rencana pembangunan dan dilakukan addendum kontrak yang menyebutkan ukuran aquarium panjang 32 meter dan ukuran tersebut tertuang dalam rencana anggaran biaya final quantity; e) namun demikian, dalam Detail Engineering Design (DED) disebutkan bahwa panjang konstruksi aquarium adalah 24 meter yang diapit oleh beton bangunan sehingga total panjang 32 meter; f) BPPSDM KP menyatakan BPK terbuka dalam penyelesaian temuan dimaksud termasuk dalam nilai volume kekurangan pekerjaan;	1. Pada tanggal 24 November 2020, telah dilakukan pembahasan dengan Ahli Pengadaan, dengan hasil a. dilakukan kembali pengumpulan dokumen lengkap guna mengetahui titik-titik kelemahan dan kekuatan dalam permasalahan ini; b. dilakukan konsultasi dengan LKPP berkaitan dengan ketepatan penentuan jenis kontrak dalam pengadaan ini; c. melakukan penagihan kepada Penyedia agar tetap memenuhi temuan BPK; d. mengingat pilihan penyelesaian sengketa para pihak dalam pengadaan ini menggunakan forum arbitrase BANI, sehingga perlu membuka opsi pilihan penyelesaian lain dengan Penyedia misalnya melalui layanan penyelesaian sengketa pada LKPP. 2. Pada tanggal 11 Januari 2020 telah dilakukan pendampingan atas pemeriksaan terhadap pihak BPPSDMKP yang terkait dengan proyek dimaksud.  <b>(kasus ini masih aktif, namun belum ada info perkembangan terakhir)</b>
5.	Dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Politeknik KP Dumai pada Pusat Pendidikan KP, BPPSDM Tahun Anggaran 2017 a. Pemeriksaan saksi atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Politeknik KP Dumai pada Pusat Pendidikan KP, BPPSDM Tahun Anggaran 2017; b. Pemeriksaan Saksi dilaksanakan berdasarkan Surat Panggilan Saksi dari Kepolisian Resort Dumai Nomor SP/199/VIII/2020/Reskrim, tanggal 7 Agustus 2020; c. pemeriksaan saksi dilakukan terhadap Pegawai Pusat Pendidikan KP, BPPSDM, KKP.	Telah dilakukan pendampingan terhadap Kapusdik di Bareskrim pada tanggal 10 Desember 2020 (Kasus ini masih aktif, namun belum ada info perkembangan terakhir)

6.	<p>Kasus Pangandaran Integated Aquarium and Marine (PIAMARI) Pangandaran dilakukan pemanggilan oleh Tim Subdit V Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya</p> <p>Permintaan keterangan terhadap PT Amarta Karya (Persero) dan PT Virama Karya (Persero), untuk melakukan sinkronisasi data, mulai dari penandatanganan kontrak sampai laporan akhir kontrak, baik untuk konstruksi gedung maupun Managemen Konstruksi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal 22 Oktober 2021 telah dilakukan rapat pembahasan berdasarkan undangan dari Kepala Pusat Riset Kelautan;</li> <li>2. Komunikasi secara informal telah dilaksanakan dengan BPPSDM atas kasus tersebut.</li> </ol>
7.	<p>Telaah penyelesaian pengelolaan aset Tanah Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Politeknik KP Sidoarjo menempati tanah yang saat ini ada sejak tahun 1982 hingga saat ini (39 tahun) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: DA/224/SK/HP/1983, tanggal 22 Februari 1984, terkait hak pakai kepada Pemerintah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo, untuk SUPM (Cikal bakal Politeknik KP Sidoarjo) melalui Pinjam Pakai tahun 2013 s.d 2015, tahun 2015 s.d 2020, berakhir bulan mei 2020;</li> <li>b. sejak bulan September 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengajukan permohonan hibah BMN Tanah Politeknik KP Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo. Berbagai upaya telah dilakukan namun sampai dengan saat ini belum terlaksana. Sampai dengan pada tanggal 12 Maret 2020, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mengirimkan Surat Penolakan Hibah, kepada Direktur Politeknik KP Sidoarjo;</li> <li>c. meskipun KKP telah menerima pinjam pakai tanah kurang lebih 6.000 m2, dan dalam proses hibah seluas 10 Ha dari Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur guna pengembangan Politeknik KP Sidoarjo perlu untuk kiranya agar Politeknik KP Sidoarjo tetap menempati tanah saat ini dengan alasan;</li> <li>d. secara historis tanah tersebut berasal dari kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia yang diteruskan oleh Kementerian Pertanian (sebelum otonomi) untuk Sekolah Perikanan seharusnya diterima oleh KKP;</li> <li>e. Politeknik KP Sidoarjo telah menempati dan memanfaatkan tanah tersebut selama 39 tahun;</li> <li>f. di atas tanah tersebut berdiri bangunan sekolah yang merupakan BMN KKP.</li> <li>g. saat ini untuk tanah yang berada di Desa Banjar Kemuning yang selama ini digunakan untuk lahan praktik Siswa Politeknik KP Sidoarjo dikuasai oleh LSM atas perintah Sekda sementara masih terdapat aset Politeknik KP Sidoarjo di atas tanah tersebut, sehingga berpotensi terjadi perselisihan dengan LSM;</li> </ol> <p>Sejak bulan September 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengajukan permohonan hibah BMN Tanah Politeknik KP Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo. Berbagai upaya telah dilakukan namun sampai dengan saat ini belum terlaksana. Sampai dengan pada tanggal 12 Maret 2020, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mengirimkan Surat Penolakan Hibah, kepada Direktur Politeknik KP Sidoarjo;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan rapat pembahasan tanggal 14 Agustus 2021;</li> <li>2. Berkoordinasi/ mengadakan FGD dengan;</li> <li>3. Kemendagri dan Kementerian Keuangan (rencana tanggal 20 Agustus 2021)</li> </ol> <p>Rencana akan dilakukan pembentukan tim</p>
8.	<p>Penyelesaian atas 7 (tujuh) rumah negara golongan II yang saat ini masih ditempati oleh pensiunan BRPSDI Jatiluhur Jawa Barat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada tanggal 3 Januari 2020 BRPSDI Jatiluhur telah menyampaikan surat pemberitahuan pengosongan kepada para penghuni melalui surat No.001/BPPSDM-BRPSDI.750/1/2020;</li> <li>b. terhadap surat pemberitahuan tersebut para penghuni menyampaikan balasan yang pada pokoknya meminta agar rumah negara tersebut diturunkan statusnya menjadi rumah negara golongan III dengan tujuan rumah negara tersebut bisa dibeli oleh para penghuni tersebut;</li> <li>c. berdasarkan hasil audit kinerja BRPSDI Jatiluhur yang dilakukan Inspektorat I tanggal 28 September 2021, terdapat temuan mengenai pemanfaatan rumah negara belum sesuai ketentuan, sehingga direkomendasikan kepada BRPSDI Jatiluhur selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat perjanjian atau kesepakatan kerja sama penggunaan aset rumah negara dengan para penghuni untuk batas waktu tertentu, untuk selanjutnya para penghuni mengosongkan rumah negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal 9 September 2021 tim ADIH telah melakukan rapat koordinasi dengan BRPSDI Jatiluhur untuk mencari solusi;</li> <li>2. Para penghuni telah bersedia untuk meninggalkan rumah negara tersebut maksimal Desember 2021</li> </ol>



## F.7 INFORMASI PROSES LIKUIDASI SATKER INAKTIF

Pada Tahun 2023 terdapat Satker Inaktif pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berjumlah 2 Satker, Daerah (KD). Rincian Satker tersebut yaitu:

1. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang; dan
2. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone.

Pada neraca per 31 Desember 2023, satker tersebut sudah tidak terdapat nilai saldo karena telah ditransfer asetnya dengan ke satker tujuan, yaitu SUPM Kupang ditransfer ke Politeknik KP Kupang dan SUPM Bone di transfer ke Politeknik KP Bone.

## F.8 PENGUNGKAPAN SISA BBM KAPAL

Menindaklanjuti surat ketua tim Pemeriksa BPK RI Nomor 8/KKP/LK-KKP/04/2024 tanggal 4 April 2024 hal penjelasan tertulis terkait pengungkapan pada CaLK atas Persediaan sisa BBM di kapal-kapal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Pengelolaan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan per 31 Desember Tahun 2023 menggunakan akun belanja Barang Non Operasional Lainnya dan bukan menggunakan akun belanja persediaan. Menindaklanjuti surat tersebut, kami telah mendata sisa BBM yang masih ada di Kapal-kapal kami dan pada saat laporan ini dibuat belum seluruh satker menyampaikan hasil perhitungan sisa BBM pada satker masing-masing.

Data yang masuk dari 9 satker, sisa BBM yang masih ada dikapal berjumlah 82.374 liter yang terdiri dari 11 Kapal. Data yang belum masuk akan kami sampaikan kemudian pada hari Senin, tanggal 16 April 2024 dengan link [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hpUotHRpKb7k-1maBfFIQntIw17-uLAT-vmW68T\\_OFU/edit#gid=1434346557](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hpUotHRpKb7k-1maBfFIQntIw17-uLAT-vmW68T_OFU/edit#gid=1434346557).

## F.9 KSO PIAMARI

Kronologis:

Pada pekerjaan pembangunan Akuarium PIAMARI Pangandaran pada Pusat Riset Kelautan/Pusat Penyuluhan KP yang dilaksanakan oleh KSO PT Pangkho Megah-PT Daya Cipta Dianrancana sesuai Kontrak No 172/PPK/BRSDM.2/ PL.420/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, terdapat 45 temuan BPK RI

berupa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.896.388.8923, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 13c/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Terhadap temuan tersebut, penyedia menolak temuan BPK RI dan belum melakukan penyetoran sama sekali. Setelah dilakukan 4 kali teguran kepada pihak Penyedia agar melakukan penyetoran, akan tetapi pihak Penyedia tetap menolak untuk menyetor. Sehingga urusan penagihannya dilimpahkan ke pihak KPKNL Jakarta II dalam hal ini ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta. Status akhir terhadap temuan tersebut adalah bahwa pihak KPKNL akan menerbitkan Surat Paksa ke pihak penyedia, pada saat dilakukan mediasi pihak Penyedia tetap menolak Temuan BPK RI.

#### Perkembangan Triwulan III 2023

1. Tanggal 11 September 2023 Kepala KPKNL Jakarta II meminta bantuan Kepala KPKNL Tangerang I menyampaikan surat Paksa atas nama Kerjasama Operasional (KSO) PT Pangkho Megah-PT Daya Cipta Dianrancana.

2. Tanggal 4 Oktober 2023, Kepala KPKNL Jakarta II menyurati Kepala BRSDMKP untuk pendampingan penyampaian surat paksa kepada Penanggung Jawab Kerjasama Operasional (KSO) PT Pangkho Megah - PT Daya Cipta Dianrancana, bahwa akan dilaksanakan penyampaian Surat Paksa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 (terlampir) 3. Tanggal 5 Oktober 2023 Tim KPKNL Jakarta II, Tim KPKNL Tangerang I, Tim Inspektorat Jenderal KKP, Tim Sekretariat BPPSDMKP dan Tim Pusriskel menyampaikan surat paksa kepada Sdr. A.J.Judi Prajitno Putra, selaku Kuasa Direktur Kerjasama Operasional (KSO) PT. Pangkho Megah-PT. Daya Cipta Dianrancana. Saat disampaikan surat, Sdr. A.J.Judi Prajitno Putra tidak berada di tempat.

#### Perkembangan hingga Triwulan IV

1. KPKNL Jakarta II Tanggal 27 November 2023 menyampaikan surat kepada Penanggung Jawab Kerjasama Operasional (KSO) PT. Pangkho Megah - PT. Daya Cipta Dianrancana Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Keperdataandan/atau Tindakan layanan publik. Penanggung Jawab KSO, Pt. Pangkho dan PT. Dianrancana menyampaikan akan mengikuti Crash Program Pelunasan Utang (CPPU) tahun 2023, sehingga Piutang Negara yang harus dibayar hanya sebesar sekitar Rp.600.000.000,-.

2. Hingga batas akhir CPPU tahun 2023 belum juga membayar kewajiban. Selanjutnya akan dikenakan tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Pada Tanggal 1 April 2024 dilakukan rekonsiliasi Piutang kepada KPKNL Jakarta II.

Berdasarkan Surat dari KPKNL Jakarta VI Nomor S-411/KNL.0702/2024 sebagai berikut:

A. PT Carita Boat Indonesia

1. Resume Pengurusan piutang Negara atas nama PT Carita Boat Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Tahap Pengurusan	Nomor Surat	Tanggal
1	SP3N	SP3N-308/PUPNC.10.02/2019	27 Juni 2019
2	Panggilan	S-1736/WKN.07/KNL.02/2019	16 Juli 2019
3	Panggilan Terakhir	S-2014/WKN.07/KNL.02/2019	21 Agustus 2019
4	PJPN	PJPN-1648/PUPNC.10.02/2019	25 oktober 2019
5	Surat Paksa	SP-2518/PUPNC.10.00/2019	30 Desember 2019
6	Penyampaian Surat Paksa	BASP-01/WKN.6/KNL.02.04/2020	24 Februari 2020

2. Kami telah memberitahukan penyelesaian utang melalui Crash Program Keringanan utang kepada PT CBI melalui Surat Nomor : S-1237/WKN.0702/2023 tanggal 04 April 2023 agar debitur dapat mengajukan keringanan untuk menyelesaikan kewajiban, namun debitur tidak mengajukan permohonan untuk mengikuti keringanan utang, karena dana yang akan digunakan untuk pembayaran belum cair sampai batas waktu keringanan berakhir.

B. KSO PT Pangkho Megah - PT Daya Cipta Dianrancana

1. Resume Pengurusan piutang Negara atas nama KSO PT Pangkho Megah - PT Daya Cipta Dianrancana adalah sebagai berikut:

No	Tahap Pengurusan	Nomor Surat	Tanggal
1	SP3N	SP3N-119/PUPNC.10.02/2021	28 September 2021
2	Panggilan	S- 3912 /WKN.07/KNL.02/2021	01 Oktober 2021
3	BATJ	BATJ-02/WKN.07/KNL.0204/2021	13 Oktober 2021

4	PJPN	PJPN-378/PUPNc.10.02/2022	22 April 2022
5	Surat Paksa	SP-466/PUPNC.10.00/2023	15 Mei 2023
6	Penyampaian SP	BASP-04/KNL.060203/2023	5 Oktober 2023

2. Kami telah memberitahukan penyelesaian utang melalui Crash Program Keringanan Utang kepada KSO PT Pangkho Megah - PT Daya Cipta Dianrancana melalui Surat Nomor : S-1431/WKN.0702/2023 tanggal 14 April 2023 agar debitur dapat mengajukan keringanan untuk menyelesaikan utangnya, namun debitur tidak mengindahkan surat tersebut.
3. Kami telah menyampaikan surat nomor S-4849/KNL.0702/2023 tanggal 27 November 2023, hal Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan.

#### D. PT Tata Guna Pratama

1. Resume Pengurusan piutang Negara atas nama PT Tata Guna Pratama adalah sebagai berikut:

No	Tahap Pengurusan	Nomor Surat	Tanggal
1	SP3N	SP3N-168/PUPNC.10.02/2023	30 Oktober 2023
2	Panggilan	S- 4382/KNL.0702/2023	30 Oktober 2023
3	Panggilan Terakhir	S- 4958/KNL.0702/2023	05 Desember 2023

2. Pengurus PT Tata Guna Pratama menyampaikan akan mengupayakan untuk melakukan pembayaran utang melalui angsuran mulai bulan April 2024. Apabila tidak terdapat progres yang positif, Kami akan meningkatkan proses pengurusan ke tahap Penerbitan Surat Paksa (SP).

### F.10 Progress Transfer BMN ke BRIN

Sesuai dengan amanat pasal 65 dalam Peraturan Presiden No: 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa tugas, fungsi dan kewenangan penelitian, pengembangan dan penerapan beserta Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran dialihkan dari K/L teknis ke BRIN.

Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan KepMen KP No: 1 tahun 2022 tentang Tim Pengalihan Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran Penelitian, Pengembangan dan Penerapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional Pengalihan SDM Riset KKP kepada BRIN disampaikan melalui surat No.

R.42/SJ/KP.430/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, perihal Pengalihan Tenaga Fungsional Jabatan Peneliti, Perekayasa dan Litkayasa pada Unit Kerja Lingkup KKP Yang Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Penelitian dan Keperekayasaan.

Selanjutnya dilakukan verifikasi data pegawai yang diusulkan secara bersama antara tim KKP dan BRIN. Atas hasil verifikasi tersebut BRIN menyampaikan surat No. B-18526/II.2.3/KP.03.00/4/2022 tanggal 28 April 2022 SDM Riset KKP yang beralih tugas ke BRIN sebanyak 529 orang terdiri 367 peneliti, 81 perekayasa dan 81 teknisi litkayasa. Secara bertahap BRIN telah melantik yang bersangkutan dalam jabatan fungsional masing-masing dan telah menerima hak gaji serta tunjangan yang dibayarkan oleh BRIN sejak bulan Juli 2022.

Pengalihan Aset KKP kepada BRIN disampaikan melalui surat No. B.55/MEN-KP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 perihal rencana pengalihan aset di 8 klaster (Ancol, Slipi, Cibalagung, Depok, Jatiluhur, Palembang, Maros dan Gondol) sebanyak 5.684 unit senilai 377 milyar. Kepala BRIN telah merespon surat dimaksud dengan melakukan kunjungan ke masing-masing klaster lokasi riset dimaksud. Hasil dari kunjungan selanjutnya Kepala BRIN menyampaikan surat No B-2758 tertanggal 10 Mei 2022 dan No B-3662 tertanggal 14 juni 2022 dengan substansi pokok bahwa BRIN menerima aset riset pada lokasi Gondol, sedangkan aset riset pada lokasi lainnya dipersilahkan untuk digunakan oleh KKP.

Menindaklanjuti kedua surat Kepala BRIN dimaksud, telah dilakukan inventarisasi BMN di Gondol secara terpadu oleh tim KKP dan BRIN. Kesepakatan hasil inventarisasi bahwa BMN yang dialihkan ke BRIN sebanyak 443 unit senilai 26 milyar. KKP selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan alih status BMN kepada Kementerian Keuangan melalui surat No: B.385/SJ/PL.710/VIII/2022 tertanggal 23 Agustus 2022. Atas permohonan tersebut Kementerian Keuangan telah menyampaikan surat No: S-43/MK.6/KNL.1402/2022 perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Alih Status Penggunaan BMN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor B.3692/SJ.2/PL.450/X/2022 dan B.6643/II.2/PL.02.02/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan BMN yang dialihkan ke BRIN sebanyak 443 unit senilai Rp26.361.268.558 dan diterbitkan Surat

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Barang Milik Negara nomor 848/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2022 tanggal 10 November 2022.

Pengalihan Aset Tak Berwujud Berupa Kekayaan Intelektual ke Badan Riset dan Inovasi Nasional Surat Sekretaris BRSDMKP Nomor 1248/BRSDM.1/HK.620/VII/2022 perihal Perkembangan Pengalihan Aset Tak Berwujud Berupa Kekayaan Intelektual ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tanggal 5 Juli 2022.

#### **F.11 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL**

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan per 31 Desember Tahun 2023 memperoleh pendapatan dan belanja secara akrual senilai Rp32.051.728.502,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp24.731.913.000,00. Ini dibuktikan dengan laporan pendapatan dan belanja secara akrual per 31 Desember Tahun Anggaran 2023. (*Terlampir*)